Dr. Ibnu Burdah, M.A.
Menuju
DUNIA
BARU
ARAB
Revolusi Rakyat,
Demokratisasi,
dan Kekuasaan
tw
TIARA WACANA

MENUJU

DUNIA BARU ARAB

Revolusi Rakyat, Demokratisasi, dan Kekuasaan

Dr. Ibnu Burdah, M.A.

MENUJU

DUNIA BARU ARAB

Revolusi Rakyat, Demokratisasi, dan Kekuasaan

Menuju Dunia Baru Arab: Revolusi Rakyat, Demokratisasi, dan Kekuasaan

Penulis: Dr. Ibnu Burdah, M.A.
Editor: Muhammad Yahya
Tata Letak: Aye Z Wafa
Cover: Hanif Zuhdi Rabbani
Latar foto cover: http://www.mei.edu/content/egyptian-summer

Cetakan pertama: 2013

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
KATALOG DALAM TERBITAN

Ibnu Burdah

Menuju Dunia Baru Arab: Revolusi Rakyat, Demokratisasi, dan Kekuasaan;
Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

xii + 156 hlm.
21 cm.
ISBN 978-979-1262-68-2

Penerbit Tiara Wacana
Kopen Utama 16, Jalan Kaliurang km 7,8
Sleman, Yogyakarta 55581
Telp/faks. (0274) 880683
surel: yogya@tiarawacana.co.id
www.tiarawacana.co.id

untuk

para pejuang perubahan

di dunia Arab

(meskipun agak terlambat)

Prakata

Buku ini membahas fase awal proses perubahan di sejumlah negara Arab yang ditandai dengan kebangkitan rakyat untuk melawan rezim-rezim diktaktor yang berkuasa. Fase ini tentu sangat penting untuk mencermati peristiwa-peristiwa awal yang terjadi dan melatari proses gerakan rakyat yang kemudian disebut sebagai "musim semi Arab" itu, sebab-sebab gerakan, serta arah dari awal gerakan. Pembahasan tentang fase gerakan ini bagaimanapun diperlukan bagi mereka yang tertarik mempelajari tren-tren mutakhir di dunia Arab kontemporer ataupun dunia Islam kontemporer secara umum. Sebab, bagaimanapun, wilayah Arab merupakan bagian dunia Islam yang sangat penting.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa fase awal proses gerakan rakyat di sejumlah negara Arab ini membawa harapan perubahan yang cukup menjanjikan, yaitu lahirnya dunia Arab baru yang demokratis, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Harapan-harapan dari proses perubahan fase awal ini tercermin cukup terinci dalam tulisan sederhana ini. Namun, fakta kemudian juga menunjukkan bahwa harapan perubahan itu pada gilirannya berubah menjadi arena pertarungan antarkelompok,

baik di dalam negeri sejumlah negara, antaraktor kawasan yang begitu agresif, dan bahkan aktor-aktor internasional dengan beragam kepentingan yang saling diperebutkan dan isu-isu baru yang bermunculan. Konsep-konsep kunci yang muncul kemudian sangat berbeda dengan fase awal. Jika pada fase awal, digunakan konsep "musim semi Arab" (*Arab springs*/*al-Rabi' al-Arabiy*) atau revolusi rakyat (*al-tsaurah al-sya'biyyah*), maka konsep yang digunakan pada fase berikutnya adalah *al-tsaurah al-mudhaddah* (kontra revolusi) yang berisi tentang pertarungan sektarian, kabilah, dan kelompok-kelompok lain dalam ruang baru yang "demokratis" dan menjurus liar dan menggunakan sarana-sarana demokrasi, di samping senjata. Fase yang sangat kompleks dari proses perubahan yang disebut terakhir ini tidak termasuk dalam pembahasan dalam buku ini dan insya Allah akan menjadi bagian dari pembahasan buku penulis selanjutnya.

Sebagai kumpulan tulisan terkait peristiwa-peristiwa penting di dunia Arab, buku ini tentu mengandung banyak kekurangan terutama dalam kepaduan pembahasan. Sebab buku ini tidak hanya berfokus pada perubahan pada satu negara, melainkan di sejumlah negara Arab seperti Tunisia, Mesir, Suriah, Bahrain, Libya, dan seterusnya. Tak mudah untuk menghadirkan dalam waktu yang cepat kepaduan yang kuat dalam pembahasan tentang proses perubahan di negara-negara yang berbeda ini. Namun, penulis tetap berharap buku ini menjadi salah satu bacaan yang bermanfaat bagi pembelajar dunia Arab kontemporer khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Amiin.

Yogyakarta, 2013

Ibnu Burdah

Daftar Isi

BAB I

Pendahuluan

A. Materi Buku dan Metodologi

Buku ini berisi deskripsi, ekplanasi, dan prediksi seputar gerakan protes rakyat yang melanda di hampir seluruh negara Arab sejak penghujung tahun 2010 hingga saat buku ini dicetak (pertengahan tahun 2011). Sebagai upaya *deskripsi*, materi buku ini pertama-tama merupakan upaya pencarian pola-pola dari gerakan itu dan hal-hal yang terkait dengannya.[1] Dengan kata lain, deskripsi dilakukan dengan menjajarkan fakta dari berbagai peristiwa tersebut dengan tujuan agar kita lebih mudah memahami serangkaian gerakan protes rakyat tersebut, baik secara umum dan spesifik.

Sumber data yang digunakan untuk penjajaran fakta tersebut bersumber pada pelbagai reportase televisi, terutama dari *Al-Jazeera* “Arab” dan internasional, *Al-Alam*, *Press TV*, *Al-Arabiyya*, *Nile TV*, dan chanel-chanel televisi regional dan

1) James A. Black, *Methods and Issues in Social Research* (Canada: John Wiley and Sons, 1976), hlm. 77-79.

nasional Dunia Arab; liputan pemberitaan harian-harian terkemuka di Timur Tengah seperti *Al-Ahram, al-Hayah, al-Syarq al-Awshath*, dan semacamnya. Di samping itu, liputan media massa di tanah air baik cetak maupun elektronik terutama harian *Kompas, Republika, Jawa Pos, TV One, Metro TV,* juga sangat membantu upaya pengumpulan data tersebut. Dalam hal ini, sumber informasi dari setiap data tidak dicantumkan melalui catatan bawah atau catatan akhir lantaran sebagian besar data memang bersumber dari pengamatan melalui liputan pemberitan dari stasiun-stasiun televisi di atas, serta didukung oleh media-media lain.

Di samping itu, di dalam buku ini juga dikemukakan *eksplanasi* (penjelasan) atas sekumpulan fakta yang telah disusun baik oleh penulis maupun pihak lain. Penjelasan itu barangkali masih dirasakan amat sederhana tanpa menyebutkan secara ekplisit argumen dan landasan teoretik yang memadai. Ini lantaran tulisan ini mulanya diperuntukkan media massa yang memerlukan analisis cepat dan batasan tiras halaman yang ketat. Namun demikian, dengan segala keterbatasan itu, telah diupayakan pula penyajian ekplanasi sekuat, sedalam, dan seargumentatif mungkin. Hal-hal yang amat membantu adalah "sekelumit" pengetahuan penulis tentang teori-teori Hubungan Internasional, sedikit pengetahuan tentang geopolitik, geokultural, dan "geososial" Dunia Arab, serta sedikit penguasaan bahasa dan sastra Arab.

Atas dasar fakta-fakta yang disusun dan eksplanasi yang dikemukakan, di dalam buku ini disampaikan pula beberapa *prediksi*. Pekerjaan ini seringkali sangat menarik dan menantang banyak orang, terutama para pengamat yang "penuh semangat". Tetapi hal itu sesungguhnya bukan merupakan pekerjaan mudah, apalagi bila dikaitkan dengan kaidah-kaidah akademik yang ketat. Prediksi-prediksi yang ada di dalam buku ini juga

merupakan upaya yang dilakukan secara cepat guna merespons berbagai perkembangan yang terjadi di negara-negara Arab.

Yang terakhir, melalui buku ini juga didesakkan perlunya dilakukan diseminasi sejumlah nilai sesegera mungkin, yakni yang menyangkut perdamaian, nilai-nilai kemanusiaan, keislaman, dan keindonesiaan. Jika pun belum bisa menjadi tujuan, langkah tersebut diharapkan dapat memberi sumbangan yang signifikan demi terwujudnya keamanan dan perdamaian dunia, termasuk di Dunia Arab dan Dunia Islam; menguatnya nilai-nilai humanitarian-transendetal dalam hubungan antar individu, kelompok, dan bangsa; serta terwujudnya Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan bermanfaat untuk masyarakat dunia.

B. Signifikansi

Tulisan ini kendati sederhana diharapkan memiliki arti penting secara akademik dan non-akademik bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. *Pertama,* secara materi, buku yang secara khusus mengulas protes rakyat 2011 hingga kini belum ada dalam khasanah kepustakaan di tanah air. Hal itu barangkali disebabkan lantaran peristiwa itu sendiri masih terus berlangsung, dan ini menjadi kendala tersendiri bagi para ahli mengenai persoalan Dunia Arab untuk menyuguhkan buku yang mengulas tema Dunia Arab secara memadai. Kehadiran buku ini setidaknya dapat mengisi kekosongan kepustakaan tersebut.

Bagi mereka yang tengah belajar geopolitik dan geokultural Dunia Arab atau Timur Tengah, buku ini kiranya bisa menjadi bahan pelajaran yang cukup membantu untuk memberikan gambaran persoalan yang tengah dihadapi oleh sebagian negara-negara di Dunia Islam. Dan bagi mereka yang belajar mengenai bahasa atau sastra Arab, buku ini pun dapat membantu menyediakan konteks yang "segar" bagi studi itu atau studi-studi lain yang berorientasi kepada teks.

Kedua, buku ini mengulas mengenai kawasan yang memiliki pengaruh penting, secara langsung maupun tidak langsung, terhadap perkembangan sosial, politik, ekonomi, keagamaan, dan kebudayaan di tanah air. Pengetahuan mengenai kawasan itu, apalagi terhadap peristiwa yang sangat menentukan semacam ini, amat diperlukan baik bagi masyarakat maupun pemerintah Indonesia untuk membangun hubungan dan kerjasama yang lebih produktif dan bermartabat dengan masyarakat dan negara di kawasan itu. Yang lebih penting lagi adalah, adanya antisipasi masyarakat Indonesia untuk merespons dan menyikapi berbagai dampak yang mungkin timbul dari rangkaian peristiwa itu terhadap bangsa dan masyarakat Indonesia.

Ketiga, sebagai bangsa dengan mayoritas pemeluk agama Islam dan sejumlah besar (minoritas signifikan) pemeluk agama Kristen, Dunia Arab merupakan kawasan yang memiliki arti penting. Kawasan ini hampir dipastikan memiliki posisi yang amat khusus di hati sebagian besar bangsa Indonesia. Sebab agama Islam lahir dan berkembang kali pertama di kawasan itu. Yang lebih penting, hubungan keagamaan itu hingga kini juga masih terpelihara dalam kegiatan ibadah haji dan umrah yang menjadi salah satu rukun Islam, dan juga kegiatan menuntut ilmu-ilmu keislaman. Umat Kristiani tentu juga memiliki ikatan emosional yang khusus pula terhadap kawasan ini sebab agama itu juga berasal dari bagian lain di kawasan tersebut. Hubungan umat Kristen Indonesia dengan kawasan ini hingga kini juga masih terpelihara, misalnya dalam bentuk ziarah di Jalan Penyaliban Yesus, gereja Kelahiran, dan gereja al-Qiyamah.

Keempat, kawasan itu memperoleh signifikasi baru dengan eksplorasi sumber-sumber minyaknya terutama di kawasan Teluk, sebagian wilayah *Masyriq* (Arab Timur non Teluk), dan sebagian Afrika Utara. Faktor ini memperkuat arti penting kawasan ini. Semula kawasan ini hanya dipandang signifikan

dari segi geografis semata, lantaran berada di antara tiga benua besar dan memiliki jalur perairan penting seperti Jabal Thariq (Gibraltar), Terusan Suez (*qanaat Suwais*), Selat Bab al-Mandib, dan Hormuz.[2] Jadi, Dunia Arab bukan hanya signifikan dari sisi geografis dan aspek keagamaan, namun juga menjadi kawasan strategis dipandang dari sisi ekonomi, terutama dalam suplai bahan baku minyak dan investasi. Beberapa hal itulah yang kiranya menambah bobot perlunya buku ini untuk dibaca.

C. *Timeline* Peristiwa Revolusi Arab

Sebelum lebih jauh menengarai pola-pola gerakan protes rakyat di Dunia Arab, berikut ini disampaikan secara garis besar rangkaian peristiwa protes rakyat di negara-negara Arab 2010-2011. *Timeline* ini didasarkan pada sumber tertulis dan catatan pribadi yang dihimpun dari *timeline* yang sudah ada, pemberitaan televisi, dan media yang lain.[3]

- 17 Desember 2010:
  - Muhammad Bouazizi –pemuda daerah Sidi Bouazizi, **Tunisia**, berusia 26 tahun yang berprofesi sebagai pedagang sayur– membakar diri sebagai bentuk protes atas tindakan kepolisian setempat yang menyita "gerobak" sayur yang menjadi tumpuan mata pencahariannya. Nyawa pemuda itu tidak bisa diselamatkan kendati sempat dirawat di rumah sakit dan dijenguk oleh Presiden Tunisia, Zainal Abidin Ben Ali. Protes pemuda yang sesungguhnya amat "polos" dan personal itu kemudian menjadi berita besar

---

2) Ibnu Burdah, *Studi Dunia Arab*, (naskah buku: dokumen pribadi, 2011), hlm. 9-10.

3) *Timeline* dari *Middle East Institute*, situs *al-Jazeera*, *Xianghua*, harian-harian cetak di tanah air, dan situs *Wikipedia* dari berbagai entrinya merupakan bahan tertulis bagi penyusunan *timeline* sederhana ini.

di Tunisia dan mendorong terjadinya protes rakyat dalam skala massif di negeri itu, hingga kemudian menjalar ke negara-negara Arab lain.

- 18 Desember 2010:
  - Aksi Bouazizi mulai menyulut protes kecil para pemuda "penganggur" terhadap kepolisian. Protes yang semula merupakan aksi solidaritas spontan ini lambat laun membesar dan mengarah kepada pemerintah Tunisia. Presiden Tunisia Zainal Abidin Bin Ali pun kemudian menjadi musuh bersama (*common enemy*) yang menyatukan massa dalam jumlah besar. Gelombang protes kian membesar di Bouazizi dan mulai menjalar ke kota-kota lain hingga akhirnya ke Tunis, ibukota Tunisia.

- 28 Desember 2010:
  - Terinspirasi peristiwa di Tunisia, seorang warga **Aljazair** membakar diri. Meski hasilnya berbeda dengan Tunisia, namun protes rakyat di Aljazair terus berlangsung secara sporadik dan semakin kuat pada Maret 2011.

- 12 Januari 2011:
  - Gerakan protes terjadi di **Lebanon**, digalang oleh Koalisi 14 Maret pendukung Saad al-Hariri. Protes ini berlangsung cukup lama namun kemudian mereda. Sebagaimana yang terjadi di panggung politik Lebanon selama ini, kontestasi sektarian juga mewarnai protes itu. Tuntutan yang dikemukakan adalah "pelucutan senjata" Hizbullah dan reformasi sistem *konsosiasional* yang dianut politik Lebanon.

- 13 Januari 2011:
  - Presiden Tunisia, Ben Ali, memberhentikan Menteri Dalam Negeri yang dipandang bertanggung jawab atas tak

terkendalinya situasi di seluruh Tunisia. Tindakan ini kemudian disusul pembebasan para tahanan politik dan sejumlah demonstran. Pada hari yang sama, tentara yang bersikap netral terhadap rezim dan rakyat mulai turun di jalan-jalan ibukota Tunisia untuk mengontrol situasi. (Ben Ali berasal dan bertumpu kepada kepolisian dan cenderung "menganaktirikan" tentara).

- Protes di **Libya** mulai pecah dalam skala nasional yang terus berkembang dengan berbagai aksi kekerasan dari aparat dan pendukung rezim Qaddafi terhadap rakyatnya.

- 14 Januari 2011:
  - Atas desakan rakyat, Presiden Bin Ali secara mengejutkan mengumumkan pengunduran diri dari jabatan presiden yang telah digenggamnya selama 23 tahun. Ia mengasingkan diri di salah satu kota di Arab Saudi setelah ditolak di negara-negara lain. Posisi Bin Ali digantikan oleh Muhammad al-Ghonusi. Keberhasilan gerakan rakyat ini kemudian menginspirasi negara-negara Arab lainnya yang menghadapi persoalan serupa.
  - Protes rakyat mulai berlangsung di Kerajaan **Yordania**. Protes yang menuntut reformasi politik dan perbaikan ekonomi ini kemudian berhasil melengserkan pemerintahan Rifai dan seluruh jajaran kabinetnya. Namun, protes ini belum tertuju secara langsung kepada Raja Abdullah.

- 15 Januari 2011:
  - Kekacauan meluas di Tunisia dan membawa banyak korban, termasuk diakibatkan oleh lepasnya para tahanan. Tentara Tunisia mengamankan situasi di dalam negeri.

- Pemerintah Arab Saudi menetapkan beberapa syarat untuk menerima Ben Ali. Antara lain, larangan untuk tampil di media massa dan transfer kekayaannya. Pemerintah Arab Saudi tidak menginginkan keberadaan Ben Ali akan membawa masalah keamanan di dalam negerinya.
- Televisi Tunisia menyiarkan *adzan* panggilan sholat untuk kali pertama dalam sepuluh tahun terakhir.

- 17 Januari 2011:
  - Aksi membakar diri terus "menular". Ya'cub Ould Dahud, warga **Meuretania** yang mengalami nasib serupa dengan Bouazizi, juga melakukan aksi membakar diri di dekat istana kepresidenan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Di Meuritania, aksi ini menyulut protes dalam skala terbatas.
  - Protes dalam skala cukup besar menimpa negara Teluk Oman. Protes ini menyebabkan beberapa menteri dilengserkan, namun kekuasaan Sultan Qabus masih tidak tersentuh, setidaknya hingga April 2011.

- 18 Januari 2011:
  - Aksi protes dalam skala nasional pecah di **Yaman**. Kerusuhan dan kekerasan yang terjadi menyebabkan protes mengalami puncak eskalasi pada April 2011.

- 21 Januari 2011:
  - Protes dalam skala kecil terjadi secara sporadis di **Arab Saudi**, yakni di Qathif dan beberapa kota di Timur, serta di Riyadh. Raja Abdullah kemudian meluncurkan program-program kerakyatan dengan angka milyaran dolar.

- 25 Januari 2011:
  - Awal demonstrasi dalam skala besar terjadi di **Mesir** dengan tuntutan perbaikan ekonomi, penghapusan praktik korupsi dan kolusi, serta reformasi politik. Tuntutan itu berkembang hingga menuntut Mubarak dan kroninya untuk mundur dari pemerintahan. Protes dipusatkan di *maydan al-Tahrir*, Kairo. Revolusi Mesir kemudian disebut dengan Revolusi 25 Januari.

- 26 Januari 2011:
  - Aksi bunuh diri terjadi lagi di **Suriah** yang disusul gerakan protes yang hingga April 2011 semakin menguat dan merata.

- 27 Januari 2011:
  - Rezim Mesir menutup jaringan internet untuk memutus sarana penggalangan massa demonstran.
  - Awal gerakan protes di Yaman dalam skala besar. Gerakan protes dalam skala kecil dan diorganisir partai-partai oposisi sebenarnya telah berlangsung sejak akhir 2010. Jumlah pemrotes yang dipusatkan di Universitas Sana'a itu mencapai puluhan ribu orang. Mereka menuntut reformasi politik dan menolak amandemen konstitusi yang mengarah kepada jabatan presiden seumur hidup atau pewarisan.

- 28 Januari 2011:
  - Presiden Mubarak berjanji akan membentuk pemerintahan baru sebagai respons terhadap tuntutan reformasi politik.
  - Protes dalam skala sedang pecah di negara Arab Tanduk Afrika **Djibouti** yang berujung pada penangkapan beberapa pemimpin oposisi.

- 29 Januari 2011:
  - Slogan pemrotes di Yaman telah berubah menjadi *irhal*, tuntutan kepada presiden untuk mundur.
- 30 Januari 2011:
  - Amerika Serikat, yang merupakan sekutu utama Mubarak dan getol membelanya untuk menghadapi protes rakyat, mulai mengeluarkan pernyataan yang mengarah pada dukungan terhadap proses perubahan di Mesir. Melalui Menteri Luar Negerinya Hillary Clinton, Amerika Serikat menyatakan bahwa Mesir harus memulai transisi ke arah demokrasi.
  - Aksi bakar diri kembali terjadi di **Maroko** untuk memprotes keadaan terinspirasi Bouazizi di Tunisia, yang diikuti berbagai protes dalam skala kecil.
- 31 Januari 2011:
  - Pemerintahan baru Mesir (Perdana Menteri dan para Menteri) diumumkan kepada publik sekaligus diambil sumpahnya oleh Presiden Husni Mubarak.
- 1 Pebruari 2011:
  - Di tengah desakan pengunjuk rasa yang makin meluas dan intensif, Presiden Mubarak berjanji tidak akan mencalonkan diri kembali menjadi presiden Mesir untuk periode berikutnya.
- 03 Pebruari 2011:
  - Hari Kemarahan di Yaman. Protes berskala besar dipusatkan di *Maydan al-Taghyiir* (Lapangan Perubahan). Jumlah peserta diperkirakan mencapai 20.000 orang.
- 04 Pebruari 2011:
  - Demonstrasi di Mesir terus mengalami eskalasi baik dalam jumlah maupun perluasan wilayah. Aksi terjadi

di hampir seluruh kota besar di Mesir. Demonstran menyebut hari Jum'at itu sebagai *yaum al-rakhil* (hari enyah dari kekuasaan).

- 05 Pebruari 2011:
  - Sejumlah elit Partai Nasional Demokrat, partai pendukung rezim Mubarak, mengundurkan diri. Pengunduran diri itu diterima Mubarak untuk kemudian digantikan oleh tokoh-tokoh partai yang lebih reformis. Reformasi partai nampaknya merupakan salah satu upaya rezim Mubarak meredam protes yang tak terbendung.

- 06 Pebruari 2011:
  - Unjuk rasa mulai pecah di Arab Saudi secara sporadis. Unjuk rasa pertama dilakukan para istri tahanan di depan Departemen dalam Negeri di Riyadh. Mereka menuntut pembebasan suami dan anak mereka yang ditahan tanpa proses pengadilan. Pemrotes kemudian menyebut gerakan mereka sebagai Revolusi Hunain.

- 07 Pebruari 2011:
  - Wael Ghanim, direktur eksekutif *Google* untuk kawasan Timur Tengah dan salah satu ikon revolusi Mesir dibebaskan. Kehadirannya di lapangan Tahrir sehari kemudian semakin memperkuat barisan perjuangan rakyat untuk menuntut Mubarak dan kroninya mundur.

- 09 Pebruari 2011:
  - Pemogokan para pekerja di berbagai bidang terjadi di berbagai kota di Mesir.

- 10 Pebruari 2011:
  - Para pengunjuk rasa dan mata dunia tertuju ke Mesir, menunggu detik-detik pengunduran diri Mubarok. Spe-

kulasi pengunduran diri Mubarak merebak sebab salah seorang petinggi militer sebelumnya datang ke Tahrir dan menyatakan bahwa tuntutan para pengunjuk rasa segera terpenuhi. Namun hari itu pula merebak rumor bahwa Mubarak menolak mundur. Hal itu menimbulkan kemarahan yang luar biasa di kalangan pengunjuk rasa.

- ☼ Di **Irak**, negara Arab Timur, aksi protes terjadi dalam skala yang cukup luas. Seorang warga Irak juga melakukan aksi membakar diri dengan alasan persoalan ekonomi.

- 11 Pebruari 2011:
  - ☼ Muhammad Husni Mubarak akhirnya menyerah, dan melalui wakilnya, Umar Sulaiman, mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan presiden yang telah diduduikinya selama sekitar 30 tahun. Ia mengasingkan diri dari Kairo dan tinggal di Sharm al-Syeikh, salah satu kota wisata di Mesir.
  - ☼ Jatuhnya Mubarak dirayakan oleh rakyat pengunjuk rasa di berbagai negara, terutama negara-negara Arab. Di Yaman, perayaan itu menimbulkan bentrok aparat bersenjata dengan pengunjuk rasa.

- 12 Pebruari 2011:
  - ☼ Rencana demonstrasi di lapangan *Tagyiir* di Yaman berujung bentrok antara pengunjuk rasa dan pendukung Ali Abdullah Saleh. Para pengunjuk rasa memanfaatkan momentum jatuhnya Mubarak di Mesir untuk menyuarakan tuntutan kepada Presiden Saleh untuk mundur dari jabatan presiden.

- 13 Pebruari 2011:
  - ☼ Demontrasi di jalan-jalan ibukota Yaman terus berlangsung. Presiden Saleh mengajukan inisiatif dialog

dengan oposisi guna menghindari peristiwa serupa seperti di Mesir. Untuk itu, ia menunda rencana lawatannya ke Amerika Serikat.

- 14 Pebruari 2011:
  - Protes skala besar kembali pecah di Yaman. Aparat keamanan menyerang basis demonstran di Universitas Sana'a.
  - Protes mulai pecah di **Bahrain** dan mengalami eskalasi pada bulan Pebruari dan Maret. Warna Syi'ah dalam protes itu amat kuat yang kemudian mendorong GCC di bawah Arab Saudi mengirimkan pasukan ke Bahrain.
  - Pengunduran diri kabinet Salam al-Fayyad di **Palestina** diajukan kepada Presiden Abbas. Skandal "kebocoran dokumen" sangat rahasia melahirkan protes warga Palestina di Mesir. Otoritas Palestina juga akan melaksanakan pemilu secepatnya untuk merespons hal itu.
- 17 Pebruari 2011:
  - Protes kembali pecah di Arab Saudi bagian Timur yang merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk syi'ah. Demonstrasi itu dibubarkan paksa.

- 18 Pebruari 2011:
  - Protes dan kerusuhan dalam skala kecil terjadi di negara Teluk **Kuwait**. Bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa dari warga Badui dengan aparat keamanan. Emir Kuwait mengumumkan pembagian hadiah 1000 dinar Kuwait (sekitar 40 juta rupiah) kepada setiap warga disertai dengan berbagai bantuan dan insentif secara tunai.
- 20 Pebruari 2011:
  - Di Shahra' al-Gharbiyyah (Sahara Barat), negara Arab di bantaran Atlantik, juga mulai pecah protes rakyat dalam skala kecil.

- Pebruari 2011:
  - ☼ Petisi 160 tokoh Uni Emirat Arab, berisi tuntutan reformasi politik dan pembebasan tahanan. Mereka terdiri dari para akademisi dan tokoh politik.
- 21 Pebruari 2011:
  - ☼ Presiden Sudan Umar al-Basyir berjanji tidak akan mencalonkan diri lagi pada pemilu presiden tahun 2015 sebagai tanggapan atas unjuk rasa rakyat Sudan.
- 22 Pebruari 2011:
  - ☼ Sekitar 300 demonstran di Hafr Bathin, Arab Saudi, melakukan unjuk rasa. Mereka mulai menyentuh persoalan kekuasaan kerajaan. Mereka menyuarakan slogan "*laa nuriid awdata malik*" (kami tidak menginginkan Raja pulang). Raja Abdullah sebelumnya menjalani perawatan intensif terkait penyakitnya di luar negeri.
- 23 Pebruari 2011:
  - ☼ Seorang perempuan Arab Saudi, terinspirasi Bouazizi di Tunisia, membakar dirinya sebagai bentuk protes atas keadaan.
- 1 Maret 2011:
  - ☼ Rencana demonstrasi dalam skala besar pada Jumat 11 Maret mulai digalang di Arab Saudi. Nuroh Ali Saud, Pangeran Putri Saudi, mengancam akan memotong tangan mereka yang mengikuti demonstrasi. Diberitakan pula bahwa salah satu penggalang unjuk rasa diculik dan dibunuh tanpa diketahui nasibnya, hingga kini.
- 3-4 Maret 2011:
  - ☼ Demonstrasi di beberapa wilayah Timur Arab Saudi, seperti al-Qathif dan al-Awamiyyah, kembali pecah.

Mereka antara lain menuntut pembebasan tokoh agama Syi'ah Taufiq al-Amir yang ditahan oleh pihak keamanan Arab Saudi.

- 6 Maret 2011:
  - ☼ Pembebasan syekh Syi'ah Taufiq Amir.
  - ☼ Petisi "rakyat" terhadap Raja untuk melakukan reformasi di berbagai bidang.
  - ☼ Majlis Ulama Terkemuka Arab Saudi mengeluarkan fatwa haram melakukan demonstrasi menentang pemerintah.

- 15 Maret 2011:
  - ☼ Raja Bahrain Hamad bin Isa al-Khalifah menyatakan negara dalam keadaan darurat. Tentara koalisi negara-negara Teluk di bawah pimpinan Arab Saudi masuk ke wilayah Bahrain dengan tujuan untuk membantu pemerintah setempat dalam menghadapi gerakan protes rakyat yang mereka sebut sebagai "gerakan Syi'ah" atau infiltrasi Iran.

- 19 Maret 2011:
  - ☼ Pasukan sekutu yang terdiri dari Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris mulai melakukan serangan udara terhadap basis-basis militer pendukung Qaddafi baik di Tripoli, Benghazi, dan kota-kota sekitarnya. Tujuan dari serangan itu adalah melaksanakan Ketetapan DK PBB No. 1973 tentang larangan terbang di Libya.

- 22 Maret 2011:
  - ☼ Pemerintah Arab Saudi mengumumkan pelaksanaan pemilu praja akan dilaksanakan pada 22 September 2011. Hak pilih hanya diberikan kepada laki-laki.

- 25 Maret 2011:
  - ☼ Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan kekuasaan secara damai dengan beberapa syarat.

***

BAB II

Revolusi Arab: Inkubasi, Aksi, dan Kontingensi

A. Tunisia: Model Baru Gerakan di Dunia Arab

Gerakan yang muncul dan berkembang pesat di Dunia Arab pada masa kontemporer hampir pasti bermuara pada satu hal, yaitu cita-cita perubahan. Dari gerakan yang berbasis Pan Arabisme, atau Sosialis sekuler, hingga Islamis yang paling "tegas", kelahiran mereka selalu diarahkan untuk memperjuangkan perubahan tatanan politik dan sosial di negara-negara Arab. Hanya saja, gerakan-gerakan ini tidak memperoleh contoh ideal pada masa sekarang. Gerakan yang selama ini tersedia atau pernah ada tidak cukup membanggakan untuk diadopsi sebagai model gerakan.

Ada beberapa model gerakan yang pernah ada dan umumnya diajukan sebagai referensi. Model pertama adalah revolusi yang pernah menyapu hampir seluruh negara Arab pada tahun 1960-an. Negara-negara Arab Republik yang ada sekarang ini hampir seluruhnya lahir dari apa yang mereka sebut sendiri sebagai Revolusi. Sebutlah beberapa di antaranya, Revolusi

Mesir (*al-Tsaurah al-Mishriyyah*), Revolusi Rakyat Libya (*al-Tsaurah al-Jamaahiriyyah al-Libbiyyah*), Revolusi Suriah, dan sebagainya. Revolusi-revolusi yang dimaksud sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai kudeta, yaitu pengambilalihan kekuasaan politik secara paksa dari monarki-monarki Arab dengan menggunakan kekuatan militer. Termasuk di dalamnya adalah adanya sebutan Revolusi Rakyat, yang pada kenyataannya adalah kudeta militer.

Celakanya, gelombang revolusi semacam itu itu umumnya kemudian melahirkan penguasa-penguasa militer yang lebih diktaktor daripada kekuasaan monarki sebelumnya. Mereka bukan saja ingin berkuasa seumur hidup dan mewariskan kekuasaannya dengan berbagai cara, namun juga mengontrol seluruh kehidupan bangsanya dengan menggunakan kekuatan senjata. Jelas, revolusi semacam ini sulit menjadi model bagi gerakan-gerakan politik dan sosial di Dunia Arab saat ini.

Model yang kedua adalah Revolusi Iran 1979. Sebagai negara yang paling "digdaya" di Timur Tengah di masa itu dan didukung penuh oleh Amerika Serikat, Iran secara mengejutkan tumbang oleh kekuatan rakyat yang dipimpin oleh orang yang sudah sangat tua. Gerakan ini kemudian disebut dengan Revolusi Islam Iran (*al-Tsaurah al-Islamiyyah al-Iraniyyah*). Gerakan rakyat yang berbasis keagamaan ini amat inspiratif bagi perjuangan masyarakat Dunia Arab dan bahkan Dunia Islam untuk melakukan perubahan. Berbeda dengan revolusi model pertama yang cenderung sekuler dan berbasis militer, karakter revolusi ini adalah berbentuk gerakan rakyat dan berbasis keagamaan.

Hanya saja, sebagian besar masyarakat Arab menghadapi kendala psikologis untuk mengadopsi gerakan model kedua ini. Hambatan psikologis itu adalah karena, pertama, akibat dari kontestasi historis antara Arab dan Persia yang nampaknya

masih membekas kuat hingga saat ini. Sebab kedua adalah karena adanya perbedaan aliran keagamaan antara Sunni dan Syi'ah. Bagaimanapun, revolusi itu berbau ajaran Messianis-Mahdiah revolusioner yang bertentangan dengan paham kewajiban menjaga "stabilitas" yang diyakini kaum Sunni.

● *Tawaran Baru*

Tawaran baru model gerakan sosial politik justru datang dari Tunisia, negeri yang selama ini dipandang tidak berpotensi melahirkan revolusi dibandingkan negara-negara Arab yang lain. Gelombang protes rakyat sejak pertengahan Desember 2010 hingga pertengahan Januari 2011 telah menumbangkan kekuasaan sentralistik Presiden Zainal Abidin Bin Ali yang telah berkuasa selama 23 tahun, bahkan secara *de facto* lebih lama dari itu. Persoalan pengangguran, kemiskinan, korupsi, kungkungan kekuasaan dan kekuatan bersenjata (kepolisian dan intelijen), dan moral sesungguhnya telah menjadi persoalan bangsa Tunisia dalam waktu yang lama. Persoalan itu juga dialami oleh sebagian besar negara-negara Arab kecuali beberapa negara Teluk yang ekonominya diselamatkan oleh limpahan minyak.

Sebuah "*general belief*", meminjam terminologi dari Eric Hoffer, sesungguhnya telah terbentuk dalam suasana batin masyarakat Tunisia dan kebanyakan masyarakat Arab.[1)] Pikiran masyarakat Arab telah matang bahwa realitas politik dan sosial di negeri mereka sejatinya sudah jauh dari harapan. Karena itu, perubahan ke arah yang lebih baik sangat-sangat dirindukan. Pada galibnya, gerakan perubahan itu dilakukan dengan cara

---

1) Eric Hoffer, *Gerakan Massa* terj. Masri Maris dari *The True Believer* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 131-153. Lihat pula James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr, *Contending Theories of Internasional Relations* (Philadelphia, New York and Toronto: J.B. Lippincott, 1971), hlm. 236.

menentang secara "radikal" terhadap otoritas-otoritas yang berkuasa.[2)]

Dalam suasana frustasi sosial yang luas, pemicu dari gerakan dapat datang dari siapa saja. Perkara yang umumnya dipandang sangat sederhana pun bisa menjadi penyulut bara di mana-mana.[3)] Syaratnya satu saja, yakni dapat menjadi simbol bagi pahitnya keadaan dan membangkitkan perasaan bersama untuk melakukan perubahan. Muhammad Boazizi adalah hanyalah seorang pedagang sayur dan buah-buahan yang biasa berdagang di halaman masjid usai sholat ditunaikan. Dalam tradisi di Dunia Arab yang terpelihara hingga saat ini, pedagang semacam itu termasuk salah satu pekerjaan kelas paling bawah. Namun demikian, aksinya membakar diri setelah kios sayur buahnya dirampas polisi setempat telah melecutkan goresan batin masyarakat Tunisia, dan mendorong mereka untuk bergerak guna menghancurkan sumber penderitaan bersama. Tembok istana yang dijaga intelijen dan kepolisian negara pun runtuh, dan "Sang Raja" seolah "dikutuk" menjadi gelandangan yang tak berguna, bahkan sekadar untuk mencari tempat tinggal semata tetap ditolak di mana-mana. Zainal Abidin bin Ali bukan hanya tidak diterima oleh para sekutunya di Eropa, namun juga di Dunia Arab. Arab Saudi akhirnya bersedia menampungnya dengan berbagai persyaratan yang ketat.

Daya tarik gerakan rakyat Tunisia tersebut amat luar biasa bagi masyarakat Arab. Pengaruh gerakan ini secara cepat menyeberangi batas-batas negara Arab. Protes di Mesir –meskipun dalam skala yang sangat kecil– mulai muncul ke permukaan

---

2) Theodore E. Long, "A Theory of Prophetic Religion and Politics" dalam Anson Shupe dan Jeffrey K. Hadden (ed), *The Politics of Religion and Social Change* (New York: Paragon House, 1988), hlm. 3.

3) Mark. N. Hagopian, *Regimes, Movements and Ideologies: A Comparative Introduction to Political Science* (New York and London: Longman, 1978), hlm. 262-4.

dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi, dan Pemerintah Mesir pun langsung merespons gejala itu dengan melakukan konsolidasi departemen dalam negeri dan departemen pertahanan. Rakyat Yordania dan Yaman yang berada jauh di sisi Timur Dunia Arab juga bergerak. Komentar-komentar masyarakat Arab Teluk juga amat jelas menunjukkan rasa salut mereka atas keberhasilan perjuangan bangsa Tunisia. Lebih dari itu, aksi membakar diri juga dilakukan di Meuritania, al-Jazair, Mesir, dan lainnya.

Apa yang hebat dari sebutlah Revolusi Tunisia tersebut? Ada tiga hal yang khas dari gerakan itu. Pertama, gerakan itu bersifat *indigenous* Arab, gerakan yang lahir dari rahim bangsa Tunisia sendiri, dan bukan atas intervensi negara Arab besar lain ataupun kekuatan adidaya dunia. Kedua, gerakan itu berbasis rakyat bawah, bukan atas *design* elit militer atau politik. Ketiga, gerakan itu mengusung isu yang juga dihadapi oleh sebagian masyarakat Arab. Tiga hal itulah yang membedakan gerakan tersebut dari revolusi-revolusi lain yang pernah terjadi di Dunia Arab atau di kawasan Timur Tengah. Karena itu, gerakan ini nampaknya akan segera menjadi model baru bagi gerakan-gerakan perlawanan di negara-negara Arab.

- ***Problem Visi dan Kepemimpinan***

Sayang, gerakan sosial politik di Tunisia tidak memiliki kejelasan rumusan perihal tujuan gerakan dan siapa pemimpin gerakan. Gerakan itu bersifat spontan. Besarnya gerakan seolah-olah hanya sebagai akibat matangnya persepsi masyarakat mengenai keadaan dan besarnya keinginan bersama mereka untuk melakukan perubahan, namun tidak tahu jalan mana yang ditempuh. Satu-satunya yang menyatukan mereka adalah adanya musuh bersama yang dianggap sebagai sumber kepahitan yang mereka jalani yakni kekuasaan Presiden Ben Ali, keluarga, dan kroninya.

Karena itu, saya sangat meragukan keberhasilan pemerintahan baru (*al-wahdah al-wathaniyyah*; Persatuan Nasional) Tunisia dalam melembagakan hasil-hasil dari gerakan tersebut. Pembentukan pemerintahan bersama cenderung tampak sebagai sikap akomodasif terhadap berbagai faksi oposisi yang sesungguhnya sangat beragam, baik dalam hal ideologi maupun strategi perjuangannya. Sementara itu, ruh perjuangan rakyat –yaitu keadilan sosial, kemakmuran yang relatif merata, kebebasan berpendapat dan memilih, dan penghormatan terhadap agama– nampaknya tidak mudah segera memperoleh wujud di Tunisia, terkecuali hal penghormatan terhadap agama, setidaknya dalam aspek formalnya. Memang, jatuhnya rezim Ben Ali memang ditandai dengan berkumandangnya suara adzan di televisi Tunisia untuk kali pertama dalam sepuluh tahun terakhir.

***

B. Revolusi Arab Raya?

Secara mengejutkan, revolusi rakyat meledak di Tunisia, negeri kecil nan indah di wilayah Arab Barat (*magharibah*) atau Afrika Utara yang selama ini tergolong lebih stabil dibandingkan negara-negara Arab yang lain. Para pengamat selama ini memperkirakan peristiwa semacam itu akan terjadi di negara-negara Arab dengan oposisi kuat semacam Aljazair, Mesir, atau Sudan, bukan di Tunisia. Protes rakyat di berbagai belahan negeri Tunisia selama kurang dari satu bulan ternyata justru berhasil meruntuhkan kekuasaan diktaktor Ben Ali yang ditopang penuh oleh intelijen dan kepolisian.

Sebagian masyarakat Arab menyambut peristiwa itu dengan gegap gempita dan penuh suka cita. Sementara para oposisi dan para pemimpin gerakan di berbagai negara Arab memperoleh

semangat dan insiprasi baru atas cita-cita perubahan yang mereka perjuangkan selama ini namun tidak kunjung menjadi kenyataan. Mereka sangat berharap apa yang terjadi di Tunisia akan terjadi pula di negerinya.

Akankah peristiwa Tunisia menjadi gelombang besar yang mampu meruntuhkan rezim-rezim Arab yang umumnya telah berkuasa lebih dari 20 tahun? Atau sebaliknya, Revolusi Tunisia hanya akan layu dan sekadar menjadi peristiwa lokal yang tidak berpengaruh secara riil terhadap dinamika sosial politik di negeri-negeri Arab yang lain? Atau bahkan lebih dari itu, Revolusi Tunisia gagal melembagakan hasil-hasil gerakan, kemudian perkembangan negeri itu semakin tidak menentu, dan ujungnya revolusi itu sendiri justru menjadi bahan cemoohan dan contoh buruk bagi negeri Arab yang lain.

***

Perubahan yang sangat cepat sebagaimana yang terjadi di Tunisia barangkali tidak akan terjadi dengan mudah di negeri-negeri Arab yang lain. Dari perilaku para rezim yang berkuasa, sudah tampak kekhawatiran mereka yang begitu hebat. Penguasa negara-negara Arab yang merasa terancam oleh pengaruh peristiwa itu segera merespons dengan melakukan konsolidasi kekuasaan di berbagai bidang. Konsolidasi antar departemen di dalam pemerintahan terus ditingkatkan, terutama departemen keamanan pertahanan, departemen dalam negeri, dan departemen komunikasi dan informasi. Organ-organ pemerintah dan partai berkuasa didorong untuk mendekat kepada rakyat. Kerjasama antara negara-negara Arab pun banyak digelar. Gelontoron dana miliaran dolar AS dialirkan dari negara-negara Arab kaya kepada negara Arab yang kurang beruntung, atau dari pemerintah kepada rakyatnya. Tujuan dari semua itu adalah tunggal, yakni membendung menyebarnya pengaruh

virus-virus Revolusi Tunisia ke negeri Arab yang lain. Menimbang upaya-upaya serius dan sistematis para penguasa ini, aktivis revolusioner bersama masyarakat pro perubahan di negara Arab lain nampaknya tidak mudah untuk mengulang peristiwa yang serupa di Tunisia.

Gelombang aksi membakar diri dari orang-orang yang frustasi akibat persoalan ekonomi terjadi di Aljazair, Mesir, Yordania, dan lainnya. Namun ternyata hal itu tidak serta merta menyulut rangkaian protes rakyat sebagaimana yang terjadi di Tunisia. Tidak bisa dipungkiri bahwa mereka terobsesi dengan apa yang dilakukan Muhammad Boeazizi, namun pengorbanan mereka tidak membawa efek sebagaimana yang terjadi di Tunisia. Bahkan sebaliknya, ada di antara mereka yang justru dituding balik sebagai orang yang memiliki masalah kejiwaan. Hal ini bagaimanapun sedikit banyak mencerminkan kuatnya konsolidasi pemegang kekuasaan dalam menghadapi pengaruh revolusi tersebut.

Namun demikian, Revolusi Tunisia harus diakui telah menyentak kesadaran para oposan dan aktivis gerakan, bahkan masyarakat awam, di negara-negara Arab bahwa perubahan yang selama ini dianggap sebagai kemustahilan, amat mungkin untuk diwujudkan. Mereka juga mengetahui bahwa perjuangan untuk perubahan bahkan tidak memerlukan persenjataan militer sedikitpun. Berdasarkan komentar-komentar jalanan yang diliput berbagai media massa Arab, masyarakat di Dunia Arab merasa amat tergugah dengan apa yang terjadi di Tunisia. Sebagian mereka juga meyakini bahwa kompleksitas persoalan politik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Tunisia hampir sama dengan yang terjadi di negara mereka.

***

Secara geografis, Dunia Arab memang sangat luas, membentang dari bantaran Samudera Atlantik di Barat hingga Teluk Persia di Timur dan terbagi ke dalam banyak negara. Namun demikian, jarak dan batas geografis itu kini tidak lagi menjadi penghalang bagi tersebarnya pengaruh Revolusi Tunisia. Kesatuan Dunia Arab bukan hanya ditopang oleh kesatuan bahasa, kultur, dan nasib sejarah sebagaimana selama ini, namun kini juga disangga oleh kemajuan teknologi informasi dan sarana komunikasi. Jadi, dinamika sosial yang terjadi di Tunisia ataupun negara yang lain di kawasan itu dapat memberikan pengaruh secara cepat dan amat mendalam ke bagian lain di kawasan Teluk.

Jika revolusi rakyat Tunisia berhasil melembagakan hasil-hasil gerakan, menerjemahkannya ke dalam tatanan pemerintahan dan birokrasi secara baik, serta segera mewujudkan sebagian saja dari cita-cita gerakan, niscaya virus-virus revolusi itu akan terus menyebar dan membawa pengaruh yang luar biasa terhadap kehidupan sosial politik di dunia Arab. Akan tetapi, jika yang terjadi adalah sebaliknya, revolusi itu justru membawa kesengsaraan dan penderitaan yang lebih dalam. Jika hal terakhir yang terjadi, niscaya hal itu akan semakin melemahkan gerakan-gerakan revolusioner yang ada di kawasan Teluk.[4] Mental para aktivis pro perubahan tidak akan sekuat sebelumnya, apalagi jika rakyat di negerinya sudah tidak bersimpati lagi kepadanya. Bagaimanapun, masyarakat umumnya lebih memilih kehidupan yang baik ketimbang sekadar perubahan. Penguasa juga akan lebih kuat lagi mencengkeramkan kekuasaannya dengan dalih bahwa perubahan, apalagi melalui revolusi, hanya akan membawa kekacauan dan penderitaan rakyat banyak. Revolusi bukan hanya

4) Pelembagaan hasil gerakan seringkali lebih sulit daripada aksi itu sendiri sebab paska aksi *elan vital* gerakan biasanya sudah mengalami penurunan. Hoffer, *Gerakan Massa*, hlm. 147.

akan dibenci, namun justru akan menjadi musuh bersama yang harus ditumpas habis sejak dini.

Dalam beberapa dekade ke depan, politik di negara-negara Arab nampaknya masih diwarnai oleh adu kuat antara upaya penguasa mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara *vis a vis* konsolidasi gerakan-gerakan revolusioner untuk perubahan. Dalam konteks ini, perkembangan yang terjadi di Tunisia paska revolusi akan menjadi salah satu faktor yang membawa pengaruh yang menentukan.

***

C. Kontraksi Demokrasi di Dunia Arab [5)]

Barangkali sudah merupakan takdir sejarah bahwa perubahan politik di negara-negara Arab harus ditempuh melalui jalan paksa, “revolusi”. Rezim Mesir dan Tunisia tumbang setelah didesak protes rakyat secara besar-besaran.

Rakyat Yaman kini terus mendesak Presiden Ali Abdullah Saleh turun dari jabatan dengan cara yang sama. Perdana Menteri Khalifah bin Salman al-Khalifah bahkan Raja Hamad bin Isa al-Khalifah di Bahrain dan Presiden Muammar Qaddafi di Libya mengalami nasib serupa. Sementara, rezim di negara-negara Arab yang lain tengah bersiap-siap menghadapi kemungkinan meletusnya protes rakyat dalam skala besar dengan cara dan tuntutan serupa. Pada intinya, rakyat di negara-negara Arab itu menolak kekuasaan individu, pemerintahan militer dan monarki. Mereka menginginkan kedaulatan diberikan rakyat.

5) Pada beberapa dekade lalu, Abid al-Jabiriy menulis sub judul *al-Diymuqraathiyyah: al-Miilaad al-Asiir* (demokrasi: proses kelahiran yang amat sulit) dalam bukunya *Wijhatu Nadzar: Nahwa ‘Iaadati Qadhayya al-Fikr al-Arabiy al-Muashir.* Judul tulisan itu memberi inspirasi pemilihan judul di atas. Muhammad Abid al-Jabiriy, *Wijhatu Nadzar: Nahwa ‘Iaadati Qadhayya al-Fikr al-Arabiy al-Muashir, (Beirut, Marzkaz al-Diraasaat al-Wahdah al-Arabiyyah*, 2004), hlm. 118.

Rakyat ingin menentukan masa depan bangsa dan negaranya ke arah yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera bersama.

Secara kelembagaan, sebagian besar negara-negara Arab sesungguhnya telah memiliki instrumen dan simbol demokrasi, seperti partai politik, penyelenggaraan pemilihan umum, perwakilan rakyat, dan seterusnya. Akan tetapi, praktik politik di negara-negara tersebut pada kenyataannya amat jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dari 23 negara Arab di kawasan itu (dengan asumsi termasuk Djiboti dan Palestina), hanya Lebanon, Irak, dan Palestina yang cukup memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan aspirasi, itu pun dengan sejumlah catatan. Di Lebanon, sebagian kebebasan rakyat telah "dibajak" oleh para elite kelompok politik dengan sistem konsosiasional (*sharing* kekuasaan antar kelompok). Di Irak, kekerasan sektarian masih menjadi bagian dari proses politik di sana. Di Palestina, demokrasi yang mulai tumbuh secara sehat telah dibunuh oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Israel, dan negara-negara Arab pro-Barat termasuk Mesir di bawah Mubarak.

Di negara-negara Teluk juga mulai ada lembaga perwakilan rakyat, seperti di Bahrain dan Kuwait. Akan tetapi, lembaga itu bukan representasi rakyat yang sesungguhnya sebab sebagian besar yang memilih mereka bukanlah rakyat, melainkan raja atau kerajaan. Sebagian besar negara yang berbentuk republik juga telah mengenalkan sistem multi partai, termasuk Tunisia, Aljazair, Sudan, dan Mesir ketika dipimpin Mubarak. Namun pada saat yang sama, partai-partai politik itu dibonsai sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk berkembang, apalagi berkompetisi dengan partai yang berkuasa. Sebagian negara juga mengenalkan pemilihan presiden secara langsung, namun kandidat presidennya selalu tunggal. Pemilih hanya menentukan *na'am* atau *laa* (iya atau tidak). Pada 2005, Mesir

telah memperkenankan adanya calon lebih dari satu, kendati pada praktiknya hal itu juga diberi pembatasan dengan beragam cara. Ayman Nur (calon kuat presiden Mesir paska Mubarak) yang menjadi pesaing Mubarak di kala pemilihan presiden, akhirnya juga dipenjarakan dengan alasan yang mengada-ada.

D. Reformasi Terlambat

Sudah lama, tekanan internal dan internasional sesungguhnya cukup kencang menyerukan reformasi politik kepada rezim-rezim negara Arab. Bahkan kalangan ilmuwan beberapa dekade lalu telah banyak mengingatkan bahwa demokratisasi merupakan kebutuhan yang amat mendesak di dunia Arab. Menurut al-Jabiriy, kebebasan berpikir, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan memilih, atau mendirikan partai sudah menjadi *ijma'* (kesepakatan) masyarakat Arab sejak beberapa dekade lalu.[6] Namun demikian, kekuasaan nampaknya telah membuat lupa diri. Di negara-negara Arab berbentuk republik, penguasa yang ditopang militer menjalankan kekuasaannya secara represif. Tuntutan akan perubahan tatanan dan praktik politik secara lebih demokratis ditanggapi dengan sangat dingin. Selama ini mereka bahkan melakukan represi secara lebih keras untuk membungkam tuntutan itu.

Kini, semua rezim Arab yang masih *survive* seperti berlomba menawarkan paket-paket reformasi dan program kerakyatan yang barangkali tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Paket program itu meliputi reformasi jangka panjang hingga yang yang *cash*, dari yang sistematis hingga yang terdengar "lucu". Mereka juga mengumbar janji-janji besar untuk rakyatnya.

Tetapi semua itu nampaknya sudah terlambat. Rakyat Arab dengan mudah dapat menebak bahwa reformasi mendadak itu tidak lain adalah potret kepanikan penguasa. Tujuannya jelas,

6) al-Jabiriy, *Wijhatu Nadzar*, hlm. 111.

yaitu mempertahankan kekuasaan dan meredam kemungkinan pecahnya gerakan protes dalam skala besar.

Para penguasa itu lupa bahwa dulu mereka umumnya berasal dari rakyat kecil dari kampung-kampung Arab yang mengalami tekanan hidup,[7] lantas melakukan urbanisasi ke kota, masuk ke dalam gerakan revolusioner yang bertumbuh kuat akibat kemiskinan, dan berhasil menjadi pemimpin militer, lantas melakukan kudeta terhadap monarki.[8] Mereka berhasil dan kemudian berkuasa, tidak mau berhenti. Kalaupun usia sudah tidak memungkinkan, maka proses "pewarisan" dipersiapkan meski harus mengubah konstitusi.

Di negara-negara Teluk, kemakmuran yang bersumber dari limpahan minyak sungguh luar biasa. Padang pasir seolah disulap menjadi kota-kota termegah di dunia. Bukan hanya infrastruktur yang hebat, aneka fasilitas rekreatif termegah di dunia juga tersedia. Dari sisi mental, kondisi ini membuat para penguasa memiliki kepercayaan yang sangat tinggi, bahkan berlebih, baik dalam memandang dirinya maupun orang lain.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan Teluk memang jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara Arab lain. Namun demikian, masyarakat di sana menjadi sangat-sangat lemah. Bukan hanya pilar demokrasi dan masyarakat –seperti media dan organisasi masyarakat– yang dimandulkan oleh penguasa, bahkan agama pun mengalami nasib serupa.

---

7) Kecenderungan itu menimpa masyarakat desa di negara-negara Arab terutama pada masa 1940 hingga 1960 an akibat semakin berkurangnya lahan pertanian di desa dan menguatnya daya tarik kota. Itu pula yang menyediakan matangnya kondisi sosial yang melahirkan revolusi militer tahun 1952 hingga 1969. Dr. Muhammad Ali Muqallad, *Qadhaya Hadhariyyah Arabiyyah Muashirah*, (Beirut: Dar al-Manhil, 2003), hlm. 47-9.

8) Para pemimpin revolusiner di negara-negara Arab memiliki kemiripan latar belakang seperti itu baik Qaddafi, Mubarak, maupun Saddam Hussein. Lihat Ibnu Burdah, "Nalar Pan-Arabisme dan Perilaku Politik Saddam", *Thaqafiyyat*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2006.

Bagaimanapun, kebutuhan manusia bukan hanya bersifat materi. Pengakuan, kebebasan berpendapat, dan menyalurkan aspirasi menjadi barang amat mahal di negara-negara Teluk, hingga saat ini. Perubahan kecil yang dilakukan selama ini sedikit sekali pengaruhnya terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar itu.

● *Revolusi Jalan Terakhir*

Represi dan kungkungan dalam waktu yang amat panjang menciptakan timbunan kebencian dalam suasana batin masyarakat Arab.[9] Kepongahan penguasa, keluarga, dan kroninya menambah mendalam kebencian itu. Kemunafikan –di dalam tembok istana ada kebebasan seluas-luasnya sementara masyarakat awam diberlakukan hukum agama yang teramat ketat– membuat mereka semakin muak.

Apalagi sejak tahun 1995, harga-harga kebutuhan pokok di negara-negara Arab melonjak tinggi sementara subsidi terus dikurangi. "Kelaparan" dan keterkungkungan telah melahirkan kekecewaan yang mendalam dikalangan rakyat.

Saluran dari berbagai kekecewaan itu hampir tidak ada. Masyarakat Arab pun tidak ada pilihan kecuali "lari" ke dunia mimpi meninggalkan kenyataan. Mereka merindukan pahlawan. Siapapun yang berani melawan kekuasaan menjadi pahlawan. Dulu, Saddam Hussein seburuk apa pun perilaku dia saat memegang kekuasaan disebut-sebut sebagai pahlawan Arab, sebab berani melawan Amerika. Diam-diam masyarakat Arab juga mengagumi Hizbullah, Iran, dan Hamas, meskipun mereka tidak mengakui kecenderungan itu sebab dua yang pertama berbeda sekte keagamaan. Pemimpin yang mereka rindu-

---

9) Menurut Matuli, praktik otoritarianisme semacam itu sesungguhnya telah berlangsung sejak awal masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus sekitar tahun 661 M. Abdul Hamid Matuli, *Azmah al-Fikr al-Siyasiy al-Islaamiy Fii 'Ashr al-Hadist*, (Alexandria: al-Ma'arif, tahun tidak disebutkan), hlm. 44.

kan membawa perubahan dan sesuai dengan harapan faktanya tidak kunjung datang.

Hawa baru dari Mesir dan Tunisia serta yang sedang melanda hampir seluruh negara Arab membawa energi berlipat ganda bagi rakyat Arab untuk melakukan perubahan. Perubahan tidak mesti menunggu pemimpin, namun rakyat sendiri yang harus melakukannya. Pengalaman Mesir dan Tunisia telah mendobrak tembok psikologis bangsa-bangsa Arab untuk melakukan perubahan. Pengalaman baru ini telah dan sedang menjadi inspirasi yang berharga bagi sebagian masyarakat Arab yang telah memendam kekecewaan amat panjang namun tak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, penularan (*contingency*) bibit-bibit protes, dalam terminologi gerakan sosial, berjalan sangat cepat dan dalam. Hal itu disebabkan tidak ada jalan lain untuk melakukan perubahan kecuali melalui unjuk kekuatan rakyat, REVOLUSI.

***

E. Survival Rezim-Rezim Arab

Jika rezim Mubarak di Mesir saja jatuh, rezim Arab mana yang akan mampu menahan badai revolusi yang berhembus kencang dari Tunisia itu? Rezim Mubarak dikenal sangat kuat baik di dalam negeri, di kancah kawasan, maupun di fora internasional. Mubarak juga dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan punya nyali.

Salah satu tesis dari penyebab revolusi adalah kemiskinan. Jika itu yang digunakan maka negara-negara teluk *petrodollar* seperti Keemiran Kuwait, Kerajaan Bahrain, Keemiran Qatar, Uni Emirat Arab, Kerajaan Arab Saudi, dan Kesultanan Oman, akan selamat dari gulungan badai ini.[10] Jumlah penduduk yang

---

10) Lihat pembagian Dunia Arab menjadi empat wilayah geokultural dengan berbagai karakternya yang menjadi dasar ulasan artikel ini dalam Ibnu Burdah,

kecil dan penghasilan minyak yang besar, membuat perkapita penduduk negara-negara itu sangat tinggi, bahkan beberapa kali lipat dari pendapatan perkapita rakyat Tunisia dan Mesir.

Namun, Oman, Kuwait, Arab Saudi, dan Bahrain telah terjangkit virus revolusi itu. Padahal, beberapa negeri itu dipandang sebagai yang paling mapan dan stabil di teluk Persia. Kecemasan luar biasa yang ditunjukkan oleh para penguasa Arab Saudi juga mencerminkan adanya ancaman yang besar terhadap *survival* mereka. Akan tetapi, jika revolusi juga bisa lahir karena represi yang begitu kuat terhadap kebebasan warganya maka enam negara itu justru yang paling potensial menghadapi masalah serius.

Negara-negara Arab *maghrib* seperti Libya, Aljazair, dan Meuritania merupakan negara yang paling rawan menjadi tempat pecahnya revolusi paska Tunisia dan Mesir. Bahkan rezim Raja Muhammad VI di Maroko yang dikenal berwibawa juga tidak lepas dari ancaman ini.

Libya barangkali di urutan terdepan. Rezim Muammar Qaddafi telah berkuasa sejak tahun 1969, jauh lebih lama daripada Mubarak dan Ben Ali. Posisi geografis dan kultural negeri ini juga berada di dekat baik dengan Mesir maupun Tunisia. Rezim ini sekalipun keras namun dikenal lemah baik dalam konsolidasi dalam negeri, kerjasama kawasan, maupun dalam pergaulan internasional. Faktor penting lain adalah keangkuhan sang penguasa dan dukungannya terhadap Ben Ali dan Mubarak untuk tidak mengikuti tuntutan rakyatnya. Hal itu bisa memancing semangat rakyatnya untuk melakukan hal yang serupa dengan di Mesir dan Tunisia.

Studi Dunia Arab, (naskah buku: dokumen pribadi, 2011), hlm. 10, atau Musthofa al-Faki, *al-Arab: Al-Aslu wa al-Shuurah*, (Mesir, Dar al-Syuruq, 2002), hlm. 84-85.

Meuritania dan Aljazair jelas sedang terjangkit virus revolusi ini. Aksi membakar diri sebagai protes atas kondisi ekonomi sudah terjadi, dan secara terbatas telah menyulut protes-protes jalanan di dua negeri itu hingga saat ini.

Negara-negara Arab aliran sungai Nil dan Tanduk Afrika jelas menghadapi hal yang sama. Sudan (Utara) berada di urutan pertama. Kekalahan dalam referendum jelas membuat legitimasi rezim al-Bashir semakin lemah. Sumber minyak yang semula menjadi penopang pembangunannya sebentar lagi menjadi milik negara lain. Pendukung utamanya, Mubarak, sudah tidak mampu bertahan, tidak mungkin membantunya. Sementara dunia internasional jelas berhadapan dengannya. Negara lainnya yaitu Somalia, Djibouti, dan Comoros juga merupakan negara dengan ekonomi sangat memprihatinkan dan potensi konfliknya sangat besar.

Bagaimana dengan rezim-rezim Arab Timur (*masyriq*)? Suriah adalah negara yang mirip dengan Mesir, namun rezim dan kepemimpinan Basyar Asad di kenal lemah. Oposisi di negeri itu juga kuat. Selain masalah ekonomi, kemiskinan, dan tingginya pengangguran, Suriah juga dalam posisi yang tidak mudah dalam pergaulan internasional dan kawasan. Kerajaan Yordania jelas sudah merasakan sebagian proses terjadinya revolusi. Protes terhadap tingginya pengangguran dan kemiskinan telah menghempaskan salah satu pemimpin negeri itu, kendati Raja Abdullah II penguasa tertinggi belum tersentuh hingga sekarang.

Palestina, dengan asumsi sudah menjadi negara dan dikuasai oleh Fatah, juga sedang meradang. Protes rakyat sangat mungkin meletus di negeri itu. Bukan hanya karena perpecahan faksi, masalah himpitan ekonomi, dan kualitas hidup yang sangat rendah, namun para penguasa Fatah juga tengah menjadi sasaran kemarahan rakyat dengan terbongkarnya skandal

"kebohongan penguasa". Para petinggi Fatah bukan hanya berbohong tentang hasil-hasil pembangunan, namun melalui skandal itu juga telah menjual rakyat dan masa depan Palestina dengan harga yang paling murah.

Irak dan Lebanon adalah dua negeri yang beberapa tahun ini selalu bergejolak. Irak diwarnai rangkaian aksi kekerasan akibat perang saudara dan pendudukan Amerika Serikat. Sedangkan Lebanon seringkali diwarnai krisis politik akibat ulah para elit dan sistem konsosional yang memang "rawan" bagi bubarnya pemerintahan. Namun kedua negeri ini, harus diakui, merupakan negara Arab yang paling demokratis, setidaknya untuk saat ini. Kesejahteraan rakyat kedua negara memang masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara Teluk, akan tetapi aspirasi politik masyarakat relatif lebih tersalurkan.

Hal yang membedakan dua negara itu dari semua negara Arab adalah keberhasilan suksesi kepemimpinan tanpa melalui pertumpahan darah. Suksesi benar-benar terjadi, bukan melalui pewarisan atau pelimpahan kekuasaan saja karena penguasa lama sudah tidak memungkinkan untuk berkuasa lagi. Suksesi bahkan telah terjadi beberapa kali di dua negara itu, dan mereka mampu melewatinya tanpa menggunakan kekuatan senjata. Rezim kedua negara inilah yang nampaknya tidak akan tergerus gelombang revolusi rakyat kali ini. Praktik politik di negeri itu telah memperlihatkan kemampuan melakukan pergantian rezim melalui proses politik yang sistemik, kendati seringkali sangat menegangkan.

***

F. Pergolakan Dunia Arab, Kapan Berakhir?

Pergolakan akibat tuntutan rakyat untuk perubahan terus menjalar ke berbagai negara Arab. Setelah rezim Tunisia dan

Mesir Tumbang, kini Yaman, Libya, Bahrain, Suriah, dan Yordania bergolak hebat. Di Aljazair, Maroko, Meuritania, Sudan, Djibouti, Irak, Oman, bahkan Arab Saudi sudah pecah gerakan protes yang sama kendati dalam skala yang lebih kecil.

Pergolakan telah berlangsung lebih dari empat bulan (dimulai 18 Desember 2010 di Tunisia), dan setiap pergolakan, yang dilakukan secara damai sekalipun, selalu meminta korban. Revolusi Mesir dan Libya telah menelan korban ribuan nyawa, puluhan ribu orang terluka, dan berbagai kerugian lain yang menyertainya. Libya yang sudah bersimbah darah terjebak dalam perang saudara dan intervensi asing yang meminta korban yang besar pula. Sedangkan korban meninggal dan luka-luka di Bahrain, Yaman, dan Suriah terus bertambah secara signifikan.

Sampai kapan pergolakan "berdarah" di Timur Tengah ini akan terus berlangsung? Sampai kapan masyarakat yang tidak berdosa akan menjadi tumbal dari proses perubahan itu? Haruskah perubahan itu dibayar dengan harga yang amat mahal; nyawa, luka, dan penurunan kualitas hidup hingga titik yang parah? Mengapa perubahan di negara-negara tersebut mesti dilakukan melalui cara yang "mengerikan" seperti itu?

- ***Egoisme Penguasa***

Tuntutan rakyat di negara-negara Arab membawa pesan yang jelas, yaitu perubahan secara fundamental terhadap kekuasaan dan mengembalikan kekuasaan itu kepada suara rakyat. Tuntutan itu secara terbatas sesungguhnya telah ada jauh-jauh hari sebelumnya baik dari aktivis HAM, aktivis demokrasi, suara oposisi yang sebagian besar di luar negeri, bahkan dari sebagian lingkaran kekuasaan sendiri.

Saya yakin para penguasa di negara-negara Arab cukup mampu menangkap pesan perubahan itu. Saya juga yakin bahwa mereka mengetahui apa yang seharusnya dilakukan

untuk memenuhi tuntutan itu. Namun nampaknya mereka enggan untuk mendengarnya, apalagi melaksanakannya.

Dulu, ketika kesempatan masih ada, para penguasa itu tidak melakukan perubahan yang berarti, setidaknya untuk sekadar membatasi diri. Mereka angkuh dengan kekuasaannya. Mereka menolak membatasi kekuasaan dan keistimewaan yang sudah dinikmatinya selama puluhan tahun, bahkan turun temurun.

Egoisme dan keserakahan membuat mereka tidak mau berhenti atau membatasi diri. Yang terpenting bagi mereka adalah sedapat mungkin mempertahankan kekuasaan. Sedikit program perubahan yang pernah dilakukan oleh sebagian dari mereka hampir-hampir hanya formalitas belaka.

Jika saja para penguasa otoriter kala itu secara sungguh-sungguh mau mendengar harapan rakyatnya dan secara sungguh-sungguh pula segera melaksanakan perubahan secara serius niscaya tidak ada kondisi yang memungkinkan lahirnya bibit-bibit gerakan protes rakyat seperti sekarang ini. Jika itu dilaksanakan dengan baik jauh-jauh hari sebelum kemarahan rakyat menggumpal menjadi tuntutan revolusi, niscaya "pemaksaan" perubahan melalui revolusi tidak terjadi.

• *Padamnya Api Revolusi*

Keserakahan satu atau dua orang harus dibayar dengan ongkos yang amat mahal. Ngototnya penguasa untuk tetap mempertahankan kekuasaannya padahal rakyat sudah memintanya kembali hanya melahirkan pergolakan yang jelas akan menelan tidak sedikit korban. Bukan hanya jiwa, raga, dan harta benda, namun juga masa depan dan kebersamaan mereka terancam.

Revolusi tidak mungkin gratis. Tuntutan perubahan secara fundamental itu hanya terjadi jika pemegang kekuasaan menolak melepaskan atau membatasi diri atas kekuasaannya. Revolusi

terhadap kekuasaan pada hakikatnya adalah pemaksaan perubahan terkait dengan orang yang berkuasa. Memaksa orang yang memiliki kekuasaan politik, organ militer yang patuh, sumber daya ekonomi yang melimpah, dan mengontrol berbagai lini kehidupan bangsa, bukanlah perkara yang mudah.

Tindakan penguasa sebagai reaksi terhadap tuntutan rakyat dapat menimbulkan hal destruktif dengan skala massif sebagaimana terjadi di Libya. Penolakannya atau bahkan keengganannya saja atas tuntutan rakyat dapat berarti konfrontasi antara organ-organ kekuasaannya melawan rakyatnya sendiri, seperti yang terjadi di Bahrain, Yaman, dan Mesir. Apalagi, jika sang penguasa berkeinginan memadamkan tuntutan perubahan itu dengan segala cara, maka sulit membayangkan apa yang terjadi.

Penguasa yang melawan kehendak rakyaknya cepat atau lambat pasti akan jatuh. Satu-satunya jalan untuk menghentikan badai revolusi itu adalah memenuhi tuntutan rakyat. Atau, badai revolusi itu akan berhenti dengan sendirinya setelah melibas habis para penguasa yang melawannya.

***

G. Islam, Kabilah, dan Kekuasaan

Sejarah mencatat bahwa hubungan antar kabilah (klan/suku) di jazirah Arab hampir selalu diwarnai ketegangan, kontestasi, konflik, dan perang. Politik negara yang diformat oleh konstelasi kabilah hampir selalu berujung pada otoritarianisme yang mendatangkan permusuhan, kendati menurut Ibnu Khaldun pada masa awalnya ditandai dengan "partisipasi aktif" dari rakyatnya (*al-Musaahamah wa al-Musyarakah*) atau disebut al-Jabiri sebagai *tribal democracy* (*al-diymuqrathiyyah al-qabaliyyah*).[11] Sejarah mencatat pula bahwa Islam adalah satu-

11) Muhammad Abid al-Jabiri, *Fikr Ibnu Khaldun: Al-Ashabiyyah wa al-Dawlah: Maalim Nadzariyyah Khalduniyyah Fi al-Taarikh al-Islamiy*, (Beirut: Markaz al-Diraasaat al-Wahdah al-Arabiyyah, 1994), hlm. 222-5.

satunya faktor yang benar-benar pernah menyatukan berbagai kabilah yang ada di kawasan tersebut.[12]

• *Konsep Ummah*

Bangsa Arab pra-Islam tidak mengenal loyalitas yang lebih tinggi di atas suku. Suku merupakan unit sosial, politik, kebudayaan, bahkan "agama" yang tertinggi. Di dalam suku ada ketaatan dan perdamaian, namun di luar itu tidak ada ikatan apapun dengan yang lain kecuali sukunya memiliki ikatan tertentu dengan mereka.

Karena itu, ketika Islam menawarkan gagasan mengenai *ummah,* mereka seolah-olah terhentak hebat. Konsep itu bukan hanya merupakan ikatan baru yang jauh melampaui ikatan dan batas suku, namun watak dasar ikatan itu juga amat berbeda dengan karakter ikatan suku. Jika suku menyatukan anggotanya dengan garis darah, maka *ummah* menyatukan anggotanya dengan gagasan mengenai Yang Maha Kuasa dan tanggung jawab bersama sebagai manusia. Jika suku memiliki karakter dasar untuk merebut, mengalahkan, dan bahkan menghancurkan, maka ikatan itu bergerak sebaliknya; menyatu, menopang, dan membangun.

Inilah sesungguhnya ruh dasar sejarah Islam yang pernah mengubah perjalanan kawasan tersebut. Dihuni oleh suku-suku yang saling berperang, kawasan Arabia sama sekali tidak diperhitungkan oleh aktor sejarah mana pun di dunia saat itu. Konsep ummah telah mengubah secara mendasar jalan sejarah kawasan tersebut.[13] Islam dengan konsep ummahnya bukan hanya telah mendorong persatuan jazirah Arab dan mengikatnya dengan ikatan yang kuat dan dalam, namun juga

12) John L. Esposito, 1998, *Islam and Politics,* (USA: Syracuse University, 1998), hlm. 3-5.

13) John L. Esposito, Political Islam?

mendorong kawasan itu dan sekitarnya untuk mengkreasikan peradaban yang berguna bagi manusia sepanjang zaman.

Kegemilangan sejarah Islam dan kontribusinya yang amat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan masyarakat dan budaya, serta nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban, tidak terlepas dari perubahan ikatan itu.

● *Kekuasaan*

Hingga titik itu, Islam telah berhasil menekan fanatisme kesukuan sedemikian rupa hingga titik yang paling rendah. Namun harus diingat bahwa fanatisme itu tidak sepenuhnya hilang. Ia masih hidup dalam sanubari masyarakat Arab, bahkan hingga sekarang.

Hilangnya sang panutan merupakan faktor penting yang lambat laun melemahkan ikatan *ummah*. Namun, faktor itu tidak sendiri. Faktor penting lain adalah ambisi terhadap kekuasaan. Dua hal inilah yang kemudian secara perlahan menguatkan kembali fanatisme kesukuan sekaligus melemahkan ikatan *ummah*, serta mendorong semangat tribal itu muncul kembali ke permukaan sejarah Islam. Menurut Ibnu Khaldun, inti dari semangat tribalisme adalah pengorbanan dan kesetiaan terhadap kabilahnya, baik ia "benar" atau "salah".[14]

Namun penampilan kembali fanatisme suku itu mengambil bentuk yang sedikit berbeda sebab Islam setidaknya telah menjadi bahasa bersama. Dalam perebutan kekuasaan antar suku yang kembali mewarnai lembaran sejarah Islam, sebagian mengambil bentuk konflik antar aliran keagamaan (sekte), dan sebagian yang lain mengambil bentuk konflik kelompok politik berdasarkan garis darah.

---

14) al-Jabiri, *Fikr Ibnu Khaldun: Al-Ashabiyyah*, hlm. 222.

Tidak jarang, bahasa yang digunakan setiap pihak yang berlawanan sama-sama menggunakan Islam padahal spirit mereka sama sekali jauh dari spirit *ummah* yang diletakkan nabi pada awal Islam. Semangat yang mendorong mereka sesungguhnya adalah ikatan kabilah dan pengejaran kekuasaan. Secara sederhana, itulah yang mendorong melemahnya vitalitas ikatan *ummah* di kalangan umat islam, sekaligus menghancurkan umat Islam dari dalam.

- ***Praksis Sekarang***

Inilah sesungguhnya yang sedang terjadi pada umat Islam sekarang, khususnya di dunia Arab yang sedang dilanda protes rakyat untuk perubahan. Kabilah dan kekuasaan merupakan ikatan dan faktor terpenting yang mendorong mereka, namun mereka sama-sama berbaju Islam. Di Libya, pihak-pihak yang bertikai sama-sama menggunakan Islam. Qaddafi dengan kabilah Qaddafanya di Libya Barat menggunakan bahasa Islam "sosialis", sedangkan kabilah-kabilah yang menjadi lawannya di Timur menggunakan bahasa Islam "Sanusiyah".

Di Bahrain, kabilah Ali Khalifah berupaya mempertahankan kekuasaan dan dominasi di segala bidang. Untuk menyingkirkan kabilah-kabilah pesaingnya mereka bukan hanya melakukan diskriminasi sistematis, namun juga tega mendatangkan angkatan bersenjata Amerika Serikat untuk menghadapi saudaranya sendiri. Di Yaman, Oman, Arab Saudi dan beberapa negara lain yang tengah bergolak juga demikian. Persamaan lain di antara mereka adalah sama-sama menggunakan Islam sebagai bahasa dan senjata, tetapi sama sekali tanpa makna.

***

BAB III

Revolusi Rakyat Mesir

A. Mesir Menuju Perubahan

Sejarah mencatat bahwa Mesir merupakan sentrum berbagai gerakan revolusiner di Timur Tengah. Tidak sedikit gerakan yang berbasis ideologi Islamis, Nasseris, Pan-Arabisme, hingga Sosialis yang memiliki pengaruh besar di Timur Tengah dan Dunia Islam, berasal dari negeri ini. Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa rezim militer yang berkuasa di Mesir sejak 1952 selalu mampu bertahan dari tekanan gerakan-gerakan revolusiner itu. Pemerintahan Presiden Mubarak juga mampu mempertahankan kekuasaanya selama tiga dekade.

Apa yang membuat pemerintahan ini mampu bertahan sedemikian lama padahal gerakan di Mesir dikenal sebagai oposisi yang sangat kuat? Dan seberapa kuat rezim ini menahan badai dari Tunisia yang mengguncang kehidupan sosial politik negeri itu?

● *Kebijakan Populer*

Kunci keberhasilan pemerintahan Mubarak selama kekuasaannya terletak pada kebijakan populernya di bidang pangan,

kesehatan, dan pendidikan. Kendati pertumbuhan ekonomi negara itu biasa-biasa saja, namun biaya hidup tingkat sederhana amat murah. Pengalaman penulis tinggal di ibukota negara itu menunjukkan bahwa biaya hidup di sana, pangan dan kesehatan, lebih murah apabila dibandingkan dengan kota-kota kecil di Indonesia. Demikian pula dengan kebijakan di bidang pendidikan.

Inilah faktor terpenting yang membuat gerakan perubahan di negeri piramid itu seolah-olah menjadi mandul. Rakyat yang tidak terlalu kelaparan membuat tiadanya kondisi yang subur untuk berkembangnya gerakan perubahan. Represi militer terhadap aktivis-aktivis revolusioner yang lebih keras daripada di Tunisia selama ini tidak kunjung menyulut protes besar. Bukan hanya mampu membendung tekanan, Mesir selama ini dipandang salah satu negara Arab yang aman dan stabil.

Keberhasilan pembangunan industri pariwisata mendulang pendapatan terbesar negeri ini. Negeri yang mengklaim telah mengukir peradaban lebih dari lima ribu tahun lalu ini memang amat kaya dengan peninggalan-peninggalan peradaban kuno. Satu contoh kecil adalah jasad Fir'aun yang disebutkan al-Qur'an dan kitab-kitab suci lain (*Pharaoh II/Fir'aunah al-Tsani*). Satu jasad mumi itu saja diperkirakan mendatangkan uang tidak kurang dari Rp 40 juta dalam sehari. Padahal jumlah mumi di Mesir ribuan, dan sebagian besar lebih tua dari usia Fir'aun yang berusia hanya sekitar 3200 tahun.

Di samping sektor wisata dan berbagai jasa ikutannya, Mesir juga cukup berhasil menjaga keseimbangan perkembangan pertanian, terutama di sepanjang bantaran Sungai Nil, dan industri modernnya. Patut dicatat di sini adalah kepemilikan Mesir atas akses Terusan Suez, yang menghubungkan laut Merah dan Laut Tengah, menghasilkan pendapatan trilyunan rupiah setiap tahunnya.

Pendapatan dari sumber-sumber itulah yang digunakan untuk menutup semua kebutuhan subsidi untuk bidang-bidang vital di atas. Oleh karena itu, *image* tentang keamanan dan stabilitas negara itu terutama di mata internasional merupakan modal yang sangat penting. Gangguan sekecil apa pun terhadap stabilitas, termasuk dari gerakan revolusioner, harus ditutup rapat-rapat sehingga tidak mengancam sektor pariwisata dan sumber pendapatan lainnya. Dari sinilah kemudian kontrol terhadap gerakan perubahan yang dijalankan secara represif memperoleh justifikasinya.

- ***Media Telekomunikasi dan Teknologi Informasi***

Sebagaimana di negeri Arab yang lain, Mesir juga dilanda protes besar-besaran di berbagai kota pentingnya, seperti Kairo, Alexandria (*al-Iskandariyyah*) di pesisir Utara, al-Manshurah, dan beberapa kota lainnya. Pecahnya protes ini tidak terlepas dari pengaruh hawa panas revolusi rakyat Tunisia, di Barat negeri itu.

Model protes dan perlawanan yang meledak saat ini memiliki banyak kesamaan dengan revolusi Tunisia. Mereka tidak lagi mengusung slogan-slogan ideologis semacam *al-Islam huwa al-Hill* (Islam adalah Solusi) sebagaimana yang mereka dengungkan selama ini. Gerakan Kifayah (Sudahlah/Cukup sampai di sini) atau disebut pula *al-harakah al-mishriyyah li ajl al-taghyiir* (Gerakan Perubahan Mesir), salah satu penggerak protes, merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat. Mereka tidak mengangkat slogan-slogan ideologi baik Nasseris maupun Islamis sekalipun sebagian mereka bisa jadi penganut ideologi itu.[1] Hal yang menyatukan mereka selama

1) Rumusan ideologi pada galibnya jauh lebih dahulu daripada gerakan. Lihat Hagopian, *Regimes, Movements*. hlm. 392-394. Ideologi juga bermuara kepada pemikiran tokoh-tokoh sentral yang mendahului gerakan. Lihat Robert F.

ini adalah musuh bersama dan cita-cita perubahan. Ke mana arah perubahan yang dituju nampaknya akan menjadi persoalan berikutnya jika mereka berhasil meruntuhkan rezim yang berkuasa.

Kemiripan lainnya adalah protes digalang oleh para pemuda melalui teknologi informasi dan sarana komunikasi. Gerakan Pemuda 06 April merupakan komunitas "dunia maya" yang mensponsori debat-debat secara *online* mengenai isu-isu sensitif di negara Mesir dalam beberapa tahun ini. Diskusi mengenai suksesi kepemimpinan dan represi pemerintahan Mubarak dilarang keras di negeri tersebut, namun teknologi informasi membuat rezim Mubarok tidak berdaya mengontrol penyebaran gagasan-gagasan revolusioner itu terutama di kalangan anak-anak muda.

Kini, dua gerakan itu memperoleh momentum yang luar biasa. Revolusi Tunisia bukan hanya menjadi inspirasi dan kekuatan baru bagi gerakan-gerakan perubahan itu, namun juga menimbulkan kepanikan hebat di kalangan penguasa. Adu kuat antara rezim yang akan mempertahankan *survival*nya dengan berbagai cara *vis-a-vis* gerakan revolusioner yang tengah bersemangat mendesakkan perubahan nampaknya akan membawa negeri itu kepada kondisi yang mengkhawatirkan. Militer yang selama ini menjadi pilar rezim, di samping partai *al-Dimuqrathiyyah al-Wathaniyyah*, akan menjadi penentu penting bagi perkembangan selanjutnya di negeri Afrika sekaligus Asia itu.

• *Sentrum Dunia Arab dan Afrika*

Apa yang terjadi dan berkembang di negeri yang menyebut dirinya dengan induk dunia (*ummu al-dunya*) ini selalu menarik

Bandle, *The Origins of Peace: A Study of Peacemaking and the Structure of Peace Sttlemet* (New York: The Free Press, 1973), hlm. 10.

dicermati. Negeri ini bukan hanya menjadi sentrum pemikiran dan gerakan di kawasan itu, namun juga peranan negara ini di fora regional dan internasional sangatlah besar. Mesir pernah menjadi pemimpin Uni Afrika dan hingga saat ini merupakan salah satu negara yang paling berpengaruh. Di Liga Arab, ia merupakan pendiri dan aktor kunci. Peran negara ini di kawasan Teluk jelas tidak terbantahkan lagi.[2] Karena itu, peristiwa di Mesir diyakini akan membawa pengaruh yang sangat kuat di negara-negara Arab, Afrika, bahkan mungkin di Dunia Islam.

***

B. Alotnya Kejatuhan Mubarak

Di luar dugaan, rezim Mubarak mampu bertahan dari "gempuran" protes rakyat yang terjadi secara massif, merta, dan kontinyu selama 18 hari di seluruh negeri. Cukup mengejutkan pula bahwa energi rakyat Mesir untuk memperjuangkan perubahan sebegitu besar dan tahan lama.

Setelah kuantitas demonstran di Tahrir dikabarkan sedikit menurun, pemimpin oposisi tidak satu suara, dan seolah-olah konsolidasi rezim Mubarak-Sulaeman mampu mempertahankan kekuasaan untuk sementara waktu, kini gelombang protes rakyat kembali membesar, semakin luas, dan intensif. Para "koordinator" gerakan yang diwawancarai *al-Jazeera* dan *al-Alam* dengan jelas menegaskan bahwa mereka akan terus memperjuangkan cita-cita perubahan hingga "titik darah penghabisan". Tampilnya Wael Ghanim sebagai simbol baru perlawanan pemuda Mesir semakin menarik simpati yang sangat luas dari rakyat Mesir untuk mendukung perjuangan itu.

---

2) Ibnu Burdah, *Bahasa Arab Internasional*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 87-9.

Akankah rezim Mubarak-Sulaeman mampu bertahan setidaknya hingga masa transisi sebagaimana “peta jalan transisi”, atau rezim ini segera mengalami nasib yang sama dengan rezim Bin Ali di Tunisia? Akankan gerakan perubahan di negeri itu akan segera menjadi gerakan rakyat kedua di Dunia Arab yang berhasil menggulingkan rezim represif setelah Tunisia?

• *Faktor Mubarak*

Mubarak adalah sosok pemimpin yang kuat dan cerdas, setidaknya jika dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin lain di Dunia Arab. Pada masa awal pemerintahannya, Mesir telah dililit persoalan hebat. Persoalan ekonomi, menguatnya radikalisme, dan terbuangnya Mesir dari Liga Arab merupakan persoalan yang amat besar. Akan tetapi, presiden yang berasal dari petinggi angkatan udara sekaligus dosen di akademi angkatan tersebut mampu membawa Mesir keluar dari persoalan tersebut sekaligus.

Perekonomian Mesir bagaimanapun terdorong bantuan Amerika Serikat dalam jumlah yang sangat besar sebagai konsesi atas dicapainya Perdamaian Camp David I. Mubarak mampu memelihara posisi netralnya sehingga tidak kehilangan bantuan tersebut. Ia kemudian mampu mendatangkan riyal, dinar, dan dirham dari negara-negara petrodolar dari Teluk sebagai konsesi terhadap negara itu atas bantuannya kepada negara-negara Teluk dari ancaman Saddam Hussein. Ia juga membawa Mesir menjadi pemimpin Liga Arab sekaligus mengembalikan *maqar* (markas besarnya) organisasi kawasan paling berpengaruh itu ke Kairo.

Sejak itu, ia mampu menjaga stabilitas dalam negeri meskipun dengan tindakan sangat represif, memainkan peran kunci di fora regional Dunia Arab dan Uni Afrika, serta pada

fora internasional. Hampir seluruh persoalan kunci kawasan melibatkan "otak" orang ini. Pantaslah jika sebagian masyarakat Mesir, sebelum meledaknya protes 25 Januari lalu, membanggakan negerinya yang telah menyumbang banyak pemikiran cerdas untuk kawasan. Selama ini, suara Mubarak paling didengar oleh pemimpin-pemimpin Arab yang lain.

Kini, Mubarak menghadapi gerakan protes rakyat untuk perubahan. "*Irhal yaa Mubarak*" (enyahlah kau Mubarak) menjadi slogan-slogan massa yang didominasi anak muda. Tidak seperti di Tunisia, Mubarak dengan strategi menunggu, memotong jalur logistik, dan menyebar pasukan untuk menghadang konsentrasi massa telah berhasil menahan untuk sementara demontrasi yang diperkirakan akan menumbangkannya. Kendati demikian, sekitar tiga ratusan nyawa telah menjadi korban dan ribuan terluka.

Perkembangan Mesir setidaknya telah memperlihatkan kehebatan presiden yang sudah tua renta itu untuk tetap memegang kontrol atas kekuatan senjata Mesir, setidaknya untuk beberapa waktu. Seruan atau "rayuan" tokoh oposisi dan demonstran agar militer berpihak kepada rakyat belum menampakkan hasil. Para petinggi militer bahkan pasang badan untuk Mubarak, termasuk Wapres Sulaeman. Protes massa masih berhadapan dengan kepolisian yang diaktifkan lagi dan angkatan bersenjata. Meski mereka sudah tidak tampak saling menghadang dan namun hal ini tetap menyimpan potensi mengkhawatirkan, terutama setelah pernyataan Sulaeman mengenai kemungkinan militer akan melakukan intervensi. Mubarak sekalipun sudah sangat tua tampaknya masih punya nyali. Ia bersikukuh akan bertahan dan menghabiskan usianya di Mesir, bukan di pengasingan.

- ***Kuatnya Oposisi***

Namun demikian, kekuatan Mubarak juga diimbangi dengan kuatnya oposisi dan kebencian rakyat yang begitu mendalam terhadap rezim ini. Satu hal yang membedakan revolusi Tunisia dan Mesir adalah, protes rakyat Mesir langsung ke jantung negara, yaitu Kairo, kemudian disusul di kota-kota penting di sebelah Utara seperti Iskandariyah, Ismailiyyah, Mahallah Kubro, dan kemudian menjalar ke seluruh negeri. Sedangkan di Tunisia, gerakan di ibukota justru yang belakangan.

Mengapa demikian? Gerakan Perubahan dan Gerakan Pemuda 6 April yang dipandang sebagai salah satu obor gerakan ini sebenarnya hanyalah saluran baru bagi sikap oposisi di kalangan masyarakat. Adapun oposisi Mesir dalam bentuk gerakan bawah tanah sesungguhnya telah sangat kuat. Selama ini, oposisi utama Mesir, yakni *al-Ikhwan al-Muslimun*, bertiarap akibat kuatnya represi negara. Oposisi yang muncul di permukaan hanyalah partai-partai kecil sebagai pelengkap sistem demokrasi multipartai. Sekarang, para pemimpin oposisi utama itu telah keluar dari "sarang". Bahkan Yusuf Qardhawi yang berada di Teluk pun terlibat secara jelas dalam mengarahkan protes massa.

Perkembangan di Mesir jelas sangat memprihatinkan. Gerakan massa yang telah pecah dan membawa korban sangat sulit untuk dihentikan oleh siapapun kecuali tujuan gerakan yang menyatukan mereka telah tercapai, yaitu tumbangnya rezim Mubarak.

Jika Mubarak bersikeras untuk bertahan dan angkatan bersenjata tetap setia kepadanya, apalagi melakukan intervensi dengan "memberangus demonstran" sebagaimana dikatakan Sulaeman, maka harga yang sangat mahal harus dibayar oleh rakyat Mesir. Jika Mubarak bersikeras bertahan sementara angkatan bersenjata menyadari realitas dan bersikap netral,

maka korban yang jatuh kemungkinan lebih kecil. Tetapi apabila Mubarak mau menyadari realitas dan kuatnya tuntutan rakyat, dan sebagai "negarawan" dia mau menghindari jatuhnya lebih banyak lagi korban, maka mundur adalah satu-satunya jalan.

***

C. Rakyat Mesir, Luar Biasa!!!

Tumbangnya rezim Mubarak telah menjadi "monumen" atas kegigihan, pengorbanan, dan sikap pantang menyerah rakyat Mesir dalam perjuangan mereka untuk melakukan perubahan. Tenaga rakyat Mesir seperti tidak ada habis-habisnya. Nyali mereka juga sangat kuat. Aksi selama 18 hari secara maraton dalam cuaca khas subtropis yang sangat dingin sudah merupakan catatan yang hebat. Gertakan hingga ancaman rezim sama sekali tidak menggetarkan mereka. Sebaliknya, "ngototnya" Mubarak dan tantangan Wapres Sulaeman justru mendorong jutaan rakyat untuk turun ke jalan yang berujung pada lengsernya dua tokoh tersebut dan pembubaran jajaran kabinetnya.

- ***Konsep Diri***

Bangsa Mesir memiliki konsep diri yang sangat tinggi. *Mashr yaa ummal bilaad* (Mesir, sentrum seluruh dunia), demikian potongan dari lagu kebangsaan negeri itu. Sejarah memang mencatat bahwa mereka adalah bangsa yang hebat. Mereka adalah bangsa dengan peradaban yang maju sejak zaman yang tua. Setidaknya, mereka mengklaim bahwa sejarah Mesir telah dimulai sejak 5.150 tahun yang lalu, zaman di mana bangsa-bangsa lain apalagi Amerika dan Eropa belum mengenal apa-apa. Mereka adalah salah satu pewaris peradaban teragung pada zaman purba.

Hal itulah yang membentuk mentalitas dan konsep diri bangsa ini. Mereka memiliki keyakinan sebagai bangsa yang memiliki "takdir" menggariskan masa depan dunia. Bukti-bukti tentang keagungan masa lalu itu memang terpelihara hingga saat ini, dan menjadi kebanggaan khas negeri itu.

● *Pemimpin Arab*

Mesir secara geneologi jelas bukan keturunan Arab asli. Status keturunan Arab asli biasa disematkan kepada warga Nejd, Arab Saudi bagian tengah. Namun demikian, konsep diri yang besar telah melahirkan sikap yang khas dari rakyat negeri ini. Mereka merasa memikul tanggung jawab besar untuk memimpin bangsa-bangsa di sekitarnya, khususnya bangsa Arab.

Dalam sejarah Arab kontemporer, bahkan sebagian episode sejarah klasiknya, membuktikan bahwa Mesir memainkan peran *leadership* di kawasan tersebut terutama di antara negara-negara Arab. Perjuangan untuk perubahan yang kali ini terjadi pun mengarah kepada semangat itu. Beberapa komentar koordinator gerakan seperti Dr. al-Hafnawi jelas menunjukkan bahwa gerakan itu, kendati bukan yang pertama, juga diarahkan untuk "membimbing" rakyat Arab di negara-negara lain ke arah yang sama, yakni perlawanan terhadap kediktaktoran dan kedzaliman menuju negara yang lebih demokratis dan berkeadilan.

Mental sebagai pemimpin Arab inilah yang membedakan Mesir dari Tunisia. Tunisia memang negara Arab pertama yang sukses melakukan revolusi rakyat, dan ini memberi inspirasi awal kepada negara-negara Arab yang lain, termasuk Mesir. Namun, efek yang ditimbulkan dua revolusi dengan pola yang hampir sama itu jauh berbeda. Jatuhnya Mubarak jauh lebih "menggelegar" di telinga masyarakat Arab daripada jatuhnya Ben Ali. Dukungan terhadap perjuangan rakyat Mesir dan luap-

an kegembiraan atas keberhasilan perjuangan itu benar-benar terasa di seluruh negara Arab, kendati rezim-rezim Arab berupaya semaksimal mungkin agar rakyatnya memperoleh informasi dan pengaruh sesedikit mungkin dari revolusi tersebut.

Gelombang ke arah Timur, virus gerakan ini berpotensi menyapu monarki-monarki yang kaya raya seperti Arab Saudi, Oman, Qatar, Bahrain, Uni Emirat, dan Kuwait. Di *masyriq*, Suriah dan Yordania paling rawan terjangkit virus dari Tunisia dan Mesir ini. Oposisi kedua negara itu diam-diam sangat kuat sementara kepemimpinan negara dipandang lemah. Peristiwa di Mesir lebih berpotensi membawa efek di dua bagian kawasan itu daripada yang terjadi di Tunisia. Demikian pula, negara-negara Arab di bantaran sungai Nil terutama Sudan. Pengaruhnya berpotensi sangat besar, apalagi situasi di Sudan sangat mendukung lahirnya gerakan protes.

***

D. Hambatan Pelembagaan Hasil-Hasil Gerakan

Perjuangan untuk perubahan seringkali berlangsung sangat sulit dan menelan korban yang tidak sedikit. Namun demikian, pelembagaan dari hasil gerakan seringkali berlangsung lebih sulit lagi. Inilah yang terjadi di Mesir paska mundurnya Husni Mubarak sebagai presiden. Itulah yang dialami para aktivis perubahan di Mesir dalam perjuangannya untuk merubah konstitusi negeri tersebut. Mereka menginginkan perubahan secara fundamental dan menyeluruh terhadap konstitusi dengan cara mendiskusikan lagi setiap pasal. Mereka tidak menerima perubahan hanya meliputi sembilan pasal seperti yang baru diperoleh melalui referendum. Karena itu, mereka berencana untuk melanjutkan aksi di Tahrir untuk memperjuangkan hal tersebut.

***

Gejala politik di Mesir menunjukkan setidaknya ada lima hal yang menghambat proses institusionalisasi hasil gerakan. Yang terpenting adalah, sebagian pendukung Mubarak masih melakukan "perlawanan" terhadap proses perubahan. Dukungan terbuka kepada Mubarak barangkali sudah tidak ada, sebab ia sudah menjadi musuh dewa Mesir yang baru, Revolusi Rakyat. Namun, upaya-upaya untuk menghambat laju perubahan jelas sekali terjadi.

Bagaimanapun, sebagian tentara termasuk Dewan Agung Militer yang memegang otoritas pemerintahan saat ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Mubarak. Apalagi, tuntutan protes massa yang masih berlangsung dan direncanakan setiap hari jumat di Tahrir sudah mengarah kepada isu pengadilan terhadap Mubarak, keluarga, dan kroninya. Sebagian tuntutan itu sudah mulai dilaksanakan. Tuntutan semacam itu bukan hanya berarti ancaman terhadap karir dan jabatan sebagian elit militer yang berkuasa saat ini, namun juga ancaman terhadap masa depan dan hidup mereka.

- ***Kontestasi Kelompok***

Jatuhnya Mubarak membuat kelompok-kelompok revolusi kehilangan musuh terpenting yang mempersatukan mereka. Selanjutnya, mereka justru terlibat kontestasi untuk memperoleh simpati dan dukungan seluas-luasnya dari rakyat Mesir untuk pertarungan pemilu ke depan. Kontestasi itu bahkan sudah terbaca jelas menjelang Mubarak mundur dari kursi kepresidenan.

Sebagian kelompok perjuangan telah menjadi partai politik, dan sebagian yang lain diyakini akan segera menyusul. Itu artinya akan terjadi pertarungan perebutan kekuasaan di antara pejuang revolusi. Pertarungan yang keras nampaknya akan terjadi antara *Jamaah al-Ikhwan al-Muslimin* dengan partai *Hurriyah wa Adalah* (Kebebasan dan Keadilah) dan kelompok-

kelompok nasionalis. Keunggulan yang pertama terletak pada konsolidasi yang sudah jauh hari dilakukan, keterasahan dalam menghadapi kondisi yang sulit, dan mereka adalah salah satu simbol korban kedzaliman Mubarak.

Akan tetapi, partai Islam dalam sejarah Mesir belum pernah memegang kekuasaan. Pemegang kekuasaan Mesir sejak menjadi republik selalu berasal dari kubu nasionalis. Hanya saja, kubu yang terakhir ini belum memiliki rumah dan tokoh besar yang bisa menyatukan mereka.

Energi yang dikerahkan untuk pertarungan ke depan tersebut bisa mengurangi dorongan terhadap proses pelembagaan hasil gerakan. Oleh karena itu, golongan muda terus melanjutkan aksi di Tahrir pada setiap jumat untuk memastikan bahwa proses pelembagaan hasil gerakan benar-benar dituntaskan. Pergantian PM Ahmad Syafiq yang dikenal dekat dengan Mubarak dengan Isham Syaraf yang dikenal sebagai pendukung Revolusi tidak terlepas dari tekanan ini. Aksi itu dipandang penting untuk menyatukan kelompok-kelompok "revolusi" yang sudah mulai tidak satu suara dalam banyak hal.

- ***Pihak Luar***

Amerika Serikat, Israel, dan Iran merupakan aktor-aktor yang secara kasat mata ingin turut menentukan arah perubahan di Mesir. Kedua yang pertama menginginkan posisi Mesir baru tidak berubah sebagaimana masa Mubarak; menjadi jangkar stabilitas dan keseimbangan di kawasan, memimpin negara-negara Arab berorientasi Barat, dan tentunya tetap menjaga hasil *peace agreements* dengan Israel termasuk mendorong proses perdamaian Israel-Palestina yang hingga kini berjalan tertatih-tatih.

Iran sangat getol menarik Mesir baru ke dalam barisannya, atau setidaknya menjauhkan negeri itu dari Amerika Serikat

dan Israel. Arab Saudi adalah aktor lain yang tidak bisa diremehkan. Negara itu sangat berkepentingan terhadap Mesir untuk menjadi sekutu kuat di kawasan yang berorientasi ke Barat dan melawan pengaruh Iran.

Kuatnya intervensi asing dapat membelokkan arah perubahan Mesir dari cita-cita revolusi. Sebab, kendati pihak-pihak luar itu menyatakan dukungan terhadap rakyat Mesir dan lahirnya Mesir baru sebagai negara demokratis, namun yang terpenting bagi mereka adalah memastikan bahwa agenda dan kepentingan mereka di kawasan didukung atau setidaknya tidak dihambat oleh rezim baru hasil revolusi.

- ***Kesejahteraan***

Rakyat Mesir tentu ingin segera merasakan hasil perjuangan yang mereka kobarkan dengan pengorbanan luar biasa. Hasil itu berupa perubahan ke arah kehidupan yang lebih aman, damai, demokratis, dan sejahtera. Jatuhnya Mubarak, perburuan harta karunnya, dan pengadilan kroni-kroni terdekatnya barangkali untuk sementara dapat memuaskan rakyat Mesir. Akan tetapi, mereka pasti menginginkan hasil yang lebih riil yang bisa mereka rasakan dalam kehidupan nyata.

Paska jatuhnya Mubarak, perekonomian Mesir yang turun drastis belum sepenuhnya pulih kembali. Pariwisata yang menjadi andalan ekonomi Mesir sangat sensitif dengan isu keamanan. Sementara, hingga saat ini demontrasi yang menuntut penuntasan tuntutan rakyat belum berakhir, bahkan mungkin masih sangat lama. Ketidakpuasan rakyat atas kondisi ini bukan hanya bisa menjadi penghambat pelembagaan hasil-hasil gerakan, namun juga dapat memukul balik semangat dan cita-cita revolusi itu sendiri.

***

BAB IV

Libya: Revolusi Rakyat, Kebrutalan Rezim, dan Intervensi Kemanusiaan

A. *Laa Ilaha Illallah, Qaddafi 'Aduwullah*

"La ilaha illallah, Qaddafi 'Aduwullah" (Tiada Tuhan selain Allah, Qaddafi adalah musuh Allah). Demikian salah satu kalimat yang digemakan rakyat Libya dalam aksi protes mendesak Kolonel Qaddafi mundur. Ungkapan itu diucapkan dengan nada tinggi, secara bersama, dan berulang-ulang oleh para demonstran. Penggunaan ungkapan sepenting *laa ilaaha illallaah* dan dikombinasikan dengan pernyataan kemarahan itu menunjukkan adanya kebencian yang amat dalam di hati rakyat terhadap penguasa Libya selama lebih dari 40 tahun itu. Qaddafi bukan hanya dipandang sebagai musuh rakyat Libya dan peradaban, namun juga musuh Yang Maha Kuasa.

Para tokoh agama di Libya mengeluarkan fatwa bahwa melawan Qaddafi adalah *fardhu 'ain* bagi setiap rakyat Libya. Mereka menyerukan kepada seluruh rakyat untuk turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan. Lebih dari itu, Ketua Ulama Islam

Dunia di Mesir menyerukan kepada siapa saja yang memiliki kesempatan dan kemampuan agar secepatnya membunuh Qaddafi sebab ia adalah monster bersenjata yang membunuh ribuan rakyatnya secara amat keji. Membunuh Qaddafi berarti menyelamatkan ribuan nyawa orang-orang tak berdosa, serta menyelamatkan Libya dari kehancuran.

Oleh karena itu, elemen-elemen penting di Libya, kawasan, dan internasional mendukung penuh perjuangan rakyat untuk menjungkalkan kekuasaan Qaddafi. Bukan hanya rakyat biasa, para pembesar suku di Libya juga menyatakan dukungannya dengan berbagai cara. Bahkan sebagian suku yang semula dipandang loyal kepadanya, kemudian berbalik memusuhinya. Pemimpin Qabilah Warfalah, suku terbesar di Libya, bahkan ikut turun ke jalan bersama rakyat menuntut penghentian pembunuhan secara keji oleh loyalis dan tentara bayaran Qaddafi.

Para ilmuwan, budayawan, sejumlah organisasi profesi, para artis juga sudah mendukung perjuangan rakyat. Bahkan, Muhammad Qaddafi al-Dam, artis pemeran Qaddafi, juga menyatakan mundur dari profesinya sebagai pemeran Qaddafi. Sebagian kekuatan bersenjata Libya juga menentang kekuasaan Sang Kolonel gila ini.

Di kawasan, Qaddafi sudah kehilangan kawan. Keanggotaan Libya di Liga Arab telah dibekukan. Suara-suara dari lembaga dan pemimpin dunia bukan hanya mengecam, membekukan aset, menjadikan Libya sebagai zona larangan terbang dan mengembargo militer Libya, namun juga menuntut penguasa keji itu diseret ke mahkamah internasional.

Beberapa pengamat meyakini bahwa Qaddafi sesungguhnya sudah terjepit. Pertahanan rezim ini diperkirakan hanya bertumpu pada pasukan elit Garda 32 yang dipimpin oleh Khamis Qaddafi, pasukan khusus di bawah al-Saidi Qaddafi, militan suku Qaddafa, dan sejumlah “pembunuh” bayaran dari beberapa

negara Afrika. Sekalipun demikian, peluru Qaddafi nampaknya masih cukup untuk membunuh beribu-ribu lagi rakyatnya, bahkan mengalahkan tentara pemberontak di beberapa kota.

● *Pemusnahan Terencana*

Qaddafi dan anak-anaknya nampaknya jauh-jauh hari telah mencermati kemungkinan meledaknya protes rakyat dalam skala besar di Libya, sebagaimana yang telah terjadi di Tunisia dan Mesir. Oleh karena itu, mereka juga mempersiapkan secara matang berbagai cara untuk menghadapi protes itu.

Kendati demikian, Qaddafi semula terkesan meremehkan gelombang protes ini. Dengan sikap "gila" seperti biasanya, ia menyatakan akan turut serta dalam demonstrasi untuk menjatuhkan pemerintah. Ia barangkali berpikir bahwa Libya tidak memiliki pemerintah sebagaimana kredonya dalam *al-kitab al-ahdar* bahwa pemerintah Libya adalah semua rakyat Libya. Pada kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya, kekuasaan menumpuk pada satu individu.

Rencana di atas nampaknya sudah mencakup detil-detil yang akan dilakukan dalam menghadapi protes rakyat. Kemungkinan pembelotan atau ketidakpatuhan angkatan bersenjata juga sudah dipertimbangkan. Karena itu, aparat "Kongres Rakyat" yang merupakan loyalis Qaddafi dipersiapkan. Qaddafi sangat mengandalkan dukungan dari sipil bersenjata ini sebab jumlah mereka sangat besar, tersebar di berbagai daerah hingga ke pelosok negeri, amat paham situasi di daerahnya, dan militansi mereka juga bisa diandalkan kendati kurang profesional.

Bentrok horizontal pun tidak terhindarkan begitu demonstrasi membesar. Kerusuhan, atau tepatnya pembantaian, terjadi di mana-mana terutama di Benghazi dan Tripoli. Para demonstran kemudian berupaya mempersenjatai diri dengan

batu dan molotof rakitan seadanya. Peningkatan jumlah korban dan destruksi yang diakibatkannya juga luar biasa. Negeri Umar al-Muhtar itu bersimbah darah dan dilalap kobaran api. Korban semakin banyak seiring pecahnya perang saudara yang berkepanjangan di beberapa kota paling strategis.

Kekejian rezim Qaddafi tidak berhenti di sini. Jauh-jauh hari mereka telah mempersiapkan tentara bayaran dari beberapa negara Afrika. Ada laporan yang menunjukkan adanya rekrutmen tenaga "perang" di Nigeria dan negara-negara sekitarnya dengan bayaran USD 2000 atau sekitar Rp. 20 juta per hari. Tugas mereka di arena perang di Libya amat sederhana, yaitu merusak dan membunuh. Inilah yang dihadapi rakyat Libya yang melakukan protes damai di negerinya.

Rencana keji Qaddafi bahkan lebih buruk lagi dari semua itu. Ia mempersiapkan penjahat-penjahat kelas kakap yang berada di penjara-penjara Libya. Mereka dilepas di pusat-pusat demonstrasi dan dipersenjatai sedemikian rupa. Tujuannya barangkali sederhana, menyempurnakan kehidupan Libya layaknya neraka. *Aduwullah*, musuh Allah, peradaban, dan kemanusiaan, memang gelar yang pantas disematkan kepada Qaddafi dan sejumlah anaknya.

***

B. Proyeksi Diri Muammar Qaddafi

Angka 69 benar-benar istimewa dalam sejarah hidup Kolonel Muammar Qaddafi. Betapa tidak, tahun 1969 merupakan tahun anak badui miskin ini menjelma menjadi orang paling berkuasa di Libya melalui kudeta terhadap Raja Idris. Tidak hanya menjadi pemimpin tertinggi politik, ekonomi, dan militer di Libya, bahkan melalui "demokrasi massa" yang dikembangkannya, Qaddafi juga menguasai suara rakyat.

Sejak itu, ia menjadikan dirinya sebagai objek pemujaan rakyat Libya. Hari-hari Libya diwarnai dengan pemujaan super hiperbolik, panjang, dan telanjang atas sosok Qaddafi. Hal itu biasa dilakukan di hadapan Qaddafi baik dalam acara anak-anak, remaja, hingga orang tua. Qaddafi selalu menikmati pemujaan-pemujaan yang berlangsung selama berjam-jam itu dengan heroisme khas 69 dengan mengepalkan tangan.

Sejak dahulu, penulis membayangkan betapa sulit bagi orang yang masih sehat jiwanya untuk diperlakukan seperti itu setiap saat dan pada setiap acara yang dihadirinya di Libya. Angka 69 bukan hanya penting bagi Qaddafi, bahkan rakyat Libya pun harus mengeramatkannya dan tidak main-main dengannya.

Namun, angka 69 nampaknya juga merupakan lonceng "kehancuran" bagi Qaddafi. Pada usia 69 tahun pada tahun 2011), kekuasaan Qaddafi dihantam oleh badai protes rakyat yang tidak terbayangkan sebelumnya. Protes rakyat dalam skala besar, intensif, dan merata di kota-kota Libya telah memotong sebagian besar tangan-tangan kekuasaannya. Kekuasaan yang telah dicengkeramnya selama 40 tahun lebih itu sudah menunjukkan tanda-tanda segera berakhir meski ia bertekad akan terus bertahan tanpa peduli seberapa pun darah rakyat Libya mengalir.

Dari beberapa pidato sebelum kejatuhannya, tampak sekali sikap emosional Qaddafi. Ia seolah-olah masih bingung dengan apa yang sedang terjadi. Ia sepertinya belum bisa menerima kenyataan bahwa rakyat yang mendewa-dewakannya selama ini ternyata berani menentangnya, bahkan hendak mengusirnya dari Libya. Ia kemudian menyalahkan siapa saja atas kehancuran Libya yang tidak lain karena ulah dan perintahnya sendiri. Ia menyalahkan semua pihak, para pemuda yang disebutnya tikus busuk, Amerika, media massa asing hingga al-Qaida. Jurus mabuk yang diperlihatkannya jelas menunjukkan kegoncangan jiwanya yang luar biasa.

● *Ambisi dan Kenyataan*

Ambisi Qaddafi sangat besar. Ia adalah salah satu pemimpin yang paling ambisius dan haus dengan nama besar. Di dalam negeri, ia membuat Libya menjadi berbeda dari negara manapun. Libya adalah negara yang secara formal tidak memiliki konstitusi, parlemen, dan pemerintahan, apalagi partai politik.

Menurut kredo Qaddafi dalam bukunya *al-Kitab al-Ahdhar*, Libya diperintah, diatur, dan diawasi langsung oleh rakyat. Itulah prinsip "demokrasi langsung" atau yang disebutnya dengan sosialisme Islam. Adanya perwakilan dalam parlemen berarti telah mengebiri kekuasaan rakyat untuk memerintah, mengatur, dan mengawasi negara. Karena itu, partai politik, kendati pernah ada pemilu di Libya, bukan hanya dilarang, namun dipandang sebagai musuh rakyat dan negara.

Pada kenyataannya, yang disebut suara seluruh rakyat secara langsung itu adalah kehendak Qaddafi sendiri. Badan tertinggi untuk rapat "seluruh rakyat" adalah *al-Mu'tamar al-Sya'biyyah al-Amm* (Kongress Umum Rakyat). Sekretaris jenderal badan tertinggi itu selamanya dipegang langsung oleh sang kolonel. Jabatan ini tidak boleh diganti atau diganggugugat. Sebab, menurut Qaddafi, orang menduduki jabatan itu adalah konsekuensi otomatis dari takdir sejarah yang telah menjadikannya sebagai pemimpin Revolusi 69. Anggota badan tersebut dan badan-badan di bawahnya, seluruhnya, harus dipegang oleh orang-orang yang patuh kepada Qaddafi. Karena itu, difusi kekuasaan kepada semua rakyat, dalam praktiknya, sama sekali tidak ada. Yang terjadi justru sebaliknya, autokrasi, yakni penumpukan kekuasaan di tangan individu.

Akibatnya, kekuasaan Qaddafi sama sekali tidak ada penyeimbangnya. Partai oposisi tidak ada, anggota parlemen yang berbeda pandangan juga tidak ada, sebab partai politik dan parlemen memang tidak ada. Partai-partai politik yang

pernah hidup di Libya dan pernah mengikuti pemilu pada tahun 1950-an berubah menjadi LSM-LSM yang tidak memiliki kewenangan bicara apapun tentang politik. Gerakan Sufisme al-Sanusiyah yang dianut secara luas di Libya ditekan sedemikian rupa. Qaddafi tak lain adalah Raja Libya dengan kekuasaan yang tidak ada pembatasnya.

Rasa haus kekuasaan Qaddafi tidak hanya mendorongnya menguasai seluruh kehidupan Libya dan memberangus oposisi sekecil apapun, namun juga membawanya kepada petualangan gila di kancah internasional. Sebagai pengagum orator ulung Gamal Abdul Naseer, Qaddafi sangat terobsesi menjadi Pemimpin Besar Dunia Arab. Ia beberapa kali berupaya membuat konfederasi dengan beberapa negara Arab, namun selalu menemui kegagalan. Ia juga bermimpi memimpin Dunia Islam dan Afrika dengan melakukan uji coba menyatukan negara-negara Sahara Afrika dan melakukan petualangan mendukung gerakan-gerakan subversif dan teror di berbagai negara.

Hal serupa juga terjadi pada ranah ekonomi. Menurut kredo Sosialisme yang ia bentangkan, pihak yang mengurus moda-moda produksi adalah negara. Swasta hampir tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kompetisi ekonomi, apalagi di bidang-bidang yang cukup strategis. Hal itu, menurutnya, penting dilakukan di samping untuk membangun kesejahteraan rakyat, juga untuk menghindari penumpukan kapital pada individu-individu.

Lain teori, lain pula praktiknya. Qaddafi, keluarga, dan kroninya menjadi orang-orang yang kaya raya, perusahaan-perusahaan strategis milik negara tak ubahnya adalah milik pribadi.[1] Tidak berlebihan bila kehidupan *nyleneh* dan ber-

1) Rumus ketimpangan kapital di dunia Arab adalah "*man yazra' laa yamlik wa man yamlik la yazra*" (orang miskin yang pekerja dan orang kaya yang tidak bekerja". Dr. Muhammad Ali Muqallad, *Qadhaya Hadhariyyah Arabiyyah Muashirah*, (Beirut: Dar al-Manhil, 2003), hlm. 29.

lebihan Qaddafi dan gaya hidup mewah anak-anaknya menjadi sorotan media massa, bukan hanya di sekitar Libya namun juga di negara-negara Barat.

Qaddafi bukan hanya ingin menguasai politik dan ekonomi secara totaliter, namun juga ingin menguasai pikiran seluruh elemen bangsanya. Secara angkuh dan berlebihan, ia meletakkan dirinya sebagai ideolog besar dunia yang menggariskan jalan tengah antara dua ideologi besar yang pernah bersaing keras di dunia, Kapitalisme vs Sosialisme. Tiga buku yang ditulisnya pada awal-awal ia memimpin Libya, menjadi satu-satunya pedoman bagi pengaturan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Libya. Buku itu telah dipaksakan menjadi "kitab suci" baru bagi rakyat Libya.

Secara sadar ataupun tidak, Qaddafi telah memproyeksikan dirinya sebagai sosok teramat agung dan tiada banding di dunia. Konsep diri yang berlebihan itulah yang kemudian membebani dirinya untuk terus memaksa realitas sebagaimana proyeksi itu. Padahal realitas itu sama sekali sudah berubah. Ia tidak lagi dihormati, bahkan oleh rakyatnya sendiri. Ia dihina dan dimaki, bahkan disuruh pergi dari negeri sendiri. Dari sinilah dapat dimengerti mengapa Qadafi mereaksi secara biadab dan sangat keji terhadap protes damai dari rakyatnya sendiri. Jarak antara proyeksi diri dan kenyataan terlalu berjauhan sehingga sikap dan tindakannya tidak bertumpu kepada kenyataan.

***

C. Intervensi Libya Sekarang!!! [2)]

Situasi di Libya sudah tidak lagi dapat ditolelir. Jutaan orang tak berdosa terancam jiwa dan raganya. Rezim Qaddafi barangkali tidak akan bertahan terlalu lama. Namun masih tersisanya kekuatan Qaddafi, tekad kejinya yang tanpa otak dan hati, dan kebrutalan pendukungnya diyakini masih mampu menambah tumpukan mayat di Libya. Kendati sudah sangat berkurang, pendukung Qaddafi masih mungkin melanjutkan berbagai penghancuran di Libya.

Pergantian rezim bukanlah perkara yang paling penting. Rezim sekeji itu pasti akan tergilas dan menerima balasan dari rakyat melebihi yang diterima oleh Mubarak di Mesir dan Ben Ali di Tunisia. Persoalan yang terpenting adalah tentang keselamatan manusia.

- ***Intervensi Kemanusiaan***

Demi kemanusiaan, dunia termasuk Indonesia harus segera melakukan intervensi terhadap Libya. Institusi internasional dan regional, negara-negara, dan aktor-aktor internasional yang lain memiliki tanggung jawab moral untuk menyelamatkan rakyat Libya dari kebiadaban dan kekejian Qaddafi dan pendukungnya.

Dalam konteks penyelamatan kemanusiaan, batas-batas kedaulatan negara tidak pantas lagi dibicarakan. Kedaulatan negara ada karena negara itu menjamin keselamatan anak

---

2) Artikel ini ditulis sebelum keluarnya Ketetapan DK PBB No. 1973 yaitu ketika situasi kemanusiaan di Libya digambarkan sebagai "tidak dapat diterima" oleh siapapun. Qaddafi menggunakan berbagai sarana tempur untuk menghadapi rakyatnya yang melakukan protes secara damai. Catatan keji terhadap kemanusiaan itu tentu tidak boleh dihapuskan agar tidak terulang. Qaddafi barangkali adalah pahlawan bagi sebagian orang, tetapi yang pasti ia adalah penjahat kemanusiaan.

bangsanya. Ketika itu tidak terlaksana maka kedaulatan negara dengan sendirinya sirna. Apalagi, “negara” (baca: rezim) yang dibiayai rakyatnya justru menjadi sumber ancaman itu. Tidak ada pilihan lain, kecuali melakukan intervensi secepatnya.

Kecaman para pemimpin dunia, caci-maki dan sumpah serapah masyarakat internasional, blokade militer, pembekuan aset, pembekuan keanggotaan di Liga Arab, dan reaksi-reaksi semacamnya barangkali akan memiliki efek yang besar terhadap rezim yang hidup secara normal. Akan tetapi, rezim Qaddafi tengah berada di ambang ajal. Namun di sisa hidupnya ia bertekad melakukan pembunuhan dan penghancuran sebesar-besarnya sebelum ajal benar-benar tiba. Celakanya, sasarannya adalah rakyat tak bersenjata yang selama 40 tahun lebih mengagung-agungkannya.

- ***Kepentingan***

Semangat untuk melakukan intervensi seringkali menghadapi masalah. Masalah pertama adalah, siapa yang pantas melakukannya. Idealnya, institusi internasional seperti PBB atau institusi regional seperti Liga Arab yang melakukan intervensi untuk membela kemanusiaan di Libya. Namun, keduanya tidak memiliki kekuatan riil di lapangan. Jangankan angkatan bersenjata yang mampu melumpuhkan diktaktor sekelas Qaddafi, tentara saja mereka tidak punya. Mereka amat bergantung kepada kekuatan bersenjata negara-negara anggota, terutama negara-negara besar. Pada praktiknya selama ini, negara-negara besar seperti Amerika Serikat melakukan intervensi bukan atas perintah lembaga internasional, namun atas kehendaknya sendiri. Yang terjadi kemudian bukan sepenuhnya upaya untuk menyelamatkan kemanusiaan, namun usaha untuk mencapai kepentingan negaranya sendiri dicurigai akan lebih dominan.

Penolakan rakyat dan berbagai elemen bangsa Libya juga perlu menjadi pertimbangan. Berdasarkan beberapa komentar dan wawancara, resistensi mereka tampaknya sangat besar apabila yang melakukan intervensi adalah Amerika Serikat, Inggris, Italia, atau negara-negara Eropa lain. Intervensi negara-negara tersebut dalam bentuk yang "keras" justru dapat menimbulkan persoalan baru di Libya.

Aktor-aktor penting di kawasan seperti Iran dan Israel jelas akan sulit diterima oleh kalangan luas rakyat Libya. Pilihan lain adalah Mesir, Tunisia, dan Aljazair. Namun ketiga negara tetangga Libya tersebut sedang menghadapi masalah serius di dalam negerinya masing-masing.

Kuatnya *interest* dan siapa yang absah melakukannya merupakan persoalan yang selalu menggelayuti masalah intervensi untuk kemanusiaan. Inilah persoalan tatanan dunia yang anarki (tidak ada hirarki) seperti sekarang ini. Tidak ada kekuatan di atas negara yang mampu melakukan secara paksa agar aktor internasional terutama negara mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan.

Namun demikian, watak setiap negara untuk melakukan pengejaran terhadap kepentingan masing-masing adalah hal yang hampir pasti terjadi, baik oleh negara kecil maupun negara besar. Hal itu wajar dan bisa dimengerti. Adanya "ketidaktulusan" dalam intervensi untuk kemanusiaan (*humanitarian intervention*) adalah sesuatu yang sangat mungkin benar, namun hal itu merupakan kecurigaan yang belum tentu sepenuhnya benar. Yang jelas benar adalah adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan penyelamatan manusia di Libya dari pemusnahan massal oleh rezim gila. Dan hal itu tidak bisa ditunda!!!

***

D. Jalan Ekstrem Diktaktor Qaddafi

“Lahir dalam derita, muda hingga tua berjaya luar biasa, dan menjelang ajal dimaki dan dihina”. Itulah ringkasan sederhana dari sejarah hidup Muammar Qaddafi, si anak badui miskin, remaja yang penuh ambisi, penguasa yang “disanjung” rakyatnya melebihi dewa, dan manusia yang kini paling dihina kendati ada sebagian anggota sukunya yang masih membanggakannya.

- ***Ambisi***

Sejarah perjalanan ekstrem Qaddafi tidak bisa dilepaskan dari ambisinya yang meluap-luap. Ambisilah yang membuat hidupnya yang penuh derita berubah secara ekstrem menjadi penguasa yang paling “dipuja” rakyatnya selama berkuasa. Dan karena itu pula, ia kini harus menghadapi kutukan rakyat Libya dan dunia yang mengubah kejayaannya menjadi nestapa.

Di-*drive* oleh ambisi itu, remaja Qaddafi yang masih belajar di akademi militer telah memiliki keberanian untuk merencanakan sesuatu yang oleh orang-orang sebayanya tidak pernah dilakukan, kendati hanya memikirkannya sekalipun. Ia berencana melakukan kudeta, menggulingkan kekuasaan raja Idris yang berwibawa di mata rakyatnya. Ia ingin menjadi Gamal Abdul Nasser, sang orator yang berapi-api, pemimpin revolusi Mesir, pemimpin bangsa Arab, dan pemimpin yang berani menentang negara-negara adidaya dunia.

Melalui revolusi tidak berdarah, sang kolonel bersama sejumlah perwira muda berhasil mewujudkan rencana itu pada 1 September 1969. Ketika itu, Qaddafi baru berusia 27 tahun. Kekuasaan Raja Idris berhasil direbut ketika ia berada di Turki untuk pemeriksaan medis. Ambisinya berhasil mendorongnya mencapai tahap keberhasilan penting dalam hidupnya. Ia pun

melanjutkan langkah untuk menjadi Nasir muda pada awal-awal kekuasaannya.

Qaddafi, sang pemimpin Libya baru, menjalankan politik "tinggi" dalam pergaulan kawasan dan internasional. Petualangan ekstrem bahkan dilakukannya. Selain berupaya "menyatukan" Arab dengan membuat federasi dengan Mesir dan Suriah, serta pernah pula dengan Tunisia, Qaddafi melakukan "perlawanan" terhadap apa yang disebutnya sebagai imperialisme. Celupan anti Amerika dan anti Eropa sangat kental mewarnai Libya di bawah kepemimpinannya. Orang-orang Italia yang sudah lama menetap di Libya pun diusir sebab, menurutnya, Italia menanggung sejarah penuh dosa terhadap Libya, yakni penjajahan.

Ia juga mensponsori gerakan-gerakan radikal dan berbagai aksi teror di mana-mana untuk mewujudkan ambisinya sebagai orang besar dan punya pengaruh di dunia. Presiden Reagen, yang saking jengkelnya menyebut Qaddafi sebagai "*mad dog*" dari Timur Tengah, bahkan pernah berencana menggulingkan kekuasaan Qaddafi secara paksa.

Tidak hanya itu, ia juga ingin menjadi Mao Tse-tung yang dipandangnya sebagai pemimpin besar dunia pada abad ke-20. Jika Mao menulis *Buku Merah* untuk menggariskan masa depan dunia, Qaddafi juga melakukan hal serupa. Ia menulis *Buku Hijau* (*al-Kitab al-Ahdhar*) yang salah satunya berisi ambisi untuk membangun ideologi ketiga setelah kapitalisme dan sosialisme. Ia sama sekali tidak mau mengaca seberapa besar kapasitas dirinya. Yang jelas, ia menggambarkan dirinya tidak kalah dengan siapa saja. Karena sikap ambisius itu, nama Qaddafi sangat dikenal seantero dunia, bukan hanya di Timur Tengah, namun hampir di seluruh dunia.

Bara ambisi yang tidak ada batasnya itu pula yang kemudian melahirkan kobaran kemarahan rakyat Libya yang

mendesaknya untuk enyah dari negeri yang melahirkannya. Untuk mempertahankan kekuasaan dan mencapai ambisinya, Qaddafi hampir menghalalkan segala cara. Bukan hanya tidak memberi celah untuk oposisi di Libya, Qaddafi juga mengejar penentangnya hingga ke Eropa. Penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan adalah cara-cara "standar" yang dilakukan kepada para penentangnya.

Hal-hal tersebut telah membuat kebencian rakyat Libya kepada Qaddafi menjadi sangat mendalam. Dan ketika ada momentum, kebencian itu meluap menjadi gerakan massa yang hampir tidak bisa dihentikan. Mulai dari protes-protes kecil di kota Benghazi oleh keluarga korban pembunuhan massal dan sadis di penjara Abu Salim, protes rakyat itu terus menjalar ke seluruh Libya. Semula dari wilayah Timur kemudian menjalar ke arah Barat dan ke ibukota. Rakyat Libya yang selama ini tampak tunduk patuh kepadanya ternyata memiliki keberanian tiada tara. Mereka tidak takut kepada Komite Rakyat yang dipersenjatai Qaddafi, bahkan juga kepada tentara elit Garda 32 dan para "pembunuh" bayarannya. Qaddafi pun "kalap" dan menggunakan apa saja yang tersisa untuk menggenangi Libya dengan darah rakyat yang selama ini mengagung-agungkannya.

Setelah serangan Sekutu melemahkan basis-basis kekuatan militernya dan para pejuang terus mendesak kekuatan-kekuatan Qaddafi yang tersisa di beberapa kota, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali menatap hari-hari "kematian": mati dengan bangga karena berani menghadapi Sekutu, atau mati dengan membawa kehancuran sebanyak mungkin orang Libya yang "mengkhianatinya", atau mati sendirian dan membiarkan rakyat yang dahulu mengelu-elukannya kemudian menghina dan merendahkannya, lantas ia diadili dan digantung sebagaimana mendiang Saddam Hussein. Satu pilihan lain masih tersisa, yaitu segera lari ke luar negeri, yang berarti menghancurkan

image diri yang ia bangun selama ini sebagai sosok heroik dan pemberani. Sikap “memalukan” yang barangkali akan menjadi mimpi buruk selama sisa hidupnya.

Di tengah sepi sebab hampir semua orang meninggalkannya, Qaddafi barangkali mulai merenungkan hidupnya, dan barangkali menyesali sebagian perbuatannya. Ia barangkali mulai mengeja kembali sejarah hidupnya, masa lalunya, orang tua, kampung halamannya, upayanya merebut kekuasaan, kejayaannya, mimpi-mimpinya, dan seterusnya. Ambisi telah mengantarkan si anak gurun itu ke puncak kejayaan sekaligus membuatnya terjerumus ke dalam jurang yang paling dalam.

***

E. Perang Humanitarian di Libya?

Setelah melalui proses yang cukup tegang, serangan militer terhadap Libya akhirnya benar-benar dilancarkan. Kekuatan sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat dan Prancis melancarkan serangan udara cepat ke beberapa titik kekuatan Qaddafi di Benghazi dan Tripoli. Menurut pernyataan resmi kedua negara tersebut, operasi pertama itu sukses sesuai dengan skema penyerangan, yaitu melumpuhkan sebagian basis angkatan udara dan menghentikan pasukan Qaddafi masuk ke kota padat penduduk di Benghazi. Sebaliknya, pemerintah Libya di bawah Qaddafi menyatakan, serangan tersebut menelan korban sipil dalam jumlah besar.

● *Intervensi Kemanusiaan*

Sesuai yang dideklarasikan, tujuan perang ini adalah untuk penyelamatan kemanusiaan di Libya dengan cara melemahkan basis militer, terutama angkatan udara pendukung Qaddafi.

Opsi militer yang didasarkan kepada Resolusi DK PBB tentang larangan terbang itu diambil setelah terjadi kebuntuan situasi di Libya yang dikhawatirkan akan menambah jumlah korban dalam skala besar. Berbeda dengan di Irak, Amerika Serikat salah satu pemimpin penyerangan ini, bersikap lebih hati-hati dalam proses pengambilan opsi ini. Obama nampaknya telah belajar dari berbagai kegagalan intervensi Amerika Serikat sebelumnya di kawasan itu.

Obama sejak awal mensyarakatkan "restu" PBB bagi pelaksanaan intervensi terhadap Libya. Bukan hanya dukungan internasional yang dimantapkan, namun juga dukungan regional juga digalang secara intensif. Ofensi dilakukan secara terbatas dan hanya melalui udara, bukan invasi darat sebagaimana dilakukan di Irak atau Afghanistan. Penyerangan ini bahkan juga melibatkan banyak pihak. Di samping negara-negara Eropa dan Amerika, Qatar dan Uni Emirat Arab juga menyatakan kesedian untuk terlibat dalam operasi kendati bentuk keterlibatannya belum diketahui secara pasti. Singkatnya, baik secara moral, dukungan kawasan, maupun yuridis formal, intervensi militer terhadap Libya telah memperoleh pijakan.

Dengan berbagai upaya itu kecaman masyarakat internasional terhadap intervensi ini tidak semasif dan sekuat kecaman terhadap intervensi Amerika Serikat terhadap Irak pada masa Saddam. Masyarakat internasional, bagaimanapun, merasa memikul tanggung jawab untuk turut serta menghentikan ancaman bencana kemanusiaan di Libya. Pilihan yang tersedia memang amat dilematis: membiarkan bencana kemanusiaan terjadi atau menyelamatkan dengan intervensi yang bisa jadi juga mengakibatkan jatuhnya korban sipil dalam jumlah besar. Karenanya, "restu" masyarakat internasional nampaknya tetap disertai dengan kekhawatiran besar. Pasukan sekutu bisa saja bertindak melampau kewenangannya sebagaimana yang

tertuang dalam Resolusi DK PBB No. 1973, namun proses terjadinya perang dan kapan perang itu akan berakhir seringkali sulit diperkirakan secara tepat. Kondisi di lapangan seringkali juga lebih kompleks dari yang diperkirakan. Pada titik di luar dari yang diharapkan, tentara sekutu tentu akan bertindak lebih jauh untuk menjaga martabatnya sebagai negara-negara dengan postur militer yang hebat.

- ***Efektifitas***

Apakah tujuan perang ini akan tercapai? Sekadar catatan, pada fase-fase menjelang penyerangan, pasukan Qaddafi berhasil memperoleh kemenangan beruntun atas tentara pendukung revolusi rakyat dan telah masuk ke beberapa kota padat penduduk. Pada titik itulah pasukan Qaddafi menjadi target serangan udara amat membahayakan.

Penyerangan udara amat memerlukan dukungan informasi intelijen secara detil mengenai peta sasaran, bersifat luas, dan sangat sulit melakukan "seleksi" sasaran. Kesalahan kecil saja, bisa berakibat fatal. Serangan itu bahkan jadi kontra produktif dengan tujuan perang semula. Apalagi, menurut berbagai penuturan sumber di Libya, tentara Qaddafi menjadikan penduduk sipil sebagai tameng hidup.

Apabila benar pernyataan pemerintah Prancis dan Amerika Serikat bahwa penyerangan pertama berhasil sesuai target, maka hal itu cukup membantu untuk melemahkan kekuatan Qaddafi, terutama angkatan udaranya. Akan tetapi, itu saja belumlah cukup. Kekuatan Qaddafi tersebar di berbagai tempat yang sangat mungkin menyatu dengan konsentrasi penduduk. Mereka tentu membawa berbagai senjata *portable* tercanggih yang dimilikinya. Kekuatan udara sekutu tidak mungkin melindungi penduduk dari tentara tersebut tanpa melakukan intervensi darat.

Situasi lebih rumit bisa saja terjadi jika Qaddafi mampu menggalang kekuatan rakyat untuk melakukan perlawanan. Bagaimanapun, sentimen rakyat Libya terhadap Barat sebagai penjajah, terutama Inggris dan Italia, masih amat kental dan memang dipelihara dengan baik selama masa pemerintahan Qaddafi, terutama sebelum tahun 2000. Gejala menguatnya dukungan domestik terhadap Qaddafi sudah kelihatan kendati tidak bisa dipandang secara berlebihan. Jika penggalangan itu benar-benar berhasil maka tujuan perang dipastikan tidak akan tercapai. Bahkan bisa terjadi sebaliknya, yakni jatuhnya korban kemanusiaan dalam skala besar.

Di sisi lain, ada keyakinan kuat bahwa sangat kecil kemungkinannya rakyat Libya bersatu padu di belakang Qaddafi. Qaddafi dan tentaranya sudah terlalu banyak melakukan pembantaian terhadap rakyat Libya demi mempertahankan kekuasaan. Hal itu jelas memperdalam kebencian sebagian besar rakyat Libya terhadap Qaddafi. Terkuaknya sepak terjang anak-anak dan kroni Qaddafi yang "menjarah" harta negara jelas menambah amarah rakyat kepadanya. Pendukung Qaddafi dari kalangan rakyat mungkin tidak lebih dari anggota suku Qaddafa, ditambah sedikit orang yang diuntungkan selama pemerintahan Qaddafi.

Kita berharap perang di Libya segera berakhir, menghindarkan terjadinya bencana kemanusiaan, dan mengantarkan rakyat Libya lebih optimis dalam menatap masa depan.

***

F. Perang Salib Baru?

"Seluruh Mediterania dan Afrika Utara telah menjadi medan perang. Kepentingan setiap negara yang mendukung pasukan Salib kini berada dalam ancaman", "Kita akan bertarung, kita

akan hancurkan konspirator yang bekerjasama dengan Amerika Serikat dan pasukan Salib" demikian penggalan pernyataan Qaddafi menanggapi serangan tentara sekutu terhadap Libya. Qaddafi berulangkali menyatakan kesiapannya untuk melawan serangan itu hingga titik darah penghabisan.

Pada sisi lain, perang antara sekutu dan pendukung Qaddafi telah pecah secara timpang. Pasukan sekutu terdiri dari gabungan pasukan yang sangat terlatih dari Prancis, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada dan didukung dengan peralatan perang yang canggih. Sementara pasukan Qaddafi, kendati masih bersikeras melakukan perlawanan, sudah pincang dan banyak berkurang. Posisi mereka juga terkepung hampir dari semua arah kecuali dari sisi Selatan yang sebagian besar memang berupa padang pasir. Mereka hampir pasti lebih banyak menjadi sasaran serangan daripada sebagai penyerang. Secara mental, mereka juga tidak bisa dikatakan kuat sebab kebrutalan rezim ini telah mengundang kecaman para pemimpin dan masyarakat dunia termasuk berbagai organisasi internasional dan ulama Islam dari berbagai negara. Seorang ulama kharismatik Mesir bahkan justru menfatwakan pembunuhan terhadap Qaddafi sebab kehidupannya membahayakan banyak orang.

- ***Pengalihan Isu***

Pada titik hampir pasti kalah tersebut, Qaddafi seolah-olah secara spontan mengalihkan isu: dari kebrutalan rezim kepada perjuangan melawan kekuatan imperial dan perang agama. Menurutnya, serangan terhadap basis-basis kekuatannya merupakan lonceng dimulainya perang salib baru. Tuduhan konspirasi eksternal semacam itu merupakan "jargon" yang khas di Dunia Arab bahkan Dunia Islam ketika terjadi realitas yang sangat

sulit diterima dan dijelaskan.[3] Karena itu perlawanan terhadap sekutu merupakan bagian dari perjuangan bangsa yang ingin merdeka. Dan ia adalah pemimpin dan pahlawan besarnya. Jika dicermati aktor negara dan posisi pasukan sekilas saja, perang ini memang memiliki kesamaan dengan perang salib pada masa pertengahan (sebagian menyebut akhir masa klasik) tentunya dengan beberapa perbedaan.

Akan tetapi, semangat, tujuan, dan konstelasi pendukung dalam perang ini sama sekali berbeda. Inti persoalan sebagai penyebab perang adalah krisis kemanusiaan akibat kebrutalan rezim Qaddafi terhadap rakyatnya yang menyuarakan aspirasinya secara damai. Jika kebrutalan itu tidak segera dihentikan dengan kekuatan maka bencana kemanusiaan yang lebih besar dikhawatirkan akan terjadi. Oleh karena itu, tujuan perang yang dideklarasikan pun menyatakan mendesaknya penyelamatan kemanusiaan. Jadi, pokok persoalannya bukan agama atau fatwa agama untuk melakukan perang.

Pada titik ini pula dapat dimengerti bahwa dukungan terhadap resolusi DK PBB yang menjadi basis bagi penyerangan ini bukan hanya berasal dari rakyat Libya yang menginginkan

---

3) Martin van Bruinessen, "Yahudi sebagai Simbol dalam Wacana Islam Indonesia Masa Kini" *Journal Teologi Gema*, Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta, No.53/1998, hlm. 113-14. Lihat analisis adanya konspirasi ini dalam deretan buku-buku berikut, Fatkhi Yakan, *al-Alam al-Islamiy wa al-Makaaid al-Dawliyyah Khilal al-Qarn al-Rabi' Asyar al-Hijry*, (Beirut, Muassasah al-Risaalah, 1994), Abdul Hamid al-Matuuliy, *al-Ghazwu al-Fikry wa al-Tayyaaraat al-Mu'aadiyah li al-Islam*, (Alexandria, Maarif, 1986), Mustofa al-Siba'i, *Membongkar Kepalsuan Orientalisme* (pen, Ibnu burdah), (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), Ainur Rofiq Sophiaan, *Tantangan Media Informasi Islam: Antara Profesionalisme dan Dominasi Zionis*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), A.D. El Marzdedeq, *Jaringan Gelap Freemasonry: Sejarah dan Perkembangannya hingga ke Indonesia*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), Mohammad Fahim Amin, *Rahasia Gerakan Freemasonry dan Rotary Club*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1991), Ridwan Saidi and Rizki Ridyasmara, *Fakta dan Data Yahudi di Indonesia: Dulu dan Kini*, (Jakarta: Khalifa, 2006), dan lain-lain.

perubahan dan pasukan Libya penentang Qaddafi yang sempat terdesak, namun juga sebagian besar negara Muslim di Dunia Arab, termasuk para otoritas agama Islam. Keadaan inilah yang membuat Qaddafi gagal meminta dukungan moral dari ulama-ulama kharismatik seperti Aidh al-Qarniy untuk melawan demonstran, kendati anak-anak Qaddafi rela “bersimpuh” kepadanya. Yang diterima Qaddafi justru sebaliknya, yaitu laknat berdasarkan hukum-hukum agama.

- ***Psikologis***

Lontaran-lontaran pernyataan Qaddafi, yang seringkali tampak spontan, agaknya mencerminkan situasi psikologis yang amat tertekan. Jarak antara sesuatu yang ia bayangkan terlalu jauh dari realitas. Selama 40 tahun lebih ia disanjung layaknya dewa. Keberanian rakyat dalam melawannya dan disertai caki maki telah membuatnya tersentak dan tidak mudah menerima realitas itu. Ia melontarkan kata-kata sadis sebagai ekpresi dari kemarahan yang luar biasa. Ia menyebut gerakan protes rakyat kepadanya tak ubahnya keonaran anak-anak muda yang mabuk akibat minuman keras dan zat adiktif semacamnya. Ia pernah juga menyebut gerakan rakyat itu dengan segerombolan gengster yang membuat keonaran tanpa tujuan yang jelas. Pernah pula ia menyebut mereka dengan tikus-tikus yang harus dihabisi, atau gerakan anak muda sebagai antek-antek Usama bin Laden.

Qaddafi sejatinya merupakan salah satu pemimpin Arab yang visioner, namun ambisinya yang meluap-luap untuk menjadi tokoh besar kawasan dan dunia telah menjerumuskannya untuk menggunakan segala cara guna mencapai tujuan itu, termasuk ketika harus menghadapi rakyatnya. Di dunia Arab, kebrutalan seperti yang dilakukan Qaddafi hanya pernah terjadi pada masa Saddam Hussein terhadap suku Kurdi dan Syi’ah.

Karena itu, ia kini harus menerima akibatnya. Kecaman secara luas datang dari berbagai lapis masyarakat, termasuk dari negara-negara mitra dekatnya. Ia bahkan harus menghadapi operasi militer yang melibatkan negara-negara besar dengan legitimasi resolusi PBB, dan dukungan formal negara-negara Arab, serta dukungan moral dari para tokoh agama dan masyarakat internasional. Qaddafi tidak bisa lagi memandang ancaman terhadap dirinya dengan kata-kata serapah dan sadis. Ia sadar tengah menghadapi ancaman besar.

Pada titik itulah, ia menggunakan terminologi yang memang sudah menancap kuat pada pikirannya sejak muda. Perjuangan nasional versus kekuatan kolonial, dan Islam versus Barat Kristen. Namun, hal itu tidak bermakna apa-apa kecuali justru menunjukkan situasi psikologisnya yang sangat marah dan terancam.

***

BAB V

Bahrain dan Teluk: Isu Sektarian, Protes Rakyat, dan Kekuasaan

A. Bahrain: Pluralitas dan Kekuasaan

Dari banyak segi, Bahrain merupakan negeri paling plural dan terbuka dengan keragaman dibandingkan dengan negara-negara Teluk yang lain.[1] Dari segi agama, penduduk negeri itu terdiri dari penganut Islam Syi'ah yang mayoritas, Islam Sunni, Kristen, dan agama-agama yang lain. Dari segi etnis, penduduk Bahrain juga beragam, kendati sebagian besar adalah Arab.

Dari segi politik, Bahrain adalah satu-satunya negara Teluk yang memiliki parlemen dengan sebagian besar anggotanya dipilih melalui pemilu.[2] Saat tulisan ini disusun, pemilu parlemen di Bahrain sedang dilangsungkan, yakni pada Oktober 2010.

---

1) Adapun negara Arab yang sering dipandang paling majemuk dan pernah dipandang sebagai contoh keragaman yang baik adalah Lebanon. Dr. Musthofa al-Faqi, *al-Arab: al-Aslu wa al-shurah*, hlm. 95.

2) Mufid al-Zaydi, "Mu'syiraat al-Tahawwul al-Diymuqrathiy fi al-Bahrain: Min al-Imaaraat ila al-Milkiyyah al-Du stuuriyyah", Jurnal *al-Mustaqbal al-Arabiy*, V. 270, Agustus 2001, hlm.8-19.

Di samping Bahrain, Kuwait juga negara di kawasan Teluk yang memiliki parlemen, namun dari segi rekrutmen dan kewenangannya sangat lemah. Ada pula yang mengatakan bahwa Bahrain merupakan tempat "buangan" orang-orang yang memiliki "orientasi" berbeda di Teluk.

- ***Tribalisme***

Terciptanya sebagian keragaman di Bahrain ternyata tercipta tidak melalui proses yang alamiah dan damai. Bahrain dikuasai oleh Kabilah Ali Khalifah. Kabilah yang berasal dari dari wilayah Qatar ini memperoleh kekuasaan di Bahrain melalui penyerangan terhadap kabilah-kabilah penghuni negeri itu. Kabilah Ali Khalifah pun menjadi minoritas yang berkuasa atas penghuni mayoritas yang lebih dahulu tinggal di sana. Sebelumnya, Kabilah Ali diusir dari Kuwait oleh Kabilah al-Shabbah yang berkuasa di negeri itu hingga sekarang, juga dikarenakan perebutan kekuasaan. Perebutan wilayah melalui peperangan kiranya menjadi "hukum" yang berlaku di antara kabilah-kabilah di kawasan tersebut sejak lama. Oleh karena itu, Abid al-Jabiriy seorang pemikir asal Maroko, menyatakan bahwa masa depan Dunia Arab amat ditentukan oleh kemampuan berbagai kabilah untuk hidup bersama dengan pengertian yang sesungguhnya.[3)]

Dalam perkembangannya, Bahrain di bawah Ali Khalifah berlimpah kemakmuran akibat semburan minyak. Di sisi lain, dinasti Khalifah merupakan minoritas dan pendatang. Mereka nampaknya tidak tenang dengan realitas ketimpangan demografis ini. Praktik pengistimewaan terhadap minoritas Sunni dan peminggiran penduduk Syi'ah secara sistematis telah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan Bahrain. Isu

3) al-Jabiriy, *Wijhatu Nadzar* hlm. 122.

diskriminasi bukan hanya terjadi dalam masalah rekrutmen jabatan strategis, namun juga terjadi hampir di segala bidang termasuk pencarian tempat tinggal, ijin pembangunan rumah, dan mencari pekerjaan. Yang tak kalah penting adalah penataan daerah-daerah baru yang memberi ruang nyaman bagi militer Amerika Serikat, yang dipandang oelh penduduk Syi'ah akan mengancam Iran dan penduduk Syi'ah di seluruh kawasan. Saat ini, kondisi itu diperparah oleh kedatangan tentara "sekutu" Teluk di bawah pimpinan Arab Saudi dengan dalih meng-*counter* "intervensi" Iran di Bahrain melalui gerakan protes rakyat secara besar-besaran. Hal itu tentu dipandang sebagai ancaman besar terhadap penduduk Syi'ah mayoritas.

Kendati tidak menegaskan kebijakannya, dinasti Bahrain juga telah mendorong luapan pendatang Sunni dari Yaman, Suriah, dan Irak, sementara pendatang Syi'ah dari Pakistan di-hambat sedemikian rupa. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan perimbangan demografis kendati untuk itu mereka harus me-nyakiti warga mayoritas.

Tidak berhenti di sini, perlakuan terhadap para pendatang Sunni dipandang jauh lebih baik dibandingkan terhadap pen-duduk asli Bahrain yang Syi'ah. Tidak sedikit dari para pen-datang itu bisa menjadi polisi atau tentara di kerajaan. Hal itu bagi warga Syi'ah merupakan perkara yang hampir mustahil. Sikap para polisi "pendatang" itu umumnya sangat keras ter-hadap penduduk Syi'ah. Oposisi Syi'ah menuding bahwa be-berapa kasus pembunuhan warga Syi'ah dilakukan oleh para polisi tersebut.

● *Kondisi yang Matang*

Diskriminasi sektarian telah menimbulkan ketegangan yang panjang antara penduduk Syi'ah mayoritas dengan pemerintah

negeri itu. Tahun 1970-an hingga 1990-an merupakan tahun-tahun paling represif pemerintahan Bahrain di bawah Raja Isa Al-Khalifah, ayah Raja yang berkuasa saat ini. Korban meninggal, luka akibat penyiksaan, dan penangkapan warga Syi'ah mewarnai protes-protes Syi'ah yang kerapkali pecah pada rentang waktu tersebut.

Dendam itu nampaknya terus terpelihara dan dipelihara kalangan Syi'ah hingga kini kendati raja baru Bahrain sejak tahun 2000, Hamad bin Isa al-Khalifah, telah menggencarkan program reformasi dan rekonsiliasi nasional. Oposisi Syi'ah membuat semacam Komisi Korban Meninggal dan Penyiksaan (*Lajnah al-Dhahaya wa al-Ta'dzib*) yang beranggotakan tokoh-tokoh Syi'ah. Salah satu agenda rutinnya adalah melakukan pawai protes tiap bulan Desember untuk mengenang korban represi pemerintah Bahrain terhadap warga Syi'ah.

Pemerintah Bahrain menuduh bahwa protes-protes itu digerakkan oleh milisi-milisi yang dilatih di Iran. Kemungkinan adanya intervensi Iran memang mudah dimengerti sebab mayoritas penduduk Bahrain menganut Islam Syi'ah dan sejarah hubungan kedua negara itu juga amat erat. Sementara, mayoritas kalangan Syi'ah menilai bahwa Raja Hamad bin Isa al-Khalifah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan reformasi dan rekonsiliasi.

Sikap keras penguasa, dendam yang dipelihara, diskriminasi terhadap mayoritas, ketegangan panjang yang berbau sektarian, dan reformasi yang tidak sungguh-sungguh itu telah menyediakan kondisi yang matang bagi lahirnya protes rakyat dalam skala yang besar. Begitu hawa perubahan berhembus kencang dari Tunisia dan Mesir, Bahrain menjadi negara Teluk pertama yang mengalami pergolakan hebat.

***

B. Revolusi Rakyat atau Intervensi Kemanusiaan?

Dua teori segera mengemuka ketika protes rakyat dalam skala besar pecah di Bahrain. Pertama, seperti biasanya pendukung dinasti Al-Khalifah menuding gerakan itu didalangi oleh anasir-anasir pengkhianat yang memperoleh pelatihan dan dukungan dari Iran. Atas dasar itulah, pasukan GCC di bawah pimpinan Arab Saudi mengirimkan pasukan militernya ke Bahrain dengan dalih untuk melakukan *counter move* terhadap Iran. Kedua, oposisi Syi'ah terutama al-Wifaq menyebut gerakan itu sebagai murni protes rakyat, sama sekali tidak terkait dengan Iran. Revolusi itu menurut mereka juga bukan revolusi Syi'ah sebagaimana banyak dikatakan orang.

- ***Ketegangan Sunni Syi'ah***

Ketegangan antara kelompok Islam Sunni dan Islam Syi'ah memang telah ada di Bahrain, bahkan telah terjadi jauh sebelum negara mengapung di Teluk Persia itu merdeka. Komposisi demografis sekte dan politik di negeri itu menyediakan situasi konfliktual itu. Kalangan Syi'ah merupakan mayoritas namun justru terpinggirkan, sementara kalangan Sunni yang penduduknya hanya sekitar 30 persen di antara mereka menjadi penguasa. Warga Sunni juga memiliki akses seluas-seluasnya ke berbagai sektor strategis. Anomali dan diskriminasi inilah yang menyediakan kondisi bagi lahirnya protes-protes rakyat.

Oleh karena itu, penyebutan gerakan protes tersebut sebagai Syi'ah memang memiliki dasar. Protes tersebut pada mulanya memang dikoordinir oleh kelompok-kelompok oposisi dari kalangan Syi'ah. Protes semacam itu, dengan skala yang lebih kecil, juga sering dilancarkan oposisi Syi'ah sejak 1970-an yang menuntut keadilan dan penghapusan diskriminasi di Bahrain.

Dukungan Iran terhadap protes itu juga mudah dimengerti. Hubungan Iran dengan mayoritas rakyat Bahrain sangat dalam.

Mereka sama-sama penganut Syi'ah kendati ada perbedaan antara keduanya dan sama-sama mendukung revolusi Islam Iran 1979. Dalam protes kali ini, photo pemimpin revolusi Iran Imam Khomenai banyak mewarnai aksi mereka. Jargon-jargon dan pekikan khas Syi'ah juga sangat jelas di antara riuh suara demonstran seperti "Oh Hussein", "Oh Ali" dan sebagainya.

Hubungan warga Syi'ah Bahrain dan pemerintah Iran itu terus menguat paska revolusi Islam Iran yang sekaligus meningkatkan ketegangan hubungan warga Syi'ah dengan rezim Sunni di Bahrain. Warga Syi'ah Bahrain mendukung revolusi Iran yang menumbangkan kekuasaan rezim Shah dukungan Amerika Serikat. Sebaliknya, rezim Bahrain merasa terancam dengan keberhasilan revolusi itu. Lebih mengkhawatirkan lagi, rezim Iran baru dengan terang-terangan menyatakan hendak mengimpor revolusi itu untuk melumpuhkan monarki-monarki despotis di Timur Tengah. Bahrain adalah monarki terdekat dengan Iran. Dengan alasan itu pula, pasukan sekutu GCC (Gulf Countries Council/ *Munadhdhamah al-Duwal al-Khalijiyah*) saat ini mengirim ribuan pasukan ke Bahrain yang menambah kompleksitas ketegangan di kawasan.

Eskalasi ketegangan Iran-Bahrain terus mengalami peningkatan seiring memanasnya hubungan negara-negara Arab termasuk pemerintah Bahrain yang didukung Amerika Serikat dengan Iran. Puncaknya adalah pembukaan wilayah-wilayah baru di Bahrain yang didesain untuk membangun pangkalan militer Amerika Serikat sekaligus meminggirkan warga Syi'ah. Oposisi Syi'ah di Bahrain berteriak sangat keras. Mereka menganggap rezim Bahrain sengaja mengobarkan perang dengan Iran dan hendak menghancurkan seluruh kaum Syi'ah di kawasan. Ketegangan itu tidak mereda bahkan setelah upaya reformasi dan rekonsiliasi ditawarkan oleh Raja Hamad bin Isa al-Khalifah sejak tahun 2000-an.

- ***Era Revolusi***

Namun demikian, penyebutan protres rakyat di Bahrain kali ini sebagai murni revolusi Syi'ah dukungan Iran juga tidak sepenuhnya benar. Rakyat yang turun ke jalan ternyata berasal dari berbagai kalangan termasuk warga Sunni. Partai-partai oposisi non Syi'ah juga terlibat aktif dalam gerakan protes rakyat kali ini. Gerakan ini juga didukung penuh oleh para aktivis pro demokrasi dan hak asasi manusia.

Tujuan dari protes ini berbeda dengan protes-protes Syi'ah sebelumnya. Apabila protes Syi'ah menginginkan reformasi ke arah Bahrain yang lebih berkeadilan maka protes kali ini mengajukan tuntutan perubahan secara fundamental dan menyeluruh. Gerakan protes menuntut turunnya seluruh rezim dari keluarga al-Khalifa sebagaimana yang sedang terjadi di Libya, Yaman, dan negara-negara Arab lain, serta sudah terjadi di Mesir dan Tunisia. Singkatnya, protes di Bahrain memiliki warna berbeda dengan protes Syi'ah sebagaimana yang sering terjadi sebelumnya.

Protes rakyat kali ini lebih mencerminkan suasana revolusi rakyat seperti yang terjadi di negara-negara Arab lain. Singkatnya, memang ada nuansa Syi'ah dalam gerakan perubahan di Bahrain sebab sebagian besar demonstran sebagaimana rakyat Bahrain memang penganut Syi'ah. Akan tetapi, menilik tuntutan dan karakter gerakan, aroma protes di Bahrain kali ini lebih berbau revolusi Tunisia dan Mesir daripada warna Syi'ah.

***

C. Protes Rakyat di Tengah Gelimang Kemakmuran

Jika protes rakyat pecah di negara-negara Teluk terjadi pada enam dekade yang lalu atau sebelumnya, maka orang akan mudah memahami sebab-sebab terjadinya gerakan. Pada masa

itu, penduduk kawasan tersebut hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Mereka menggantungkan mata pencahariannya pada *ri'ayah* (penggembalaan liar) dan sedikit pertanian di oase-oase di tengah gurun yang selalu diperebutkan.[4] Mereka bukan hanya menghadapi kesulitan hidup, namun juga setiap saat survivalnya terancam akibat kerasnya alam dan pergaulan antar kabilah. Namun, protes rakyat saat itu ternyata tidak pernah terjadi. Bahkan, monarki-monarki di tempat itu tetap kokoh di tengah gelombang kudeta militer yang menyapu sebagian besar negara Arab sejak tahun 1952 hingga 1969.

Kini, kawasan gurun di Teluk telah disulap menjadi kota-kota dengan infrastruktur termegah dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas rekreatif termewah di dunia. Para penggembala yang berpindah-pindah untuk mencari sumber air itu kini juga telah menjelma menjadi milyader-milyader kelas dunia. Mereka bahkan menjadikan tenaga-tenaga ahli dari Eropa dan Amerika Serikat sebagai "babunya", apalagi orang-orang dari dunia ketiga seperti Indonesia. Semua itu tidak terlepas dari limpahan minyak di kawasan itu.

Namun, di tengah kemakmuran dan gemerlap kemewahan itu, protes rakyat menuntut perubahan justru terjadi. Gerakan rakyat dalam skala masif telah pecah di Kerajaan Bahrain dan korban meninggal telah melampaui puluhan orang, protes dalam skala sedang namun cukup lama di Kesultanan Oman, dan mulai meluas di Arab Saudi, kendati perkembangan terakhir menunjukan gejala mereda. Tanda-tanda akan lahir gejala protes di Kuwait dan Uni Emirat Arab juga sudah mulai ada. Qatar memang belum menunjukkan hal yang sama, namun negara itu diyakini tidak steril dari gelombang protes rakyat yang melanda hampir seluruh negara Arab.

---

4) Ibnu Burdah, *Studi Dunia Arab*, hlm. 56.

- ***Keterkungkungan***

Keterkungkungan dalam kehidupan politik dan kesenjangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi dalam waktu yang sangat lama,[5] ditengarai sebagai penyebab penting bagi lahirnya bibit-bibit kemarahan rakyat. Di tengah derasnya arus demokratisasi, negara-negara Teluk sedikit sekali membuka saluran aspirasi politik rakyatnya. Dari enam negara petrodollar yang ada di kawasan itu, hanya ada dua negara yang memperbolehkan adanya kehidupan parlemen dan partai politik. Itu pun sangat terbatas sebab sebagian besar anggota parlemen direkrut melalui penunjukan pihak kerajaan.

Tuntutan untuk melakukan perubahan secara gradual baik dari pihak luar maupun lingkaran kekuasaan selama ini hampir tidak memperoleh tanggapan. Sebaliknya, mereka justru sangat represif terhadap aspirasi rakyatnya yang sedikit berbeda dengan kemauan penguasa. Tersumbatnya saluran itu dalam waktu yang lama telah membuat tumpukan sakit hati sebagian rakyatnya. Mereka baru menyadari kekeliruan itu dan mulai bersedia melakukan beberapa perubahan setelah badai kencang revolusi di dunia Arab sepertinya tidak bisa dihentikan lagi.

- ***Kesenjangan Sosial dan Ekonomi***

Kondisi itu diperparah dengan gap antara kehidupan sosial dan ekonomi keluarga penguasa dengan rakyat biasa. Kehidupan rakyat kebanyakan di negara-negara Teluk memang jauh lebih makmur daripada kehidupan rakyat di negara-negara di sekitarnya. Akan tetapi, kekayaan yang luar biasa besar dari

5) Sistem "musyawarah" dengan mekanisme pembentukan formatur pada masa al-Khilafah al-Rasyidah ternyata hanya bertahan sekitar 30 tahun. Setelah itu, "bangsa Arab" kembali pada sistem kesukuan. Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 42-3. atau Abdul Hamid Matuli, *Azmah al-Fikr al-Siyasiy al-Islaamiy*, hlm. 44.

minyak mengalir secara tidak merata. Penumpukan kekayaan secara ekstrem terjadi di tangan keluarga besar kerajaan (trah/Ali/Asyirah) seperti Ali Saud di Arab Saudi, Ali Khalifah di Bahrain, Ali Nahyan di Uni Emirat Arab, Ali al-Shabbah di Kuwait, Ali Tsani di Qatar, dan Ali Said di Oman, padahal sebagian dari mereka tidak cakap, bahkan tidak bekerja. Dampak ikutan terhadap hal itu luar biasa. Kehidupan keluarga besar kerajaan juga berbeda secara ekstrem dari kehidupan rakyat pada umumnya.

Kecemburuan dan sakit hati rakyat kian besar dengan adanya diskriminasi di berbagai bidang antara keluarga penguasa dan rakyat biasa. Dalam bidang hukum misalnya, ada kerajaan di Teluk yang menerapkan syariah Islam secara amat ketat kepada rakyatnya disertai berbagai sanksi berat bagi para pelanggarnya. Namun itu sepertinya tidak berlaku bagi anggota *trah* penguasa. Sebaliknya, di dalam tembok-tembok megah rumah dan istananya mereka menikmati kehidupan bebas sebagaimana di negara-negara Barat. Padahal mereka hidup di tengah-tengah rakyat yang harus mematuhi perberlakuan hukum "agama" secara ketat.

Lambat laun masyarakat Teluk menyadari situasi ini. Peningkatan kesadaran rakyat akan situasi sosial, politik, dan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari peningkatan pendidikan dan adanya akses informasi. Kendati para penguasa berupaya meminimalkan "dampak buruk " pembangunan pendidikan di kawasan itu agar tidak melahirkan sikap kritis masyarakat terhadap kekuasaan otoritarian, hal itu tidak bisa dilakukan secara sempurna. Tetap saja lahir dari mereka tokoh-tokoh yang mampu dan berani melakukan kritik kepada kekuasaan kendati mereka kemudian harus terbuang.

Akses informasi melalui media informasi dan sosial tidak bisa sepenuhnya disumbat, apalagi hampir semua orang di sana

mampu untuk membeli perangkat-perangkat media itu. Inilah salah satu celah yang digunakan para oposisi dari negara-negara Teluk di pengasingan selama ini untuk merongrong kekuasaan otoritarian.

Sejak tahun 1995, pengurangan subsidi di berbagai bidang dan kenaikan harga kebutuhan dasar sedikit banyak juga mempercepat lahirnya gerakan protes rakyat di negara-negara Teluk sekalipun pengaruhnya tidak sebesar di Mesir atau Tunisia. Mereka bagaimanapun masih dalam gelimang kemakmuran jika dibandingkan penduduk di negara-negara dunia ketiga pada umumnya. Namun,rakyat di kawasan itu selama sekitar tiga dedade telah terbiasa hidup "manja" dengan subsidi dan bantuan melimpah dari negara. Mereka bahkan bisa hidup layak tanpa "bekerja". Akibatnya, pengurangan subsidi itu cukup berpengaruh terhadap kondisi dan sikap mereka terhadap penguasa.

Tersumbatnya saluran aspirasi politik, kesenjangan kehidupan sosial dan ekonomi, dan kenaikan harga-harga telah menyediakan situasi dan kondisi yang matang bagi lahirnya bibit protes di kalangan masyarakat Teluk. Karena itu, kawasan yang semula dipandang paling "steril" dari pengaruh luar ini pada akhirnya juga terjangkit virus-virus "revolusi" yang sedang menyebar di dunia Arab lain. Akan berapa lama monarki-monarki itu akan bertahan, menjadi pertanyaan menarik saat ini.

***

D. Masa Depan Monarki-Monarki Teluk

Protes rakyat untuk perubahan di negara-negara Teluk terjadi lebih belakangan jika dibandingkan dengan protes yang terjadi di negara-negara Arab bagian yang lain. Padahal enam

negara Arab yang terletak di wilayah itu semuanya berbentuk monarki, sistem politik yang sekarang dipandang banyak orang sebagai "usang" sehingga perlu perubahan.

Namun, wilayah Arab dengan tingkat pendapatan perkapita penduduk sangat tinggi itu kini sudah terjangkit "virus" protes rakyat. Di Bahrain, gerakan protes telah pecah dalam skala besar terutama di Lingkaran Lu'Luah (Mutiara) dan memakan puluhan korban jiwa. Dalam skala yang lebih kecil dan sporadis namun lebih lama, gerakan protes di Kesultanan Oman juga telah pecah.

Akankah negara-negara Teluk itu akan mampu bertahan dan melestarikan sistem kerajaan di masa sekarang? Apakah kemakmuran dari minyak mampu menahan lahirnya gerakan protes di beberapa negeri kawasan itu, dan meredam aksi protes yang telah terjadi di beberapa negeri yang lain? Atau, sebaliknya mereka akan mengalami nasib yang sama tragis dengan rezim di Tunisia dan Mesir, tumbang di tangan protes rakyatnya sendiri?

- ***Aspirasi Tanpa Saluran***

Kemakmuran yang berlimpah telah mendorong peningkatan taraf pendidikan di negara-negara Teluk. Kendati ada perbedaan antara satu negara dengan yang lain, pemerintah Arab di kawasan itu pada umumnya menghadapi dilema dalam pembangunan pendidikan. Di satu sisi, mereka menginginkan agar sumber daya manusia di negara-negara itu mengalami kemajuan besar dengan penciptaan sarana prasarana pendidikan yang hebat. Pada sisi yang lain, mereka tidak menginginkan rakyat mereka bersikap kritis terhadap rezim dan realitas politik.

Kendatif sangat selektif dan berhati-hati dalam pembangunan pendidikan, peningkatan kesadaran untuk berpartisipasi dalam

pembangunan dikalangan rakyat jelas meningkat secara signifikan termasuk dalam bidang politik. Apalagi, kemampuan ekonomi negeri itu amat mendukung bagi rakyatnya untuk mengakses sarana-sarana informasi.

Menurut Michail Hudson, berkobarnya perlawanan rakyat di negara-negara Arab lain dapat berarti pupusnya legitimasi kekuasaan otoritarian di dunia Arab termasuk di negara-negara Teluk. Jika pendapat ini diikuti maka sistem monarki absolut itu sudah tidak memiliki masa depan lagi di dunia Arab.

Kejatuhan mereka hanya persoalan waktu dan momentum. Sebab bagaimanapun dinasti-dinasti yang memiliki kekayaan luar biasa itu akan mati-matian mempertahankan kekuasaan dan survivalnya dengan segala cara. Meredanya protes rakyat di Arab Saudi kendati mungkin hanya sementara menunjukkan betapa keras upaya yang mereka lakukan untuk mengantisipasi protes rakyat dan betapa besar "tenaga dan biaya" yang mereka siapkan untuk meredam protes yang telah pecah. Namun, halite justru menjadi bukti bahwa survival monarki tengah dalam ancaman yang serius.

***

BAB VI

Revolusi Yaman

A. Revolusi Rakyat atau Partai Oposisi?

Dari segi apa pun, rezim Ali Abdullah Saleh di Yaman lebih lemah bila dibandingkan dengan rezim Mubarak di Mesir. Rezim Mubarak bahkan dikenal sebagai patron dari rezim Ali. Faktanya, Mubarak tumbang dihantam oleh badai revolusi rakyat yang berhembus kencang di hampir seluruh negara Arab. Tak pelak, Rezim Yaman menghadapi pula puncak gelombang protes rakyat serupa yang semakin intensif, meluas, dan memakan ratusan korban jiwa serta kerugian-kerugian lainnya.

Celakanya, protes itu pecah di saat Yaman menghadapi tumpukan persoalan yang sangat kompleks. Akankah rezim Ali akan menjadi penguasa militeristik ketiga yang tumbang di tangan revolusi rakyat Arab, atau ia akan mampu bertahan setidaknya sampai tahun 2013 saat masa jabatannya berakhir sebagaimana yang diutarakannya?

- ***Perpecahan Opisisi dan Reformasi Segera***

Awalnya, karakter protes di Yaman berbeda dengan yang terjadi di Mesir dan Tunisia. Protes itu diorganisir oleh beberapa partai oposisi –terutama oleh partai *al-Tajammu' al-Yamaniy li al-Ishlah* (*Yemeni Congregation for Reform*)– untuk kepentingan pemilu parlemen. Karena itu, berbeda dari gerakan di Tunisia dan Mesir yang awalnya *less leadership* dan cenderung spontan, gerakan protes di Yaman memiliki kepemimpinan yang jelas dan lebih terorganisir.

Namun kemudian, gerakan protes itu berkembang dan meluas seiring berhembusnya hawa revolusi dari Tunisia dan Mesir. Protes bukan hanya dipimpin oleh para pimpinan partai oposisi, namun juga dikendalikan oleh para aktivis demokrasi dan hak asasi manusia. Kedua kelompok ini kemudian memiliki perbedaan dalam tujuan, strategi, dan agenda perjuangan. Perbedaan itu segera nampak ke permukaan setelah Presiden Ali menyampaikan beberapa program reformasi dan tawaran dialog nasional guna meredam gerakan protes. Lantaran takut akan nasib yang serupa dengan Mubarak dan Ben Ali, pada awal-awal gerakan itu Ali Abdullah Saleh buru-buru meneriakkan janji kepada rakyat Yaman bahwa ia tidak akan mencalonkan lagi pada pemilu 2013, membatalkan proses amandemen konstitusi yang memberi peluang kepadanya berkuasa seumur hidup, dan tidak akan mewariskan kekuasaan kepada anaknya. Janji itu juga disertai dengan beberapa program pro-rakyat miskin.

Para pemimpin partai menerima tawaran sang presiden sebab hal itu sesuai dengan tujuan dari protes mereka. Mereka menekankan perubahan secara evolutif dan menolak cara perubahan ala Tunisia dan Mesir. Sementara para aktivis demokrasi dan HAM menginginkan hal sebaliknya. Menurut mereka, diktaktor yang telah mencengkeram negeri miskin selama 33 tahun

itu harus dijatuhkan melalui revolusi sebagaimana Mubarak dan Ben Ali.

Sikap para pemimpin partai nampaknya diikuti oleh sebagian demonstran. Untuk beberapa waktu, demonstrasi mengalami penurunan. Namun sebagian yang lain terus melanjutkan aksi protes itu. Keberhasilan revolusi Mesir menjatuhkan Mubarak melecut jumlah dan intensitas demonstrasi. Wilayah aksi juga terus meluas, bukan hanya di San'a (Sanaa menurut saya kurang tepat) dan Adn, namun juga ke berbagai wilayah lain di Utara maupun Selatan. Protes masif dan merata telah menyulut berbagai aksi kekerasan aparat terhadap rakyatnya. Hingga titik ini, kemenangan berada di tangan aktivis demokrasi dan HAM, yang berarti ancaman serius bagi *survival* rezim Yaman.

B. Tantangan terhadap Keutuhan Yaman

Yaman bukan hanya menghadapi rendahnya kualitas hidup rakyat secara ekstrem hampir di semua bidang, namun juga keutuhan dan keamanan negara. Pemberontakan kelompok bersenjata Syi'ah Houthi di Utara telah lama pecah. Gerakan yang didukung oleh Iran itu selalu memberikan perlawanan sengit terhadap tentara Yaman dan hingga saat ini belum bisa dipadamkan.

Di Selatan, "dikhianatinya" semangat unifikasi Yaman tahun 1990 telah mengobarkan gerakan separatis Yaman Selatan, *al-harakah al-yamaniyyah al-janubiyyah*. Gerakan bersenjata itu bertujuan menghidupkan kembali Negara Yaman Selatan (*People's Democratic Republic of Yemen*) yang pernah ada. Kini, gerakan ini mengorganisir diri dalam berbagai aksi protes menuntut pemisahan diri di kota-kota Selatan bersamaan dengan gelombang protes menuntut pengunduran diri Ali Abdullah Saleh di wilayah Utara.

Yang tidak kalah penting, Yaman juga menghadapi gerakan radikal al-Qaida di bawah pimpinan Bin Laden. Kendati memperoleh dukungan Amerika Serikat dalam hal ini, pemerintah Yaman nampak *kethéthéran* dalam menghadapi militansi gerakan radikal ini. Yaman merupakan wilayah yang khusus bagi al-Qaida. Paling tidak, keluarga Bin Laden berasal dari wilayah negeri ini.

Mulai munculnya peran al-Qaida dalam aksi massa telah menyulut bentrok bersenjata antara pemrotes dan aparat keamanan, sebuah kondisi yang dikhawatirkan dapat mendorong Yaman ke arah perang saudara sebagaimana terjadi di Libya. Kekhawatiran itu semakin beralasan mengingat fanatisme suku di Yaman masih sangat kuat, baik di kalangan pendukung maupun penentang rezim Ali sebagaimana yang terjadi di Libya. Bagaimanapun, fanatisme suku (*ashabiyyah qabaliyyah*) sangat sulit dieliminer dalam kondisi apapun, sebab itu merupakan dorongan natural setiap manusia yang dipelihara dengan baik dalam kultur dan masyarakat Arab, hingga sekarang.[1)]

Di tengah-tengah berbagai persoalan yang membelit Yaman inilah, rezim Ali harus menghadapi badai revolusi yang menuntutnya enyah dari negeri tersebut. Tidak mudah untuk memprediksi apakah rezim Yaman akan mampu bertahan atau tidak. Yang jelas, persoalan yang dihadapi rezim Yaman jauh lebih kompleks dibandingkan dengan rezim Mesir dan Tunisia.

***

1) Muhammad Abid al-Jabiri, *Fikr Ibnu Khaldun: Al-Ashabiyyah wa al-Dawlah: Maalim Nadzariyyah Khalduniyyah Fi al-Taarikh al-Islamiy*, (Beirut: Markaz al-Diraasaat al-Wahdah al-Arabiyyah, 1994), hlm. 171.

BAB VII

Terpecahnya Sudan: Sisi Lain Masa Revolusi

A. Solusi Dua Sudan

Lahirnya negara baru Sudan Selatan sudah tidak terbendung lagi. Penghitungan hasil referendum telah menunjukkan kemenangan pihak pro-kemerdekaan (*infishal*). Di sisi lain, gayung bersambut, Pemerintah Sudan Utara juga menunjukkan gelagat baik untuk menerima keputusan rakyat Sudan Selatan. Negara Arab dan Afrika terbesar secara geografis itu pun terbelah menjadi dua negara, Utara dan Selatan. Mayoritas penduduk Utara adalah Muslim etnis Arab-Nubian, sedangkan yang di Selatan adalah Kristiani dan animis beretnis Afrika.

• *Jalan Terbaik*

Pemisahan diri Sudan Selatan merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang mendera hubungan kedua masyarakat Sudan selama lebih dari setengah abad. Kesatuan suatu negara tentu amat penting dipelihara dan dibela. Akan tetapi, hal itu bukanlah segala-galanya. Negara bukanlah ber-

hala yang selalu meminta pengorbanan darah dan nyawa anak bangsanya demi keutuhannya. Tujuan pendirian sebuah negara adalah untuk manusia, kesejahteraan anak bangsanya. Oleh karena itu, kesatuan negara Sudan tentunya tidak harus dipertahankan secara paksa dengan mengorbankan ratusan ribu nyawa tak berdosa dan penderitaan panjang rakyat sebagaimana yang terjadi selama ini.

Hilangnya satu nyawa berarti kerugian yang tak ternilai. Nyawa adalah karya Tuhan. Ketika ia hilang maka tidak ada satu pun manusia yang mampu menggantinya. Seluruh hasil peradaban karya manusia sejak dulu hingga sekarang belum sebanding dengan nilai satu nyawa. Karena itu, nyawa menurut Badruddin Hassun adalah sakral, suci. Siapapun tidak berhak mengambilnya kecuali Yang Mampu Membuatnya. Terwujudnya dua Sudan apabila bertujuan untuk menghindari lebih banyak lagi nyawa melayang, maka itu adalah perjuangan besar untuk kemanusiaan.

Sejak awal, penggabungan dua Sudan memang dipaksakan. Dengan perbedaan dalam banyak hal dan secara geografis terkonsentrasi di wilayah yang berbeda, penggabungan keduanya diciptakan oleh pihak eksternal. Tentunya, hal itu dilakukan untuk kepentingan pihak tersebut. Rakyat Sudan sejak semula merasa berkeberatan dengan hal itu. Bukan karena mereka adalah orang-orang yang yang tidak siap untuk bersanding dengan orang yang berbeda dalam sebuah negara, namun penggabungan itu sama sekali bukan kehendak mereka.

Kebersamaan antara keduanya bagaimanapun telah berlangsung hampir enam dekade. Usaha-usaha untuk mengatasi perbedaan terus diupayakan. Namun, dari kebersamaan yang panjang itu mereka justru memahami bahwa mereka sebaiknya cukup bertetangga saja, bukan hidup dalam satu "rumah tangga" negara. Sekali lagi, ini bukan karena mereka miskin ke-

arifan, akan tetapi pemaksaan politik dan ambisi kekuasaan dari sebagian pemimpinnya telah melahirkan kompleksitas masalah yang amat merugikan.

Terwujudnya dua negara Sudan diharapkan dapat menghentikan pertikaian yang sudah terlalu banyak menelan korban, sekaligus menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan aliran Sunai Nil ini. Lebih jauh lagi, dua negara itu diharapkan memulai lembaran baru, menata kembali kehidupannya masing-masing, membangun hubungan pertetanggaan yang baik, dan mendorong kerjasama yang produktif dan berkeadilan sehingga keputusan politik ini benar-benar membawa kemaslahatan dan kebaikan bersama. Itulah harapan sebagian besar kalangan, termasuk yang dikatakan dua pemimpin Utara dan Selatan, yaitu Umar al-Basyir dan Salva Kiir.

B. Kompleksitas Masa Depan Dua Sudan

Melalui referendum, warga Sudan Selatan telah menentukan masa depannya. Hampir seluruh warga memberikan suara memilih *infishal*, yakni berpisah dari Sudan Utara dan membangun negara Sudan Selatan yang terpisah.

Hasil referendum itu diharapkan menjadi solusi untuk mengakhiri konflik bersenjata antara pemerintah Sudan dengan *al-Harakah al-Sya'biyyah li al-Tahrir al-Sudan* (Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan/ SPLM) yang telah berlangsung sejak 1983, bahkan secara sporadik telah berlangsung sejak awal kemerdekaan Sudan (1956). Semua pihak termasuk Presiden Sudan Umar al-Basyir dan Pemegang Otoritas Otonomi Selatan Salva Kiir menyatakan harapannya agar hasil referendum itu dapat membawa kedua negeri lebih stabil, aman, dan makmur. Namun demikian, harapan itu tidak akan dapat diwujudkan dengan mudah dan tanpa tantangan. Kompleksitas persoalan

di lapangan rentan menjerumuskan kedua negeri itu kepada situasi yang mengkhawatirkan.

Pertama, persoalan intra dan antar kedua negara itu. Perjanjian 2005 yang diklaim komprehensif ternyata belum membahas sekitar 20 persen perbatasan jika negeri itu dibagi menjadi dua. Perbatasan yang telah disepakati sekalipun seringkali masih menimbulkan konflik antar negara akibat perbedaan tafsir dan implementasinya di lapangan sebagaimana yang terjadi antar negara-negara Teluk, Yaman, dan Sudan-Mesir, apalagi jika perbatasan itu belum memperoleh kesepakatan.

Persoalan ini rawan menjadi pemicu konflik, sebab kedua negara itu tidak memiliki perbatasan alamiah yang jelas dan tegas seperti laut atau pegunungan. Apalagi perbatasan itu menyangkut beberapa kota penting seperti Abye. Padahal perbatasan darat itu membentang sangat luas, dari ujung Timur hingga ujung Barat dari wilayah kedua negara.

Persoalan pembangunan ekonomi dan minyak juga akan menjadi masalah serius. Sebagian besar ladang minyak Sudan berada di wilayah Selatan, sementara modernisasi wilayah Utara, terutama Khourtum dan sekitarnya, tidak bisa dilepaskan dari hasil minyak ini. Para pejabat Sudan Utara berulangkali menyatakan kesiapannya dengan terpisahnya Sudan Selatan. Hal ini terutama terkait dengan penemuan tambang emas dan sumber bumi lain di wilayah Utara. Namun ketergantungan Utara terhadap minyak Selatan selama ini sulit dipungkiri.

Bagi Sudan Selatan, pemisahan dari Utara tidak serta merta membawa kemakmuran sebab selama ini pengelola industri minyak kebanyakan adalah orang-orang Utara. Jalur pengapalan, sebagian pengolahan, dan distribusi minyak juga melalui Utara. Praktis, wilayah Sudan Selatan menjadi daratan yang "terkunci" (*landlocked*). Artinya, tidak memiliki akses laut yang sangat diperlukan bagi jalur pengkapalan hasil minyak.

Untuk membangun industri minyaknya, Selatan memerlukan waktu yang panjang, kerjasama dengan berbagai pihak, dan investasi dalam skala besar.

Dalam skala yang lebih luas, persoalan pembagian aset dan hutang tentu menjadi masalah yang tidak sederhana. Jika negara baru Sudan Selatan tidak mampu menjaga stabilitas, konflik politik internal antar suku atau antar kelompok bersenjata (bekas milisi) bisa muncul ke permukaan sewaktu-waktu.

Persoalan migrasi warga di antara dua wilayah juga merupakan masalah yang serius. Sudan telah lama menjadi satu kesatuan unit politik meski awalnya dicapai melalui jalan paksaan oleh penjajah Barat sehingga migrasi penduduk antar-wilayah juga telah berlangsung lama. Intensitas migrasi itu menguat paska tercapainya stabilitas relatif paska perdamaian 2005. Jadi, banyak dari warga Utara yang beretnis Arab beragama Islam yang telah lama menetap di Selatan. Demikian pula warga Selatan yang beretnis Afrika dan beragama Kristen atau animis, banyak yang tinggal di Utara.

Migrasi ini ternyata tidak melahirkan akulturasi yang berpengaruh terhadap politik nasional. Yang terjadi justru sebaliknya, setiap kali terjadi peristiwa politik yang menyangkut persoalan Utara-Selatan, penduduk dari bagian lain seringkali menjadi sasaran kemarahan. Paska referendum, pergerakan penduduk dalam skala besar untuk kembali ke daerah asalnya mulai menimbulkan banyak persoalan baik sosial, ekonomi, dan keamanan. Gelombang mobilitas penduduk itu kemungkinan semakin besar usai diketahuinya hasil akhir referendum.

Hubungan antar kelompok, baik di Utara maupun Selatan, diprediksi akan lebih mengkhawatirkan ketimbang hubungan "kedua negara" yang telah benar-benar letih dengan perang dengan berbagai akibatnya. Pamor Presiden al-Basyir di Utara jelas akan menurun jika Selatan benar-benar merdeka, ter-

lebih lagi di mata pengikut ideologi Pan Arabisme. Ia juga tidak memiliki dukungan internasional yang memadai kecuali beberapa aktor di kawasan seperti Arab Saudi dan Libya. Mereka pun sedang menghadapi gelombang revolusi yang berhembus kencang dari Tunisia, yang mungkin juga akan menggoyang kekuasaan al-Basyir.

Hubungan konfliktual antara al-Basyir dan Dr. Hasan Turabi –pemimpin *Hizb al-Mu'tamar al-Sya'biy* (Partai Kongres Bangsa)– jelas menjadi hambatan bagi kesolidan Utara. Apalagi, pemimpin yang dikenal sebagai intelektual besar dan berpengaruh itu kembali ditangkap oleh pasukan Sudan setelah beberapa lama menghirup udara kebebasan.

Demikian pula di Selatan, kendati mereka tidak banyak terbelah oleh persoalan ideologi, namun hubungan fanatisme antar suku dan kelompok milisi tidak bisa diremehkan. Tokoh yang menyatukan mereka, yakni John Garang, telah tiada. Dalam kondisi negara masih lemah, kontestasi antar suku yang selama ini dapat diredam akibat adanya tujuan dan musuh bersama, sangat mungkin muncul kembali ke permukaan ketika musuh bersama sudah tidak ada dan tujuan telah tercapai. Dan juga perlu diingat, dari sekitar 8 juta warga di Selatan, ada sekitar satu juta warga Muslim dan Arab yang tinggal di sana.

Kedua, persoalan regional sekitar Sudan. Mesir merupakan negara yang menaruh perhatian sangat besar terhadap Referendum Penentuan Sudan Selatan (*al-Istifta' al-Mashiry*). Air sungai Nil merupakan perhatian pokok negara yang banyak bergantung dari suplai sungai yang juga melewati Sudan itu.[1)]

1) Persoalan sumber air bukan hanya merupakan salah satu persoalan paling mengkhawatirkan bagi masa depan hubungan antar negara Arab, dan antar negara Arab dan Israel, namun juga hubungan negara Arab dengan Turki. Lihat ulasan tentang hal ini dalam Dr. Jalal Abdullah Miqwadh, "Miyah al-Furat wa al-Ilaqah al-Arabiyyah-Al-Turkiyyah", Jurnal Syu'un Arabiyyah: April 1991:65, hlm. 131.

Selama ini, tensi hubungan Mesir (negara hilir) dengan Sudan dan Ethiopia sebagai negara hulu cenderung naik, terutama paska pencanangan pembangunan pertanian besar-besaran di Ethopia yang didukung investasi Israel. Lahirnya negara baru jelas membuat khawatir Kairo akan jaminan suplai air Nil di masa akan datang. Sebab, naga-naganya dukungan investasi Amerika Serikat, Eropa dan Israel ke negeri itu, jika merdeka, akan kian deras. Hal itu berarti peningkatan pemanfaatan air Nil di hulu, sebagaimana di Ethopia, akan mengurangi suplai air di hilir.

Terpisahnya Sudan Selatan juga berarti berkurangnya Front Arab (Liga Arab) dalam konteks pertetanggaannya dengan negara-negara etnis Afrika. Jelas, politik luar negeri Sudan Selatan kelak akan berorientasi kepada Afrika, bukan kepada negara-negara Arab. Hal ini tentu berpengaruh kepada perilaku politik luar negeri negara-negara di sekitar Sudan yang selama ini "terombang-ambing" antara pilihan condong kepada Arab atau kepada Afrika. Negara-negara beretnis Afrika mendukung penuh pemisahan Sudan, sedangkan negara-negara Arab selama ini mendukung Presiden al-Basyir mempertahankan kesatuan Sudan. Namun, setelah mengetahui hasil akhir referendum, negara-negara Arab tampaknya tidak bisa berbuat banyak. Campur tangan terlalu jauh terhadap Sudan hanya akan menyeret pada terbentuknya front konflik baru antara Arab dan etnis Afrika yang bisa menambah buruk situasi di kawasan.

Persoalan yang agak rumit dalam konteks ini adalah justru hubungan Arab-Iran dan Arab-Israel. Israel yang sulit diterima negara-negara Arab –termasuk yang sudah berdamai dengannya– berupaya mendekat kepada negara-negara Afrika. Ini sangat penting untuk memperoleh sekutu kawasan. Apalagi rezim Mesir yang merupakan sekutu utama Israel di kawasan tumbang oleh gerakan rakyat. Kelahiran negara baru yang

tidak berorientasi pada Islam maupun Arab ini jelas merupakan peluang berharga bagi Israel.

Bagi Sudan Utara atau Mesir, dukungan itu bisa membawa persoalan serius menyangkut air sungai Nil ataupun hubungan mereka dengan negara baru itu. Persoalan air Nil bagi Mesir dan Sudan Utara adalah persoalan hidup-mati. Dan ini justru menjadi nilai strategis bagi Israel dalam menaikkan daya tawarnya di kawasan, terutama dalam menghadapi beberapa negara Arab yang telah lama menandatangani perdamaian dengannya namun enggan bekerjasama lebih jauh dan kongkret dengan negara Yahudi itu.

Keterlibatan Iran dalam politik domestik Sudan Utara mungkin akan terjadi. Persepsi negara-negara Arab dalam memandang sumber ancaman dari Taheran kini jauh lebih besar dibandingkan dari Tel Aviv. Dukungan Arab diberikan kepada Presiden al-Basyir dan dukungan Iran mengalir kepada Front Islamis. Sudan –jika tidak berhasil menjaga stabilitas– tidak mustahil bisa terjerumus menjadi Irak baru, yaitu menjadi ajang konflik *proxy* antara negara-negara Arab berpengaruh versus Iran.

***

BAB VIII

Faktor Iran

A. Revolusi Arab dan Ambisi Iran

Tidak mengejutkan apabila Iran memberikan dukungan moral secara besar-besaran terhadap upaya rakyat Tunisia dan Mesir untuk menjatuhkan rezim Ben Ali dan Mubarak di Mesir dan Tunisia. Dua rezim, ini terutama yang terakhir, merupakan "musuh" terbesar Iran di kawasan. Kini, Iran berupaya keras mendorong agar pergantian rezim di Mesir dapat merubah orientasi luar negeri negara tersebut baik di kawasan maupun di fora internasional. Kalaupun tidak menjadi sekutu dekat Iran, rezim baru Mesir diharapkan menjauh dari orbit Amerika Serikat dan Israel.[1)]

Iran juga mendukung perjuangan rakyat Yordania, Aljazair, Bahrain, Arab Saudi, dan beberapa negara Arab lain untuk men-

1) Aktivisme Iran untuk perubahan di kawasan memang telah berlangsung sangat lama bahkan bisa dikatakan menjadi orientasi politik luar negerinya, lihat Syirin Syamsuddin, "Iran, al-Islam wa al-Dimuqrathiyyah: Siyaasatu Iraadat al-Taghyiir" (timbangan buku), jurnal *al-Mustaqbalal-Arabiy*, V. 270, Agustus 2001, hlm. 201-4.

dorong perubahan di masing-masing negara tersebut. Dukungan Iran terhadap rakyat Bahrain yang Syi'ah terlihat sangat besar dan menjurus kepada adanya intervensi. Tidak berlebihan apabila ada pejabat di pemerintahan Bahrain menyatakan bahwa gerakan rakyat di Bahrain tidak lain adalah gerakan Syi'ah atas campur tangan Iran.

Dukungan luar biasa juga akan diberikan Iran terhadap perjuangan rakyat pro perubahan di Arab Saudi. Gerakan protes dalam skala terbatas telah pecah di Ibukota Riyadh dan Qathif. Rezim Iran memiliki rivalitas luar biasa di hampir semua bidang dengan rezim Ali Saud yang berkuasa di Arab Saudi, baik dalam hal aliran keagamaan, perebutan pengaruh di Dunia Islam dan Timur Tengah, maupun orientasi terhadap Amerika Serikat dan Barat. Yang terakhir sepertinya menjadi faktor terpenting dari rivalitas keduanya, sekaligus membentuk polarisasi negara-negara Timur Tengah selama ini.

- ***Klaim Pengaruh***

Pernyataan para pejabat tinggi Iran menunjukkan bahwa negeri itu tengah melakukan upaya diplomasi yang gencar dan intensif terkait dengan gelombang revolusi di negara-negara Arab. Pemerintah Iran juga mengkoordinir demonstrasi besar-besaran di negaranya untuk mendukung perjuangan rakyat Mesir pada detik-detik yang menentukan, sekaligus sebagai peringatan keberhasilan Revolusi Islam Iran 1979.

Penggabungan dua hal itu, dukungan kepada Revolusi Mesir dan peringatan Revolusi Iran, bukanlah tanpa maksud. Para pemimpin Iran –termasuk pemegang otoritas *velayat al-faqiih*, Ali Khomenai– mengklaim bahwa revolusi yang tengah berhembus kencang di negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi yang menjadi musuh "historik" Iran, terinspirasi oleh keberhasilan Revolusi Islam Iran. Televisi internasional

pemerintah Iran seperti *Press TV* dan *al-Alam* pernah berhari-hari menyandingkan peristiwa di Mesir (*live*) dengan rekaman peristiwa Revolusi Iran 1979. Mereka secara berlebihan – hingga paska gerakan di Mesir tersebut– bahwa revolusi Melati yang melanda dunia Arab sekarang sesungguhnya adalah anak kandung dari revolusi Iran.

Semangat dan sasaran dari revolusi ini memang memiliki kesamaan dengan revolusi Iran. Semangat terpenting dari keduanya adalah melakukan perubahan secara fundamental terhadap tatanan politik di Timur Tengah. Sasaran keduanya adalah rezim represif dan korup. Sesumbar rezim Iran sejak keberhasilan revolusinya juga demikian, akan menebar semangat revolusi itu untuk merontokkan monarki-monarki despotis di Timur Tengah.

Semangat itu memiliki kesamaan dengan karakter revolusi yang tengah melanda negara-negara Arab saat ini. Akan tetapi faktanya, hingga 30 tahun paska revolusi Iran tidak ada satu pun monarki Timur Tengah yang jatuh, kendati Iran secara gigih memberikan dukungan terhadap gerakan-gerakan "Islam" untuk menentang rezim di berbagai negara Arab. "Kegagalan" untuk mengimpor virus revolusi ini nampaknya membuat Iran sangat berambisi mengklaim dan menarik gelombang revolusi sekarang ini ke dalam orbit pengaruhnya.

● *Berbeda*

Namun, di samping kesamaan tujuan dan sasaran, Revolusi Iran memiliki banyak perbedaan dengan revolusi yang tengah melanda sebagian besar negara Arab saat ini. Perbedaan yang terpenting terletak pada tujuan paska keberhasilan menjatuhkan rezim. Yang dominan dalam kelompok-kelompok revolusioner di Iran pada masa itu adalah menginginkan tatanan politik di

negeri itu didasarkan kepada Islam Syi'ah dan dipimpin oleh otoritas agama. Kendati demikian, kelompok revolusioner Iran yang tidak setuju dengan hal itu juga tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, revolusi yang terjadi di Tunisia dan Mesir, dan yang tengah melanda hampir seluruh negara Arab yang lain sama sekali tidak menginginkan hal yang serupa dengan Iran. Secara umum, mereka bukan hanya "alergi" dengan warna Syi'ah, tetapi juga tidak menginginkan lahirnya negara agama.

Perbedaan lainnya adalah mengenai kepemimpinan. Revolusi Iran memiliki pemimpin yang jelas, baik pada masa inkubasi maupun pada masa pecahnya gerakan. Para intelektual-agamawan seperti Ali Syariati merupakan orang-orang yang telah berhasil membalikkan logika rezim berkuasa dan menanamkan pandangan baru yang berbeda. Imam Khomenai kemudian berhasil mengubah pandangan yang sudah menjadi "*general belief*" di kalangan rakyat Iran itu menjadi slogan-slogan gerakan yang mendorong aksi massa.

Revolusi Mesir dan Tunisia tidak dipimpin oleh agamawan, bahkan gerakan itu pada mulanya "tidak memiliki" kepemimpinan (*less leadership*) dan miskin organisasi. Keyakinan perlunya melakukan perubahan ditebar oleh, dari, dan kepada anak-anak muda melalui media informasi dan media sosial. "Rapat-rapat" para aktivis dan mobilisasi gerakan juga dilakukan melalui media yang sama.

Karena itu tidak berlebihan apabila bunyi beberapa spanduk demonstran di Tahrir Kairo dan pernyataan dari para aktivis paska jatuhnya Mubarak meminta Iran tidak "merampas" revolusi yang telah mereka perjuangkan dan meminta pemimpin Iran untuk membiarkan revolusi itu menjadi milik pemuda dan bangsa Mesir.

***

B. Berebut Kepeloporan Revolusi Arab

Secara mental, revolusi rakyat di negara-negara Arab telah memperoleh kemenangan. Sangat mungkin, kemenangan itu tidak lama lagi menjadi kenyataan. Era baru di dunia Arab sudah menjelang, sebuah era yang pondasi-pondasinya dibangun di atas hasil gerakan rakyat yang disebut revolusi.

Jika revolusi militer yang menyapu dunia Arab pada 1952-69 melahirkan pemimpin besar Arab Gamal Abdul Naseer, dan setelah meninggalnya diperebutkan antara Muammar Qaddafi, Hafidh Asad, Anwar Saddad, bahkan Saddam Hussein, maka revolusi kali ini nampaknya melahirkan bentuk pemimpin yang berbeda dan juga mulai diperebutkan.

- ***Tunisia, Mesir, atau Iran***

Selama ini, yang dimaksud dengan pemimpin Arab selalu personal, individu yang dipandang menyatukan perasaan bangsa Arab yang terpecah menjadi lebih dari 20 negara. Mereka adalah pemimpin politik atau tokoh gerakan rakyat.

Sekarang perebutan nampaknya belum terjadi antar individu pemimpin dari negara-negara Arab, namun yang terjadi adalah kontestasi antar bangsa. Bangsa-bangsa Arab berebut status kepeloporan dalam proses revolusi, masing-masing mengklaim sebagai penanam saham terbesar bagi kelahiran revolusi yang melanda hampir seluruh negara Arab saat ini.

Opini yang berkembang di Tunisia, misalnya, cenderung berpandangan bahwa rakyat Tunisia adalah pelopor gerakan rakyat untuk perubahan kali ini. Hal ini tentu dapat dipahami sebab gerakan protes memang pertama kali pecah di negeri itu, tepatnya di kota Bouazizi. Di negeri bantaran laut Meditarian ini pula gerakan rakyat pertama kali mampu meruntuhkan rezim diktaktor.

Keberhasilan itu memberikan inspirasi bagi rakyat Arab di negara-negara lain, termasuk Mesir, Libya, Yaman dan yang lain untuk melakukan hal serupa. Apalagi, rakyat di negara-negara itu menghadapi tumpukan persoalan yang relatif sama, dan selama ini seolah tidak memiliki jalan pemecahan atas persoalan yang membelit mereka. Gerakan di Tunisia lantas menjadi model bagi gerakan-gerakan rakyat berikutnya.

Hal itu sesungguhnya keluar dari kebiasaan sejarah Arab. Tunisia adalah negara kecil dan kurang diperhitungkan dalam konstalasi negara-negara di kawasan. Negara itu juga tidak memiliki tradisi menjadi pemimpin Arab.

Oleh karena itu, bangsa Mesir yang secara tradisi memegang tampuk kepemimpinan Arab berpandangan lain. Mereka memandang bahwa rakyat Mesir merupakan pelopor gerakan rakyat kali ini. Mental sebagai bangsa pemimpin di kawasan nampaknya membuat mereka tidak mudah mengakui kenyataan bahwa gerakan yang mereka lakukan, bagaimanapun, didahului oleh rakyat Tunisia. Pecahnya revolusi militer 1950an menunjukkan urutan yang sebaliknya, yaitu Mesir yang pertama dan Tunisia kedua.

Mereka berpandangan bahwa gerakan rakyat secara masif dan intensif di seluruh negara Arab terjadi setelah rakyat Mesir bergerak, mengalami eskalasi yang luar biasa, dan mencapai puncaknya saat Mubarak mundur dari kursi kepresidenan. Dari jargon, pola perjuangan, dan tujuannya, pengaruh revolusi Mesir memang nampak memberikan pengaruh yang sangat besar. Seolah-olah rakyat Mesir adalah bangsa pertama yang mampu menjatuhkan diktaktor di dunia Arab. Kuatnya pengaruh ini dapat dimengerti, sebab posisi Mesir amat menonjol di kawasan itu, baik secara geografis, politik, dan sosial. Selama ini, Mesir pula yang dipandang sebagai pemimpin di kawasan.

Di luar negara-negara Arab, bangsa Iran juga berupaya merebut kepeloporan revolusi itu. Mereka berupaya meyakinkan semua orang bahwa revolusi yang melanda dunia Arab merupakan anak kandung dari Revolusi Islam Iran 1979. Tipe keduanya memang memiliki kesamaan, yakni gerakan rakyat dan melawan kediktatoran yang ditopang oleh rezim militer dan Amerika Serikat. Namun demikian, upaya itu nampaknya sulit menjadi kenyataan, sebab kebanyakan rakyat Arab –sekalipun diam-diam mengagumi revolusi Iran– memendam perasaan tidak suka terhadap Iran yang Syi'ah. Faktanya, setelah lebih 30 tahun Iran mendukung gerakan perlawanan di negara-negara Arab tak satupun rezim despotis Arab yang tumbang.

- ***Kesatuan***

Dunia Arab telah terpecah mejadi banyak negara sejak perjanjian Sycos Pycot pada penghujung Perang Dunia I. Keterpecahan itu –kendati mendapatkan kritik yang luar biasa dari para cendekiawan, rakyat, bahkan para pemimpin Arab– hingga kini tetap bertahan sebagai realitas yang tidak berubah. Abid al-Jabiri bahkan berpandangan bahwa proyek "restorasi" Arab harus berangkat dari realitas ini, jika tidak maka hal itu adalah utopia.[2] Usaha-usaha untuk menyatukan Arab dalam satu unit politik dan sosial memang pernah sangat nyaring terdengar pada 1950-60an, akan tetapi selalu gagal bersamaan dengan ketidakmampuan para pemimpinnya untuk membuat konsensus dan menyerahkan kekuasaan.

Pada sisi lain, semangat kesatuan Arab sesungguhnya tetap menyala di kalangan rakyatnya. Gelombang revolusi yang melanda sekarang juga memperlihatkan kuatnya kesatuan rakyat yang telah dipisah oleh batas-batas negara dalam waktu yang

---

2) al-Jabiriy, *Wijhatu Nadzar*, hlm. 203.

lama. Rakyat di negara-negara di dekat Tunisia dan Mesir yang non-Arab hampir tidak terpengaruh oleh gerakan rakyat tersebut. Sementara rakyat di negara-negara Arab yang cukup jauh dari Tunisia seperti Oman, Yaman, dan Bahrain merasakan pengaruh yang amat kuat dan mendalam.

Perebutan kepeloporan yang terjadi saat ini juga mengasumsikan adanya kebersamaan dan kesamaan di antara gerakan protes rakyat di negara-negara Arab yang berbeda itu. Bayangan bahwa bangsa Arab yang telah terpisah-pisah itu memiliki satu pemimpin yang menyatukan mereka masih cukup kuat. Faktanya, pemimpin yang kuat semakin hilang dari bangsa Arab. Setelah mereka seolah disatukan oleh Naseer, kemudian gagal menemukan pemimpin yang sekelas dengannya, maka saat ini pemimpin itu sudah tiada lagi. Sebab gerakan rakyat kali ini tidak melahirkan satu pemimpin yang benar-benar sentral lantaran karakter gerakannya cenderung berkarakter *less leadhership*. Dari sinilah, perebutan tahta pemimpin Arab itu kini bergeser kepada perebutan "status" kepeloporan dalam revolusi rakyat.

***

C. Revolusi Arab dan Paradok Iran

Semula Iran adalah negara yang paling konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat di berbagai negara Arab untuk merdeka dari penguasa militer otoriter dan monarki despotis. Iran merupakan negara pertama yang secara ekplisit mendukung perjuangan para pemuda Tunisia untuk menumbangkan kekuasaan Ben Ali. Iran pula yang "menyertai" perjuangan rakyat Mesir untuk menjatuhkan rezim Mubarak yang dikenal sangat berpengaruh di Dunia Arab. *Press TV* dan *al-Alam*, dua televisi regional dan internasional pemerintah Iran, menayangkan

peristiwa-peristiwa revolusi Mesir secara marathon dan menyandingkannya dengan rangkaian peristiwa pada masa Revolusi Iran 1979.

Konsistensi Iran dalam mendukung perjuangan rakyat Arab terus terpelihara ketika Yaman, Libya, dan Bahrain mengalami pergolakan hebat. Untuk negara yang terakhir, Iran memberikan perhatian amat khusus mengingat kedekatan aliran keagamaan antara penduduk mayoritas Bahrain dan rakyat Iran, di samping karena rezim Bahrain berorientasi ke Amerika Serikat, musuh Iran, dan merupakan sumber ancaman terdekat dari Iran.

Ketegasan Iran dalam mendukung revolusi rakyat Arab semakin jelas ketika pergolakan dalam skala kecil mulai pecah di Qathif, Riyadh, dan beberapa kota lain di Arab Saudi. Iran bukan hanya mengecam despotisme Arab Saudi, namun juga mencibir fatwa ulama Arab Saudi yang mengharamkan rakyat turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi menuntut perubahan.

- ***Standar Ganda***

Namun, Iran gagal memelihara konsistensi itu ketika rakyat Suriah menuntut rezim Asad –yang berpaham nasionalisme Arab sekuler dan pengikut Syi'ah Alawiyah– untuk melakukan perubahan fundamental terhadap pemerintahan. Seiring dengan eskalasi gerakan yang terjadi di Suriah, Iran terus melancarkan kampanye menentang gerakan rakyat untuk perubahan dengan menuduhnya sebagai gerakan pengacau keamanan, infiltrasi asing, dan tuduhan-tuduhan "lucu" semacamnya. Iran juga tidak mengecam fatwa ulama Suriah yang melarang rakyatnya untuk melakukan demonstrasi.

Media massa pemerintah Iran juga "gagap"untuk menayangkan jatuhnya sejumlah korban meninggal dan luka-luka akibat

aksi kekerasan aparat keamanan terhadap demonstrasi damai di Suriah, melainkan justru menayangkan demonstrasi untuk mendukung rezim Asad. Padahal, pers pemerintah Iran hampir setiap saat tetap menayangkan aksi kekerasan aparat Bahrain terhadap rakyatnya kendati demonstrasi itu sudah jauh menurun dan Bahrain, terutama di Manama, dikabarkan sudah berangsur stabil.

- ***Teman dan Lawan***

Sikap Iran terhadap revolusi rakyat Arab ternyata tidak sepenuhnya didasarkan kepada prinsip-prinsip yang jelas dan tegas, tetapi berdasarkan hubungan persekutuan atau permusuhan. Jika rezim yang hendak ditumbangkan oleh gerakan rakyat adalah merupakan sekutu Iran, maka demonstrasi rakyat secara damai sekalipun dipandang adalah kesalahan. Menurut hemat penulis, itulah yang terjadi dalam inkonsistensi Iran terhadap gerakan rakyat di Suriah. Di saat yang sama gerakan rakyat yang menentang rezim musuh Iran sejak awal akan memperoleh dukungan, sebagaimana ditunjukkan oleh sikap Iran terhadap gerakan rakyat Tunisia, Mesir, dan Yaman.

Arab Saudi dan Bahrain merupakan musuh Iran. Permusuhan dengan yang pertama sering dipandang sangat historik dan mendalam. Arab Saudi sangat menginginkan tumbangnya rezim Iran. Bahkan, menurut bocoran *Wikileaks*, Arab Saudi mendorong Amerika Serikat dan Barat untuk menggunakan opsi militer guna menyelesaikan kasus nuklir Iran. Jadi bukan Israel, namin Iran yang Arab Saudi oleh dipandang sebagai ancaman terbesar di kawasan. Iran juga memiliki sikap yang sepadan. Salah satu “orientasi” politik luar negeri Iran adalah jatuhnya dinasti yang pernah memporak-porandakan makam suci Hussein di Karbala.

Bahrain juga dipandang sebagai ancaman besar bagi Iran, sebab negara itu mengijinkan berdirinya pangkalan militer Amerika Serikat sehingga menjadikan Iran sebagai sasaran. Bahkan pangkalan militer itu dibangun dengan menggusur hunian penduduk Syi'ah Bahrain. Bahrain pun memandang Iran sebagai negara yang sangat membahayakan *survival*nya mengingat kedekatan aliran keagamaan antara penduduk, kedekatan geografis dua negara, serta agresifitas Iran. Dalam kasus revolusi rakyat di Bahrain dan Saudi, Iran bukan hanya memberikan dukungan secara "berlebihan", namun juga dituding turut melakukan *move* untuk "membidani" lahirnya bibit-bibit gerakan.

Lain lagi sikap Iran terhadap Libya. Sikap Iran yang biasanya aktif dalam persoalan di kawasan sedikit berubah ketika pasukan sekutu melakukan ofensi udara terhadap pasukan Qaddafi di Libya. Selama ini, rezim "sinting" Qaddafi bukanlah kawan Iran, kendati pernyataan-pernyataan pemimpin kedua negara kadangkala ada kedekatan. Sementara Amerika Serikat jelas-jelas musuh terbesar Iran. Pada titik ini, Iran mengecam keduanya. Qaddafi dikecam karena kebrutalannya dan Sekutu dikecam akibat intervensinya. Sikap ini, kendati juga menjadi opini luas di Indonesia, sesungguhnya membingungkan sebab tujuan yang kedua adalah mencegah yang pertama.

Dalam konteks revolusi rakyat di negara-negara Arab, sikap Iran nampaknya tidak begitu berbeda dengan negara-negara lain yang menempatkan kepentingan di atas nilai. Beberapa contoh di atas merupakan ilustrasi sederhana bahwa Iran belum mampu memainkan peran di kawasan dengan cara taat azaz.

***

BAB IX

Menuju Dunia Arab Baru

A. Kebangkitan Kesatuan Arab

Gelombang revolusi rakyat yang berhasil gemilang di Tunisia dan Mesir, sedang bergolak hebat di Libya, Yaman, dan Bahrain, dan mulai membesar di Meuritania, Aljazair, Irak, Oman, Sudan, Suriah, Djibouti dan Yordania, seolah telah menyatukan perasaan dan cita-cita seluruh bangsa Arab. Rakyat Arab yang berbeda negara saling memberi dukungan moral dan solidaritas atas perjuangan yang mereka lakukan.

Rakyat di negara-negara Arab –baik di Barat, Timur, dan Teluk dan terbagi ke dalam banyak negara– memiliki kesadaran dan sikap yang sama, yaitu mengutuk pemerintahan otoriter Ben Ali, Husni Mubarak, dan penguasa-penguasa otoriter lainnya. Mereka telah berbagi perasaan yang sama, merasa memiliki nasib yang sama, dan menghadapi musuh dengan karakter yang sama, dan berjuang bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita yang sama pula.

Inikah indikasi bangkitnya persatuan Arab? Akankah kesamaan-kesamaan ini lambat laun akan menghidupkan kembali memori indah persatuan Arab dengan segala harapan kejayaannya seperti yang pernah terjadi dekade 1960-an? Akankah revolusi ini akan membuat bangsa Arab memunculkan kembali hasrat mereka untuk menjadi satu unit politik sebagaimana tahun 1940-50-an atau setidaknya satu kesatuan federasi Arab sebagaimana yang pernah dicoba Mesir-Libya-Suriah?

***

Paska kekalahan memalukan dalam perang 1967, gagasan persatuan Arab memang meredup hingga kini. Ideologi Pan Arabisme yang mencita-citakan persatuan Arab dipandang sebagai “wacana” di atas langit, jauh dari kenyataan. Pada titik ekstrem, orang yang masih getol memperjuangkan itu dipandang sedang bermimpi di siang bolong.

Fakta yang ada memang tidak jauh dari kesimpulan itu. Paska kekalahan dalam perang enam hari yang melibatkan negara-negara Arab terkuat saat itu, mental bangsa-bangsa Arab jatuh ke titik terendah. Mereka menyebut peristiwa itu sebagai *al-naksah* (sangat memalukan). Partai-partai yang semula menjadi rumah perjuangan Pan-Arabisme –baik yang menyebut ideologinya dengan nasionalisme Arab (*al-qawmiyyah al-Arabiyyah*, bukan *al-wathaniyyah al-Arabiyyah*), Nasseris, ataupun yang lain, tidak laku lagi dijual. Partai-partai itu apapun namanya memperoleh suara kurang dari 5 persen dalam berbagai pemilihan umum di sebagian besar negara Arab. Bahkan partai *al-Hizb al-Diymuqrathi al-Naashiriy* (Partai Demokrasi Nashirian) tidak memperoleh kursi dalam pemilu 1995 di Mesir yang merupakan “rumah” ideologi Naseeris.[1)]

---

1) Nabil Abdul Fattah, *al-Nash wa al-Rashaash: al-Islam al-Siyaasiy wa al-Aqbaath wa Azmaat al-Dawlah al-Hadiitsah fi Mishr*, (Beirut: Dar al-Nahaar li al-Nasyr, 1997), hlm. 144-158.

Setelah tumbangnya Saddam Hussein, praktis hanya Suriah yang memiliki partai berkuasa berorientasi Pan Arabis. Partai itu pun sudah tidak lagi menyerukan Persatuan Arab sebagai satu unit politik, ekonomi, dan kultural sebagaimana gagasan inti dari ideologi tersebut. Mereka tidak lagi melakukan uji coba penggabungan beberapa negara Arab menjadi federasi (*ittihadiyyah*) seperti yang pernah dilakukan pada 1950-60-an atau mendiskusikan kemungkinan bersatunya seluruh Arab dalam satu unit politik sebagaimana digagas dalam konferensi Iskandariyah 1942. Hingga saat ini, mereka bahkan tidak pernah mewacanakannya lagi.

● *Bentuk Baru*

Gelombang revolusi rakyat yang terinspirasi dari Tunisia dan memperoleh sukses yang luar biasa di Mesir, serta sedang dalam masa "inkubasi dan aksi" di negara-negara Arab lain, menunjukkan bahwa kesatuan Arab sesungguhnya masih sangat kuat.[2] Sungguh cepat dan amat mendalam efek yang ditimbulkan oleh revolusi Tunisia dan Mesir terhadap negara-negara Arab yang lain, termasuk yang berjauhan secara geografis sekalipun. Sedangkan terhadap negara-negara non Arab yang secara geografis sangat dekat, pengaruh itu ternyata sangat minimal.

Jauhnya jarak antara Tunisia dan Kesultanan Oman dan Kerajaan Bahrain, misalnya, tidak lagi menjadi penghalang. Kesultanan yang dikenal paling stabil dan tertua di Teluk itu ternyata juga terpengaruh oleh gelombang revolusi rakyat

---

2) Karena itu, penulis sepakat dengan penamaan peristiwa 2010-2011 itu dengan Revolusi Arab yakni tuntutan perubahan fundamental terhadap tatanan politik negara-negara di Dunia Arab, bukan Timur Tengah atau Dunia Islam. Perbedaan istilah-istilah itu dapat dibaca dalam Jenderal Dr. Salah Salim, *Hurub al-Manthiqhah al-arabiyyah: al-Mawqif al-Siyasi al-Masry*, Kairo: Dar al-Syuruq, 2001) hlm. 184.

di Tunisia dan Mesir kendati dalam skala yang masih kecil. Bahrain bergolak hebat. Rakyat Yaman juga turun ke jalan untuk mendesak jatuhnya rezim Saleh. Rakyat di ketiga negeri itu sesungguhnya tidak memiliki kedekatan geografis ataupun hubungan geneologis secara langsung dengan rakyat Tunisia. Satu-satunya yang mempersatukan mereka adalah bahasa dan kultur kearaban. Ini pula yang disebut-sebut ideologi Pan Arabis sebagai sumber persatuan Arab.

Hanya saja kesatuan Arab sekarang ini seperti memperoleh bentuk baru yakni solidaritas rakyat dan perjuangan bersama untuk melawan tirani, bukan dalam bentuk formal sebagai federasi atau persatuan Arab sebagai satu negara. Bila dua isu itu kemudian kembali diwacanakan di tengah-tengah hirup pikuk revolusi rakyat, itu bisa saja terjadi, namun kemungkinannya kecil. Yang jelas, slogan-slogan perjuangan rakyat di Tunisia, Aljazair, Yaman, Bahrain, Yordania, Oman, Bahrain, Meuritania, Suriah, Libya, dan Sudan masih menunjukkan bahwa gerakan yang mereka lakukan bersifat lokal, yaitu untuk perubahan di negaranya masing-masing.

Akan tetapi, slogan-slogan mereka juga mulai menunjukkan adanya solidaritas kuat lintas negara. Paska keberhasilannya, slogan revolusi Mesir mulai melebar kepada "kearaban", yang berarti seruan kepada seluruh bangsa Arab untuk melakukan hal serupa. Pemuda-pemuda di berbagai negara Arab memberi dukungan kepada perjuangan rakyat Mesir untuk perubahan dan menyambut suka cita atas tumbangnya rezim Mubarak. Gerakan perubahan di Tunisia dan Mesir juga memperoleh dukungan luas dari warga Arab yang berada di manca negara. Demikian pula, ketika rezim "sinting" Muammar Qaddafi menjadikan Libya banjir darah, rakyat di berbagai negara Arab menyatakan solidaritas atas perjuangan dan pengorbanan rakyat Libya.

Kesatuan rakyat Arab jelas nyata adanya, bukan utopia. Potret kekompakan rakyat Arab mendukung revolusi Tunisia, Mesir, dan Libya, gelombang besar "revolusi" yang kini mengikutinya di berbagai negara Arab, dan kuatnya solidaritas antar mereka, adalah cermin yang cukup terang bagi masih adanya kesatuan itu.

***

B. Dunia Arab Baru

Keberhasilan revolusi rakyat Tunisia dan Mesir serta pengaruhnya yang begitu luas dan mendalam terhadap perkembangan sosial politik di seluruh Dunia Arab, termasuk di negara-negara Teluk yang hidup dalam kemakmuran luar biasa, mencerminkan adanya arah baru pada masyarakat kawasan tersebut. Masyarakat Arab telah tersadar bahwa rakyatlah yang seharusnya memiliki kedaulatan, dan rezim pemerintahan hanyalah pelaksana mandat yang diberikan oleh rakyat. Rezim bukanlah "berhala atau monster" yang selalu menakut-nakuti rakyat, mengekploitasi ekonomi rakyat, dan memaksa rakyat untuk mempersembahkan segala hal untuk penguasa. Ketakutan yang menjadi tembok psikologis telah didobrak oleh rakyat Mesir dan Tunisia. Kini, sebagian masyarakat Arab telah berhasil meruntuhkan diktaktor yang memerintah mereka, sebagian lain tengah bergerak menuntut agar kedaulatan itu dikembalikan kepada mereka, dan sebagian lagi menunjukkan indikasi kuat sedang menyiapkan hal yang sama.

Tuntutan itu berkumandang sangat kuat di hampir seluruh negara Arab. Rakyat Arab telah siap berkorban untuk cita-cita mereka. Kumandang tuntutan itu bak petir yang menyambar sebagian besar rezim otoriter Arab dan membuat rezim otoriter lainnya berada dalam ketakutan yang luar biasa. Kini, rezim pemerintahan di negara-negara Arab bukan hanya lebih berhati-

hati dan tidak lagi mudah memperlakukan rakyatnya secara semena-mena, namun mereka bergaya siap melakukan apa saja untuk rakyatnya asalkan kekuasaannya tidak hilang seluruhnya.

Reformasi mendadak dan drastis dilakukan di Yordania, Yaman, Bahrain, Suriah, Arab Saudi, dan Aljazair. Paket-paket program instan untuk rakyat miskin digelontorkan sedemikian rupa. Para penguasa Arab yang tidak tersentuh kini berupaya keras mendekat hati rakyatnya dengan sering tampil di media lengkap dengan kemasan janji-janji manisnya. Sebagian penguasa Arab berupaya meyakinkan rakyatnya bahwa ia tidak akan mencalonkan sebagai penguasa lagi, apalagi mewariskan kepada anaknya.

***

Rakyat Arab kini semakin mengerti dan mandiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Mereka tidak perlu didorong oleh keyakinan ideologi tertentu dan khotbah para pemimpinnya untuk bersama-sama bergerak menghadapi persoalan yang menimpa mereka. Mereka juga tidak menunggu janji-janji manis para orator mengenai kejayaan dan keagungan di masa depan. Mereka juga tidak memerlukan gagasan yang rumit untuk membaca keadaan dan membimbing mereka untuk melakukan perubahan. Mereka melihat tumpukan persoalan yang dihadapi secara lebih riil, sekaligus mencari solusi dan melaksanakannya sendiri.

Selama ini, gerakan perubahan di dunia Arab selalu didorong oleh sentimen ideologi yang amat kental. Gerakan reformasi Agraria 1950an di Mesir dan di Libya pada 1970an, jelas sekali mengambil dasar-dasar gerakan dari ajaran Sosialisme. Gerakan al-Mahdi di Sudan dan Revolusi di Iran jelas meletakkan Islam sebagai pijakan. Gelombang revolusi rakyat Arab saat ini berbeda dari itu semua. Pijakan mereka adalah

perjuangan untuk perubahan dan solidaritas terhadap nasib sesama.

Gelombang revolusi ini mencerminkan adanya tatanan baru di masyarakat Arab. Berbeda dengan yang terjadi sebelumnya, mereka tidak lagi bergantung kepada pemimpin untuk melakukan perubahan. Hampir seluruh teoretisi mengenai tindakan kolektif menyatakan bahwa setiap gerakan massa pasti membutuhkan orang-orang yang mampu menjadi pemimpin. Pemimpin tahap pertama adalah *the intellectual*, yakni orang-orang yang berhasil meruntuhkan logika kekuasaan dan menempatkannya sebagai sumber persoalan.[3] Tipe pemimpin ini, selain mampu merumuskan visi masa depan, juga harus mampu meyakinkan rakyat bahwa apa yang dia nyatakan adalah benar sehingga visi yang ia kembangkan kemudian menjadi keyakinan bersama.

Tipe pemimpin selanjutnya adalah *the propagandist* yang mampu mengubah keyakinan bersama yang ditebar oleh para intelektual menjadi jargon-jargon atau slogan-slogan gerakan yang membakar massa. Jika tipe pemimpin pertama adalah orang yang tajam dan dalam keilmuannya, maka pemimpin kedua ini cenderung destruktif dan selalu berupaya mencari musuh untuk dihancurkan. Oleh karena itu, keberhasilan pemimpin tipe ini harus segera dilanjutkan dengan pemimpin tipe lain, tipe ketiga, yakni pemimpin yang mampu melakukan pelembagaan terhadap hasil-hasil gerakan. Mereka adalah para profesional dan birokrat yang memahami arah gerakan sekaligus ahli di bidang masing-masing.

---

3) Artinya gerakan itu secara teoretik berasal dari agen, individu tertentu yang sentral dan berpengaruh, bukan dari kelompok atau sistem terlebih dahulu. Lihat hal ini dalam Eileen Barker, “Kingdoms of Heaven on Earth: New Religious Movement and Political Orders” dalam Anson Shupe dan Jeffrey K. Hadden (ed), *The Politics of Religion and Social Change* (New York: Paragon House, 1988), hlm. 18. Lihat pula Hoffer, *Gerakan Massa*, hlm. 133.

"Revolusi Arab" kali ini telah menggagalkan tesis para teoretisi ihwal tindakan kolektif yang diyakini oleh banyak akademisi. Pemimpin-pemimpin mereka adalah semua rakyat, terutama anak-anak muda yang resah dengan keadaan. Teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, twitter, televisi, dan telepon genggam, bukan *propagandist*, yang menjadi sarana untuk menebarkan gagasan dan harapan sehingga rakyat memiliki kesamaan pandang atas keadaan. Sarana-sarana itu pula yang membantu rakyat memperoleh keyakinan bersama bahwa mereka harus melakukan sesuatu bersama-sama untuk menghancurkan lawan dan mencapai tujuan. Revolusi Tunisia "dan Mesir" juga tidak diorganisir oleh gerakan keagamaan tertentu, organisasi buruh, partai politik, militer, atau gerakan perlawanan sebagaimana revolusi lain yang selama ini meletus di Dunia Arab.

***

Sarana komunikasi dan teknologi informasi membuat masyarakat Arab lebih kuat, terutama dalam menghadapi rezim-rezim diktaktor. Kekuatan itu terletak pada sumber informasi yang mereka terima tidak lagi berasal dari rezim semata, namun dari berbagai pihak termasuk, dari rakyat biasa. Mereka dapat mencari dan menyebarkan gagasan sendiri, bahkan berserikat di dunia maya untuk menyiapkan gerakan. Hal itu membawa implikasi amat besar dalam cara pandang dan sikap masyarakat Arab terhadap keadaan, terutama fakta bahwa mereka diperintah oleh rezim-rezim diktaktor dalam waktu yang sangat lama.

Sebagian besar media massa Arab memang dikontrol secara ketat oleh kekuatan rezim. Namun, lahirnya tehnologi informasi dan telekomunikasi yang lebih "personal" dan menembus batas membuat rezim manapun amat sulit untuk membendung arus informasi yang datang dari berbagai arah. Pengalaman penulis di beberapa negara Arab memang menunjukkan bahwa situs-

situs oposisi pemerintah di internet pun difilter sedemikian rupa agar suara oposisi sulit menjadi opini dan sikap publik. Akan tetapi, fakta di Tunisia dan Mesir menunjukkan bahwa sumber informasi itu bukan hanya berasal dari kekuatan-kekuatan besar di masyarakat seperti partai politik atau gerakan perlawanan, namun juga dari kalangan awam.

Sumber informasi yang tidak kalah menentukan adalah dari pihak luar. Hal ini jelas di luar kemampuan kontrol rezim manapun untuk membendungnya. Norma-norma "universal" seperti demokrasi, HAM, dan emansipasi bagaimanapun akan menggenangi pikiran masyarakat Dunia Arab. Rezim barangkali mampu mengontrol fisik untuk sementara waktu, namun mereka tentu tidak mudah mengontrol pikiran dan harapan masyarakat yang dibanjiri oleh informasi yang amat beragam.

Lepasnya rakyat Arab dari kungkungan rezim militer dan monarki nampaknya tinggal menunggu waktu. Tunisia dan Mesir sudah tumbang. Di Yaman dan Aljazair, pecahnya gerakan semakin kuat, sementara Meuritania, Oman, Bahrain, Sudan, Yordania, Libya dan beberapa negara lain menampakkan tanda-tanda kuat ke arah akan pecahnya protes rakyat dengan skala yang meningkat.

***

C. Konstelasi Baru di Timur Tengah

Tumbangnya kekuasaan Bin Ali di Tunisia, Mubarak di Mesir, dan kemungkinan sebentar lagi Qaddafi di Libya, serta masih terus berkobarnya gerakan protes rakyat di negara-negara Timur Tengah lain membawa perubahan cukup penting dalam konstelasi kekuatan di kawasan itu. Aktor-aktor lama memang masih memainkan peran signifikan, tetapi tidak lagi sekuat dahulu sebab isu dan tantangan yang dihadapi sudah berbeda.

● *Poros AS vs Poros Iran*

Secara umum, Timur Tengah masih diwarnai rivalitas Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, negara-negara Arab pro-Barat, dan Israel di satu sisi, dan Iran, gerakan-gerakan Islam di banyak negara Arab, dan secara terbatas Suriah dan Qatar di sisi yang lain. Namun, isu tersebut beralih kepada perebutan pengaruh terhadap gerakan rakyat untuk perubahan yang melanda dunia Arab.

Dalam konteks itu, retorika Iran dan Amerika Serikat memiliki kesamaan, yaitu mendukung perubahan dan mendorong pengembalian kedaulatan kepada rakyat guna menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Amerika Serikat memilih konsep "demokratisasi" di Dunia Arab, dan Iran memilih kata "kesadaran Islami" untuk menentukan nasib sendiri. Namun demikian, kedua aktor itu sesungguhnya sedang berebut secara keras untuk mendorong perubahan ke arah yang berlawanan.

Iran menginginkan lahirnya negara-negara Arab "baru" yang sehaluan dengannya, atau setidaknya menjauh dari dekapan Amerika Serikat. Sebaliknya, Amerika Serikat berupaya mendorong sekuat tenaga agar negara-negara Arab baru hasil "revolusi" masuk ke dalam orbit pengaruhnya, atau menjauh dari Iran. Kasus Tunisia, Mesir, dan Libya sejak awal gerakan hingga tumbangnya rezim yang berkuasa secara jelas memperlihatkan pola tersebut. Perebutan itu bukan hanya melibatkan kekuatan diplomasi dan perang media, namun juga unjuk kekuatan di perairan Laut Merah dan Laut Tengah.

Jika rivalitas itu tetap tajam di antara keduanya, kini Mesir, Arab Saudi, dan beberapa negara Arab yang dikenal berada di dalam poros Barat tidak lagi memandang Iran sebagai sumber ancaman secara langsung. Perhatian kebanyakan negara-negara itu –terutama Arab Saudi, Yaman, dan Bahrain– terfokus

kepada gerakan rakyat yang telah pecah, sementara negara-negara yang lain tertuju kepada bibit-bibit gerakan rakyat yang mungkin segera pecah. Kendati demikian, Iran tetap menjadi perhatian penting sebab besarnya pengaruh negara ini pada kelompok-kelompok oposisi yang turut menggalang berbagai gerakan rakyat, seperti minoritas Syi'ah di Saudi Timur, mayoritas Syi'ah di Bahrain, dan "pemberontak" al-Houtsi di Yaman Selatan.

Sementara itu, Iran nampaknya semakin agresif untuk mendorong proses perubahan di negara-negara Arab, terutama yang menjadi musuh besarnya. Pekik kegembiraan Iran menyertai jatuhnya rezim di Mesir dan Tunisia, pekik perjuangan secara berlebihan menyertai pecahnya gerakan protes di Bahrain dan Arab Saudi, dan kampanye perubahan mengarah kepada negara-negara Arab yang lain. Pernyataan diplomatik dan propaganda media Iran mendukung semua itu secara ekstrem. Namun hal itu tampaknya tidak berlaku untuk negara-negara Arab yang selama ini menjadi sekutu Iran, terutama Suriah dan Qatar.

● *Rakyat dan Media*

Dua kekuatan "baru" di Timur Tengah sekarang adalah rakyat dan media. Jelas bahwa keduanya telah ada dan memainkan peran di kawasan sejak lama. Namun kini, rakyat dan media telah menjelma menjadi kekuatan yang paling menentukan arah dan perkembangan negara-negara di kawasan itu. Gelombang "revolusi" yang sedang melanda jelas tidak terpisahkan dari keduanya.

Media dan rakyat, bagaimanapun, tidak sepenuhnya merupakan kesatuan yang utuh. Media seperti internet dan twitter jelas terdifusi ke banyak orang dan kelompok. Pendukung perubahan dapat menggunakannya sebagai sarana perjuangan yang efektif,

namun para penolak perubahan juga dapat menggunakannya untuk hal sebaliknya.

Media televisi yang amat penting juga terbelah dan sedikit banyak tetap terpengaruh oleh sikap pemilik stasiun itu. *Al-Jazeera* –baik versi Arab maupun Inggris– di Doha Qatar merupakan salah satu pilar penting dalam perubahan di dunia Arab sekarang, meski *Al-Jazeera* sendiri belum memiliki sikap yang jelas atas kemungkinan pecahnya gerakan protes di Qatar. Kendati dipandang cukup independen, kelahiran dan posisi televisi ini tidak lepas dari penguasa Qatar. Al-Alam dengan versi Inggris Press TV di Taheran, Iran, jelas sekali merepresentasikan sikap dan pandangan pemerintah Iran. Sedangkan Al-Arabiyya "milik" pemerintah Arab Saudi jelas menyuarakan sikap yang sering berlawanan dengan pemerintah Iran dan merepresentasikan sikap pemerintah Saudi.

Rakyat di negara-negara Arab juga tidak satu suara. Namun demikian, arus terbesar sekarang amat jelas, yaitu menginginkan perubahan terhadap rezim dan sistem politik secara fundamental dan menyeluruh. Aspirasi kuat ini nampaknya tidak bisa ditolak bahkan oleh media yang tidak pro perubahan. Pendukung penguasa despotis di beberapa negara Arab nampaknya hanya berasal dari keterikatan kabilah dan kepentingan jangka pendek. Warna sejarah baru di Timur Tengah nampaknya amat dipengaruhi oleh aktor-aktor di atas dan konstelasinya di kawasan.

***

D. Membayangkan Perdamaian: Pemikiran Ahmad Hassun

Di tengah-tengah pesimisme mengenai terwujudnya perdamaian sejati di Dunia Arab, pemikiran tokoh Suriah Mufti Ahmad Hassun tentang perdamaian yang optimistik cukup

menarik untuk diketengahkan. Mufti Hassun adalah ulama (mufti), pemikir, dan aktivis perdamaian baik di Dunia Arab, Dunia Islam, dan dunia global.

• *Pengertian Perdamaian*

Dalam berbagai tulisan maupun pidatonya, Mufti Hassun tidak memberikan definisi secara tegas apa itu perdamaian, kendati ia banyak berbicara mengenai persoalan tersebut. Dalam pandangan Mufti Hassun, perdamaian semestinya diartikan dalam konteks yang "tuntas dan menyeluruh", baik mencakup pengertian aktif maupun pasif. Dalam pengertian pasif, perdamaian dapat diartikan sebagai kondisi tiadanya perang, ketegangan, dan konflik. Sedangkan dalam pengertian aktif, perdamaian adalah kondisi di mana seluruh kebutuhan dan hajat hidup manusia dapat terpenuhi dengan baik. Pemenuhan kebutuhan itu meliputi seluruh aspek fundamental kebutuhan manusia, seperti kebutuhan materiil, ketenteraman, seksual, dan seterusnya.[4] Asumsinya sederhana, tidak terpenuhinya berbagai kebutuhan itu dapat mengakibatkan kondisi yang bila terakumulasi akan berpotensi mengakibatkan berbagai konflik dan ketegangan, dan bahkan perang.

Mufti Hassun memang tidak secara tegas membedakan pengertian perdamaian secara aktif dan pasif seperti di atas, namun berbagai kegiatannya yang dinyatakan untuk perdamaian dunia meliputi dua kategori itu. Pertama, Hassun memiliki perhatian besar terhadap tiga konflik besar yang tengah dihadapi Dunia Arab dan Islam mulai Kerajaan Maroko dan Aljazair di sebelah Barat hingga Indonesia dan komunitas-komunitas Muslim yang lebih besar di India dan China di sebelah Timur,

---

4) Martin Griffith,, 2001, *Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional*, terj. Mahyuddin dan Izamuddin Makmur dari *Fifty Key Thinkers in International Relation*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 177-8.

dari Republik Turki di Utara hingga Sudan dan Yaman di sebelah Selatan. Tiga persoalan tersebut adalah konflik Palestina-Israel, benturan Barat dan Timur, dan ketegangan hubungan aliran Islam Sunni-Syi'ah. Mufti Hassun memiliki *concern* besar terhadap tiga hal yang dapat dikategorikan sebagai persoalan perdamaian dalam pengertian pasif itu.

Dalam berbagai kegiatan dan ceramahnya, Mufti Besar ini juga memperlihatkan aktivitasnya yang tinggi untuk menangani berbagai persoalan yang sering disebut sebagai sumber-sumber kegagalan perdamaian dalam pengertian aktif, seperti problem kemiskinan, keterbelakangan, patologi sosial, keringnya spiritualitas, dan semacamnya.

- ***Sumber Konflik, Ketegangan, dan Perang***

Mufti Hassun berpendirian bahwa ada banyak hal yang dapat menyebabkan ketegangan, konflik, dan perang dalam hubungan antar kelompok manusia. Di antara sebab-sebab tersebut adalah, *pertama*, adanya pemahaman yang salah tentang agama, ras, peradaban, dan kemanusiaan; *kedua*, adanya ketidakadilan di semua level baik individu, masyarakat, maupun negara; *ketiga*, kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, dan *keempat*, kurangnya tanggungjawab dan kepedulian sosial.

- ***Hassun dan "Peacemaking"***

Istilah pada sub judul ini tidak diartikan sebagaimana penggunaannya pada studi perdamaian secara umum, kendati terdapat beberapa kesamaan. *Peacemaking* diartikan sebagai segala upaya yang dapat dilakukan untuk menghentikan segala konflik, ketegangan, dan perang, sekaligus menciptakan dan meningkatkan perdamaian sejati secara menyeluruh.[5] Berikut

5) Robert F. Bandle, *The Origins of Peace: A Study of Peacemaking and the Structure of Peace Sttlemet*, (New York: The Free Press, 1973), hlm. 8.

ini beberapa pemikiran dan kegiatan Dr. Hassun menyangkut upaya menciptakan perdamaian sejati dan menyeluruh.

1. Peningkatan Pemahaman tentang Kesatuan Kemanusiaan

Dalam berbagai forum internasional, Mufti Besar Hassun membantah adanya akar-akar konflik dalam berbagai peradaban, kultur, dan agama, termasuk aliran keagamaan. Secara tegas, ia menyatakan bahwa tesis Huntington yang dimuat oleh jurnal *Foreign Affairs* 1993 sebagai sangat berbahaya, terutama bagi masa depan hubungan Barat-Timur dan Barat-Islam. Sebagaimana diketahui, penasihat Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dari Harvard University itu secara cukup jelas menggariskan masa depan dunia yang dipenuhi ketegangan, konflik, dan perang pada skala tertentu akibat adanya akar-akar yang secara fundamental berbeda dalam setiap peradaban.[6] Benturan antarperadaban, menurut Huntington, adalah sesuatu yang sulit dihindari dalam interaksi global yang semakin intensif, massif, dan cepat.

Hassun menyangkal adanya akar-akar konflik dalam peradaban. Menurutnya, peradaban merupakan cermin kesatuan kemanusiaan. Peradaban adalah segala sesuatu yang telah dicapai bersama oleh sejarah manusia semenjak masa purba hingga sekarang yang tak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Peradaban Barat Amerika Serikat dengan pragmatismenya yang telah mengantarkan negeri itu sebagai kekuatan ekonomi, politik, dan militer terbesar dunia saat ini tidak mungkin dapat dilepaskan dari rasionalisme Eropa. Kemegahan Eropa mulai Prancis, Inggris, Jerman

6) Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilization”, *Foreign Affairs*, vol. 72, no.3 Summer 1993, hal. 22-49.

dan beberapa negara Eropa lain dalam skala yang lebih kecil sejak abad XVI hingga awal abad XX juga tidak mungkin dilepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan di Dunia Islam, terutama di Damaskus, Baghdad, dan Spanyol yang menjulang sejak awal-awal masa Islam. Umat Islam pun, menurut Mufti, juga harus jujur bahwa apa yang mereka capai pada masa-masa keemasan itu juga merupakan kelanjutan peradaban manusia yang berkembang sebelumnya seperti dari Yunani, Persia, hingga Mesir, Babilonia, dan peradaban-peradaban kuno lainnya. Singkatnya, tidak ada perbedaan antara satu kelompok manusia dengan yang lainnya dalam peradaban. Dalam pidatonya di Gedung Parlemen Uni Eropa, Strasbourg, Prancis, ia menegaskan:

> "Oleh karena itu, marilah kita meninjau kembali istilah "benturan antarperadaban", karena ia sangat berbahaya. Peradaban tidak dibangun di atas konflik, pembunuhan maupun mayat-mayat yang bergelimpangan. Mereka yang telah membangun berbagai piramid adalah nenek moyang kita semua; mereka yang telah membangun *Pisa tower* (di Italia: penerj) adalah nenek moyang kita semua; mereka yang telah membangun piramid-piramid Chili juga nenek moyang kita semua. Jadi, peradaban manusia adalah milik kita semua."[7]
>
> "Peradaban adalah karya manusia. Gedung parlemen ini bukan hanya dibangun oleh orang Kristen saja, bukan oleh orang Yahudi saja, bukan oleh orang sekular atau Muslim saja. Akan tetapi, gedung ini telah dibangun oleh umat manusia. Kita semua membangun peradaban yang satu yang bernama peradaban manusia. Kami, di negeri kami, sama sekali tidak percaya

7) Hassun, *Kayfa Nuhārib*, hlm. 3.

> dengan benturan antarperadaban. Sebab peradaban tidak pernah berbenturan dengan ilmu dan akal. Peradaban hanya dapat berbenturan dengan kebodohan, teror, dan keterbelakangan. Manusia yang "berbudaya" (berperadaban) apa pun agamanya, apa pun budayanya, tentu akan saling mengulurkan tangan untuk bersama-sama membangun peradaban manusia."[8]

Mufti Hassun juga secara fair mengakui, dan ini belum banyak diungkapkan para pemikir Muslim, bahwa Eropa adalah keajaiban abad XX. Pasalnya, kawasan yang dalam sejarahnya penuh darah itu mampu menyatukan diri dalam apa yang disebut sebagai Uni Eropa (*European Union*) tanpa setetes darah pun mengalir. Mereka setidaknya telah menyatukan ekonomi, perhubungan, politik secara terbatas dan beberapa sektor penting lainnya. Mereka tidak hanya berhasil memutus "lingkaran" kekerasan, konflik, dan perang yang selama berabad-abad telah mendera mereka, namun juga memberikan contoh yang sangat baik mengenai kesatuan manusia. Dalam pidatonya, Mufti Hassun menyatakan:

> "Perang Dunia di Eropa telah berlalu. Bersamaan dengan itu, mereka telah melupakannya dan kembali membangun. Saya mengatakan bahwa Eropa adalah keajaiban abad XX sebab mereka mampu meruntuhkan tembok Berlin tanpa setetes pun darah mengalir. Juga disebabkan mereka mampu menyatukan bangsa-bangsanya dalam satu parlemen."[9]

---

8) Ahmad B. Hassun, *Kayfa Nuhārib al-Thāifiyah*, (Pidato di Universitas Damaskus, 2001), hlm. 2.

9) *Ibid.* hlm. 4.

Ia menyerukan kesatuan kemanusiaan kepada siapa pun dan mencontoh Uni Eropa dalam menyelesaikan konflik antar mereka dan membangun kesatuan kemanusiaan dan peradaban. Menurut Mufti Hassun, seluruh umat manusia apa pun latar belakangnya seharusnya mendukung gagasan itu. Ia menyatakan hal ini di depan anggota Parlemen Uni Eropa:

> "Akan tetapi tugas yang dibebankan di atas pundak Tuan-tuan adalah menyatukan bangsa-bangsa di Dunia dalam satu parlemen manusia sejagad dengan semangat yang satu. Kami di Suriah, di Dunia Arab dan Dunia Islam baik Muslim maupun Kristen siap mengulurkan tangan untuk membantu mewujudkan cita-cita itu."[10)]

Pemikiran inilah yang dipromosikan Mufti Besar dalam membangun hubungan yang baik antara Islam dan Barat. Menurutnya, tidak ada perbenturan akar antara keduanya, bahkan dialog pun dalam konteks peradaban tidak diperlukan, sebab peradaban adalah satu, sehingga yang terpenting adalah adanya pemahaman yang baik tentang kesatuan peradaban manusia, termasuk Islam dan Barat. Inilah yang ia kemukakan pada berbagai kesempatan dialog, pidato ilmiah, maupun ceramah kepada tokoh-tokoh dunia Barat.

Pada tingkat yang lebih mikro, Mufti Besar menyerukan kesatuan kemanusiaan dan ketuhanan kepada para pemeluk agama yang berbeda-beda. Menurutnya, pemeluk agama yang berbeda seharusnya memahami agamanya masing-masing secara mendalam sehingga mereka akan menemukan suatu hakikat terdalam. Pada titik itulah, mereka dapat me-

---

10) *Ibid*.

nemukan kesatuan. "Syari'ah dapat berbeda-beda, akan tetapi *al-din* katanya adalah satu".

> "Agama yang ada di semesta ini adalah satu, tidak berbilang, sebab agama Allah SWT juga satu, tidak berbilang. Adapun syariat yang berbilang adalah yang dibawa oleh Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad *alaihimussalam*."[11)]

Berdasarkan hal itu, Mufti Hassun berkeyakinan bahwa perang suci yang sesungguhnya tidak pernah ada, sebab perang, mengalirkan darah manusia, sama sekali bukanlah kesucian. Allah SWT, menurutnya, akan meminta pertanggungjawaban atas mengalirnya darah seorang anak sekalipun kepada kita semua, sebab perdamaian adalah tanggungjawab kita bersama, dan agama kita tidak pernah memerintahkan umatnya untuk melakukan penghancuran karya besar Tuhan yang disebut manusia.

Pada tingkat yang lebih mikro lagi, Mufti Besar Hassun menyerukan kesatuan kepada Dunia Arab dan umat Islam yang didera isu perpecahan aliran Sunni-Syi'ah. Menurutnya, perbedaan antara dua aliran itu sama sekali tidak memiliki basis fundamental. Ia menyatakan tidak mungkin menjadi seorang Sunni yang baik tanpa menjadi Syi'ah, demikian pula tidak mungkin menjadi penganut Syi'ah yang baik tanpa menjadi seorang yang Sunni, sebab Syi'ah adalah golongan orang yang sangat mencintai dan menjadikan nabi dan keturunannya sebagai panutan, sedangkan Sunni adalah orang yang mengamalkan sunnah nabi. Dengan demikian, tidak mungkin menjadi Syi'ah tanpa mengamalkan sunnah sebab itulah pesan nabi, dan tidak mungkin mengamalkan sunnah tanpa mencintai nabi dan keluarganya:

---

11) Hassun, *Dialog Antar Budaya*, hlm. 34.

“Kata-kata Sunni dan Syi’ah itu adalah kebohongan yang besar. Setiap orang muslim Sunni dari jumlah satu setengah milyar muslim, mencintai az-Zahra, Hasan dan Husein dengan dalil Qur’an yang jelas ‘Katakanlah: Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan’ (QS asy-Syura [42]: 23). Tidak ada seorang muslim pun yang tidak merindukan keluarga Rasulullah saw. Jadi, sebenarnya ia seorang Syi’ah dalam mencintai keluarga Rasulullah saw. Jika keSyi’ahan itu ditandai dengan mencintai keluarga Rasulullah saw, tidak ada seorang muslim yang tidak merindukan keluarga Rasulullah saw. Lalu, apakah seorang muslim Syi’ah dapat mengatakan bahwa ia tidak mengikuti sunnah Rasulullah saw? Jadi, ia juga merupakan seorang Sunni dalam hal mengikuti sunnah Rasulullah saw. Maka setiap orang Syi’ah haruslah menjadi Sunni dalam hal mengikuti sunnah Rasulullah saw. Kemudian, kita tidak merindukan keluarga Rasulullah saw kecuali karena penghormatan kita kepada kakek mereka, yaitu Rasulullah saw. Keluarga Rasulullah saw adalah yang mentransfer kepada kita perkataan-perkataan kakek mereka (Rasulullah saw), dan mereka tidak mengatakan bahwa yang ditransfer itu perkataan mereka. Oleh karena itu, setiap orang Syi’ah merupakan orang Sunni dalam hal mengikuti sunnah Rasulullah saw, dan setiap orang Sunni merupakan orang Syi’ah dalam hal mencintai keluarga Rasulullah saw.”[12)]

---

12) Wawancara Perhimpunan Pelajar Indonesia di Damaskus dengan Mufti Hassun tentang Agama, Radikalisme dan Ekstremisme. Terj. Pelajar Indonesia di Damaskus, 2007, http://ppisyria.com/index.php.

2. *Penegakan Keadilan*

Mufti Hassun merupakan salah satu tokoh di Dunia Arab yang memiliki perhatian besar terhadap persoalan Palestina-Israel. Menurutnya, kunci penyelesaian konflik tersebut dan tercapainya perdamaian sejati adalah keadilan, yakni memberikan tanah dengan segala sumber daya alamnya kepada yang berhak, memenuhi kewajiban-kewajiban dasar bagi warga Palestina terutama para pengungsinya yang berjumlah lebih dari empat juta jiwa. Ia mendukung formula penyelesaian *land for peace,* yakni tanah untuk perdamaian atas konflik yang telah berlangsung lebih dari 60 tahun itu.[13] Faktanya, Palestina memerlukan itu semua dan seharusnya tidak lagi menambah korban jiwa, apalagi anak-anak kecil yang tidak berdosa. Sebaliknya Israel juga membutuhkan hidup *survive*, perdamaian, dan keamanan.[14] Pertukaran kepentingan melalui dialog yang damai adalah kepentingan dan jalan terbaik bersama demi melindungi kesucian nyawa manusia. Menurut Hassun, perdamaian dunia seharusnya dimulai dari bumi perdamaian Palestina:

> “Jika kita ingin menebarkan perdamaian di semesta, hendaknya kita mulai dari bumi perdamaian ‘Palestina’. Paus Vatikan sejak beberapa tahun lalu telah menyatakan bahwa “daripada kita membangun tembok (pemisah Palestina-Israel: penerj), marilah kita bangun jembatan-jembatan cinta kasih di Palestina. Dan saya menyatakan kepada hadirin sekalian bahwa seandainya biaya pembangunan tembok kita gunakan untuk membangun desa-desa, niscaya kita telah berupaya menyatukan anak-anak Palestina

13) Raja Abdul Malik, *Al-Qadhiyyah al-Filistiniyah fi ‘Ahdi al-Tis’inât*. (Kairo: Penerbit tidak disebutkan, 2005), hlm. 49.

14) Jamal Ali Zahran, *Thaqâfah al-Muqâwamah wa al-Tahrîr fi Idârah al-Shirâ,al-Arabiy al-Isârîliy*, (Kairo: Penerbit dan tahun tidak disebutkan),hlm. 163.

> baik Muslim maupun Kristen, Arab maupun Yahudi, dalam satu sekolah agar mereka hidup bersaudara di bumi perdamaian..[15)]
>
> “Yang suci di semesta ini adalah (kehidupan: penerj) manusia, bukan hanya Ka’bah, gereja *al-Qiyāmah*,[16)] masjid Aqsha dan gereja *al-Mahd*.[17)] Karena itu, darah seorang anak kecil di sisi Allah setara dengan nilai seluruh tempat suci yang ada di dunia. Sebab Ka’bah dibangun oleh manusia. Gereja *al-Mahd* juga dibangun oleh manusia. Sedangkan manusia adalah karya Allah. Terkutuk orang-orang yang meruntuhkan bangunan Allah! Artinya, bila seorang anak Palestina maupun yang lain yang terbunuh, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada kita mengenai hal itu. Sebab anak-anak itu adalah miniatur yang dibuat oleh Allah di bumi. Kita yang telah meruntuhkan miniatur itu, apakah mampu untuk menghidupkan mereka kembali?”[18)]

Untuk kepentingan itulah, Mufti Hassun menjadi aktivis yang penuh komitmen dalam Komite Pendukung Intifadha dan Perlawanan terhadap Proyek Zionisme. Dalam berbagai kesempatan, ia juga tidak canggung mendesakkan tuntutan-tuntutan rakyat Palestina untuk memperoleh hak-haknya, termasuk kepada kalangan Yahudi dan para pemimpin Barat. Keyakinan Hassun mengenai penyelesaian konflik Pa-

---

15) Hassun, *Dialog Antar Budaya*, hlm. 36.

16) Gereja *al-Qiyamah* (gereja Kenaikan atau *Church of Ascension*) yang berada di Yerussalem diyakini berdiri di tempat Yesus disalib dan kemudian naik ke langit.

17) Gereja *al-Mahd* (gereja kelahiran atau *The Church of Nativity*) merupakan gereja tertua di dunia yang masih beroperasi. Ia didirikan di Betlehem tempat Yesus dilahirkan perawan Suci Maryam (Maria).

18) *Ibid.* 35.

lestina-Israel sangat jelas, yakni dengan cara damai melalui dialog secara terus-menerus di antara berbagai pihak.

3. *Solidaritas Sosial untuk Pemberantasan Kemiskinan, Kebodohan, dan Keterbelakangan*

Mufti Besar Hassun memiliki keyakinan kuat bahwa perdamaian sejati akan terwujud apabila sebagian golongan masyarakat bersedia mengemban tanggung jawab sosial. Isu-isu penting dalam hal ini adalah pengentasan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Ia tidak banyak berbicara tentang peran negara dan pemerintah untuk persoalan ini. Hal itu mungkin dapat ditafsirkan bahwa kewajiban sosial adalah kewajiban bersama masyarakat. Pada konteks ini, benih gagasan yang ditebar dan kegiatan yang dilakukan Sang Mufti dapat dipandang lebih komprehensif daripada semacam pemikiran dan kegiatan Muhammad Yunus dari Bangladesh, kendati aktivitasnya belum mencapai tingkatan semassif bank mikro (Grameen Bank) gagasan Muhammad Yunus yang telah diterapkan di 100 negara.[19] Singkatnya, Hassun berpendapat keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan berbanding terbalik dengan terwujudnya perdamaian yang sejati.

Faktanya, ia adalah penggagas, penggerak, dan aktivis dalam urusan ini. Ia adalah pendiri dan pemimpin Yayasan Sosial al-Fur'qan, Yayasan Dompet Kesehatan Masyarakat, serta tokoh yang bersemangat dalam upaya pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan. Kegiatan tersebut telah diakui banyak memberikan bantuan kesehatan bagi keluarga yang tidak mampu, pembekalan keterampilan untuk perempuan-perempuan miskin, mem-

19) Muhammad Yunus,, 2007, *Bank Kaum Miskin*, terj. Irfan Nasution, (Jakarta: Marjin Kiri, 2007), hlm. ii.

bantu proses pernikahan mereka, dan tugas-tugas sosial lain yang mendesak di berbagai wilayah di Suriah, utamanya di Aleppo, tempat kelahirannya.[20)]

4. *Moderatisme: Menolak Ektremisme*

Salah satu persoalan bagi terwujudnya perdamaian adalah ektremisme — baik ras, nasionalisme, maupun agama. Untuk yang terakhir, Mufti Hassun berkeyakinan bahwa watak dasar Islam adalah agama yang moderat. Moderatisme harus ditegaskan, dijaga, dan diperjuangkan. Dengan kata lain, moderatisme bukan sesuatu yang dicapai secara pasif, namun juga membutuhkan aktivisme. Menurut Hassun, salah satu sumber ektremisme Islam adalah kebodohon. Ciri terpenting dari ekstremis, menurutnya, adalah tiadanya kemampuan akal untuk menjadikan dialog damai sebagai pemecahan persoalan perbedaan. Hal ini terekam secara jelas dalam wawancara mahasiswa Indonesia di Suriah dengan Sang Mufti:

> "Setiap ekstremisme yang mengatasnamakan agama menunjukkan kebodohan pelakunya. Radikalisme selalu menuju kepada salah satu di antara dua ujung yang miring/turun, bukan pertengahan. Allah swt telah menjadikan agama (Islam, red.) sebagai agama moderat (*wasath*), bukan radikal. 'Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan Kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan (*wasatho*)' (QS al-Baqarah [2]: 143). 'Sebaik-baik perkara adalah pertengahan,' demikian sabda Rasulullah saw. Perhatikanlah para ekstremis, lalu ajak mereka berdialog, maka kita akan mendapati akal mereka tertutup di atas area kebodohan. Mereka meyakini bahwa pendapat mereka-

20) Hassun, *Dialog Antar Budaya*, hlm. 55-6.

> lah yang paling benar dan harus benar, sedangkan pendapat yang lain salah dan harus salah. Hal ini yang menjadikan mereka tidak profesional/*capable* dalam berdakwah di jalan Allah."[21)]

Pada titik inilah, Hassun berpendapat peningkatan taraf pendidikan amat penting untuk mengikis ekstremisme Islam, dan pada titik itu pula kegiatan-kegiatannya diarahkan. Ia bukan hanya guru, dosen, dan penceramah yang berupaya menebar pandangan-pandangan Islam yang moderat, terbuka, dan produktif, namun juga secara nyata membangun sistem pendidikan untuk merealisasikan pandangan-pandangannya. Yayasan pendidikannya bukan hanya diarahkan kepada kaum miskin pedesaan yang, menurutnya, potensial untuk "terjerumus" ke dalam ektrimisme beragama, namun juga melakukan pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok yang lemah. Salah satu yang menurut penulis penting dicatat, ia mempersiapkan pendidikan untuk para perempuan agar menjadi mufti, sesuatu yang sulit dijumpai di dunia Islam yang lain.

Hassun dapat dikatakan sebagai figur yang lengkap. Ia adalah ilmuwan agama, penggagas gerakan, dan aktivis. Terbatasnya sumber-sumber tertulis tentang pemikiran dan kegiatannya sungguh pantas disesalkan.

***

E. Restorasi Sejarah Arab

Sejarah mencatat bahwa Arab Islam pernah menjadi kekuatan "adidaya" dunia baik dalam militer, politik, ekonomi, maupun peradaban. Jejak-jejak warisan episode sejarah itu masih tampak jelas dalam ilmu pengetahuan dan peradaban modern saat ini.

---

21) *Wawancara dengan Hassun, hlm.*1.

Kendati ada pihak-pihak yang berupaya menghapus jejak-jejak itu, pengaruh peradaban Arab Islam masih dapat ditemukan dengan mudah pada ilmu pengetahuan modern saat ini, mulai bidang medis hingga humaniora. Vitalitas dan kontribusi Arab Islam dalam sejarah peradaban manusia, bagaimanapun, tidak bisa diabaikan.

Celakanya, nasib sejarah itu tidak mampu bertahan dalam waktu yang panjang. Sebaliknya, Dunia Arab-Islam saat ini harus menerima kenyataan: keterpurukan. Keterpurukan itu meliputi hampir semua bidang.[22] Mereka bukan hanya tidak memberikan kontribusi yang besar bagi peradaban sebagaimana pada masa keemasannya, namun juga berbagai persoalan serius dalam berbagai bidang justru tengah menghimpit mereka.

- ***Sebab Kemunduran***

Keterpurukan Dunia Arab saat ini tidak terlepas dari tiga hal.[23] *Pertama*, menguatnya kembali sentimen Kabilah Arab yang disertai melemahnya semangat *ummah*. Konsep *ummah,* menurut hemat penulis, merupakan satu-satunya ikatan yang pernah berhasil mempersatukan berbagai kabilah Arab. Konsep *ummah* (Islam) itu pula yang telah menghasilkan vitalitas dunia Arab hingga menjadi kekuatan besar yang diperhitungkan dan mampu memberikan kontribusi yang amat berharga untuk peradaban manusia.

Celakanya, menguatnya fanatisme kabilah dalam perkembangannya memperoleh bentuk baru. Kabilah-kabilah yang

---

22) Muhammad Qutb, *Qadhiyyah al-Tanwir fi al-Alam al-Islamiy*, (Kairo: Dar al-Syuruuq, Tahun tidak disebutkan), hlm. 19-32.

23) Bandingkan dengan pandangan al-Jabiri tentang sebab-sebab kemunduran Dunia Arab menurut tiga arus pembaharu yaitu Salafi, Nasionalisme Arab, dan Liberal. Muhammad Abid al-Jabiri, "al-Fikrah al-Qawmiyyah: wa Mathaalib Sha'bah" dalam Dr. Muhammad Ali, 2003, *Qadhaya Hadhariyyah,* hlm. 173.

berkonflik sama-sama menggunakan jargon dan bahasa Islam dalam berhadapan dengan kabilah lain. Potret ini tercermin secara jelas dalam konstestasi kelompok sepanjang sejarah umat Islam, bahkan dalam berbagai protes rakyat dalam skala besar di Bahrain, Yaman, dan Libya yang terjadi sekarang.

Kedua, penjajajahan Dunia Barat mulai abad XVI hingga pertengahan abad XX. Sejarah politik Islam memang diwarnai oleh pasang surut kekuasaan dan pergantian rezim dari asal usul yang berbeda. Namun sebagian besar penguasa itu tetaplah saudara muslim. Berbeda dengan abad XVI, penjajahan dilakukan oleh pihak eksternal yang disemangati oleh ambisi industrial yang tiada berujung. Akibatnya, eksploitasi ekonomi, penjajahan politik dan birokrasi, dan penggerusan budaya dan agama terjadi secara massif dan sistematis dan didukung oleh kekuatan besar.

Akibat lain yang paling serius dari hal ini adalah warisan keterpecahan Dunia Arab menjadi banyak negara.[24] Dunia Arab, setidaknya *masyriq*, tidak lagi menjadi unit politik, sosial, dan budaya yang satu. Mereka terkapling ke dalam batas-batas geografis negara yang cukup banyak, terpisah secara sosial, dan membangun identitas kearabannya sendiri-sendiri secara sempit, yaitu *qathariyah* /nasionalisme Arab sempit, bukan *sya'biyyah*/nasionalisme Arab dalam pengertian luas.

Keterpecahan itu bukan hanya terjadi pada masa penjajahan Barat, namun juga memengaruhi bentuk perjuangan kemer-dekaan dan menjadi fakta tidak tertolak hingga saat ini. Kini, Dunia Arab terbagi ke dalam banyak negara.[25] Di Teluk saja,

---

24) Syafiq Mughni (ed), *An Anthology of Contemporary Middle Eastern History*, (Canada: Indonesian-Canada Islamic Higher Education Project, tahun tidak disebutkan), hlm. 2-3.

25) Ibnu Burdah, *Bahasa Arab Internasional*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2008), hlm. 88-9.

ada 7 negara yang antara satu negara dengan yang lain saling memiliki masalah serius sejak pendiriannya. Di Arab *masyriq* ada 6 negara yang sulit memperoleh stabilitas hubungan antar negara, hingga saat ini. Di bantaran sungai Nil dan Tanduk Afrika, ada sekitar 5 negara yang juga sangat rawan konflik di antara mereka. Dan di Afrika Utara, ada lima negara (Sahara Barat tidak dihitung) yang juga memiliki permasalahan perbatasan hingga saat ini.

Ketiga, sikap Dunia Arab dalam memandang realitas yang telah berubah secara ekstrem tidak banyak berubah. Faktanya, menurut Abdul Hamid Matuli (guru besar sistem politik Universitas Alexandria, Mesir), kendati mereka tertinggal jauh dari Dunia Barat, namun cara pandang yang digunakan cenderung tidak berbeda dengan cara pandang masa klasik dan pertengahan saat mereka dalam kejayaan.[26] Kendati banyak cara pandang ditawarkan, namun ada kecenderungan bahwa Dunia Arab masih membanggakan warisan masa lalu secara berlebihan. Bahwa warisan itu amat penting adalah benar, namun sikap itu juga telah menuntun mereka kepada stagnasi dalam waktu yang panjang.

● *Jati Diri dan Vitalitas*

Ahmed Davutoglu dalam *The Guardian* menulis bahwa arus perubahan yang melanda dunia Arab saat ini merupakan momentum yang amat penting bagi dunia Arab dan kawasan Timur Tengah umumnya untuk menata kembali hubungan regional yang selama ini penuh masalah. Kegagalan memanfaatkan kesempatan ini akan menjadi kerugian yang besar.

---

26) Abdul Hamid Matuli, *Azmah al-Fikr al-Siyasiy al-Islaamiy Fii 'Ashr al-Hadiist*, (Alexandria: al-Ma'arif, tahun tidak disebutkan), hlm. 44.

Penulis berpandangan bahwa revolusi Arab bukan hanya vital untuk itu, namun yang lebih penting adalah sebagai momentum Dunia Arab untuk menemukan kembali jati diri yang seolah tercerabut akibat penjajahan berabad-abad dan pengkaplingan selama Perang Dingin. Dunia Arab harus tersadar bahwa mereka sejatinya adalah satu kesatuan sejarah, perasaan, dan masa depan. Mereka harus menyadari bahwa mereka memiliki kesempatan untuk membangun kembali kehidupan politik, sosial, dan ekonominya agar mencapai era baru yang sejajar dengan bagian dunia yang lain.

Kesadaran itu amat penting dihadirkan sekarang agar Dunia Arab tidak terombang-ambing antara romantisme kejayaan masa lalu dan ketundukan total terhadap capaian Barat. Hanya dengan cara itu, Dunia Arab akan mampu merumuskan persoalan yang dihadapinya secara objektif dan matang, menemukan solusi, dan yang lebih penting, menggariskan masa depannya secara lebih meyakinkan.

Dunia Arab bukan mustahil akan kembali menemukan vitalitas yang ada pada mereka, vitalitas sebuah umat yang agung yang mampu menyumbangkan peradaban yang berguna bagi manusia sepanjang zaman.

***

BAB X

Pelajaran Dari dan Untuk Dunia Arab

A. Perpecahan Sudan: Pelajaran Berharga untuk Indonesia

Kemajemukan yang ada di negeri kita adalah mutiara yang amat berharga. Kita harus pandai-pandai merawatnya dengan bersungguh-sungguh mengikhtiarkan kemakmuran, keadilan, dan kebersamaan. Hanya dengan jalan itu kita dapat menjaga Indonesia yang kaya akan keragaman, peninggalan yang tak ternilai harganya dari para pendiri bangsa, anugerah besar dari Yang Maha Kuasa.

Dengan jalan itu pula, kemajemukan tidak akan lagi menjadi dalih perpecahan, pertikaian, dan perang sebagaimana di Sudan. Sebaliknya, ia justru menjadi kekayaan yang dibanggakan dan pelajaran untuk menghayati kehidupan. Kita harus mampu merawatnya untuk kemudian mewariskan kepada generasi mendatang. Jika mampu melakukannya, maka kita telah merawat pilar-pilar penyangga kebangsaan, mengangkat tinggi harkat kemanusiaan, serta melaksanakan amanat Tuhan.

Pelajaran dari Sudan menunjukkan secara jelas bahwa ketidakadilan dan keserakahan membuat kemajemukan menjadi bara yang memusnahkan. Bukan saja kualitas kehidupan menjadi amat rendah akibat tiadanya rasa aman, namun kehidupan juga selalu dalam ancaman.

Kini, anugerah kemajemukan kita juga menghadapi ancaman dari dalam. Ancaman itu terkait mulai terganggunya pandangan kita sendiri mengenai keragaman. Penyebabnya bermacam-macam, termasuk pengaruh dari Timur Tengah, dunia Barat, atau egoism kita sendiri. Sekarang, tidak banyak anak bangsa yang benar-benar mensyukuri dan merawat secara sungguh-sungguh anugerah kemajemukan ini. Bahkan ada di antara mereka yang berupaya menghancurkannya dengan beragam alasan.

Perpecahan Sudan seharusnya menyadarkan kita bahwa kemajemukan itu bisa menjadi sumber berkah namun juga biang malapetaka. Apabila kita mampu bersama-sama mengukir keadilan, kesejahteraan, dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini niscaya kemajemukan itu akan menjadi limpahan berkah yang tak ternilai harganya. Sebaliknya, jika egoisme, kesenjangan, dan keserakahan yang kita ciptakan maka kemajemukan itu bisa menjadi biang malapetaka yang tiada hentinya.

***

B. Kado Indonesia untuk Dunia Arab Yang Tengah Bergolak

Dalam pergaulan antarnegara berpenduduk Muslim, Dunia Arab tidak harus menjadi sentrum. Dalam banyak hal, kini mereka bahkan harus belajar dari negara-negara Muslim yang lain. Egoisme sebagai negeri asal dan tempat kejayaan sejarah Islam harus dikikis. Sebaliknya, mereka harus melihat dan

menyadari realitas. Mereka sudah tidak lagi memiliki kejayaan masa lampau itu. Sekarang di tengah arus perubahan yang melanda, negara-negara Arab memiliki kesempatan yang amat berharga untuk belajar terutama dari negara-negara Muslim.

Indonesia adalah negeri dengan penduduk Muslim terbesar di dunia yang memiliki khasanah dan pengalaman yang menarik untuk dijadikan pelajaran bagi bangsa-bangsa Arab sekarang. Dalam banyak hal, Indonesia pantas menjadi contoh bagi bangsa-bangsa Arab yang kini tengah menghadapi ujian sejarah yang hebat.

● *Islam dan Demokrasi*

Indonesia, kendati saat ini sedang diuji dengan serangkaian kekerasan, dapat menyampaikan pengalamannya kepada saudara-saudara di negara-negara Arab bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Seseorang dapat menjadi muslim yang baik sekaligus menjadi warga negara bangsa yang demokrat. Bukan hanya di dalam teori atau retorika, namun juga di dalam praktik berbangsa dan bernegara secara nyata.[1)] Pengalaman Indonesia melaksanakan beberapa kali pergantian rezim melalui pemilu yang relatif jujur dan damai bisa menjadi "dongeng" indah bagi para aktivis yang tengah berjuang untuk menata arah perubahan di Dunia Arab.

Negara-negara Arab harus mengakui bahwa praktik politik mereka selama ini memang jauh dari nilai-nilai dasar Islam

---

1) Dengan alasan itu, Ibnu Burdah menyatakan bahwa hubungan Indonesia-Timur Tengah setidaknya berjalan seimbang, bukan antara sentrum dan pinggiran, atau antara bos dan tukang apalagi "babu". Ibnu Burdah, *Konflik Timur Tengah: Aktor, Isu, dan Dimensi Konflik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008). Lihat pula harapan Dr. Hasan Wirajuda dalam wawancara dengan Surat Kabar *Ilaaf*, Maroko, Senin 24 Juli 2006.

dan demokrasi. Kebenaran, keadilan, kesetaraan, musyawarah, pembangunan peradaban, dan kesejahteraan bersama yang menjadi prinsip Islam sulit ditemukan dalam praksis kehidupan bangsa-bangsa Arab sekarang.

Pergantian rezim secara damai yang merupakan praksis penting dari demokrasi tidak menjadi kenyataan. Hilangnya nyawa dan korban luka hampir selalu mewarnai proses pergantian rezim seperti yang terjadi saat ini. Korban yang diminta sudah terlalu banyak untuk lahirnya sebuah revolusi. Proses revolusi di Tunisia, Mesir, Yaman, Aljazair, Bahrain, Meuritania, Libya, dan Yordania telah menelan korbannya, sementara negara-negara Arab lain seperti tinggal menunggu gilirannya.

Sebagian penguasa negara Arab menjadikan Islam sebagai dasar untuk menolak demokrasi. Di luar soal apakah Islam itu setuju dengan demokrasi atau tidak, para penguasa memang telah menjadikan agama egaliter ini sebagai alat kekuasaan. Bukan hanya untuk menjustifikasi sifat otoriter kekuasaan mereka, namun juga sebagai sarana mengontrol masyarakat dan melindas oposan-oposan mereka yang seringkali juga menyuarakan keislaman.

Jika saja Zaenal Abidin bin Ali, Husni Mubarak, Qaddafi, Ali Abdullah Saleh, dan pemimpin negara Arab lain mau belajar kepada pengalaman Indonesia niscaya mereka tidak akan mengalami nasib yang mengerikan seperti sekarang ini. Dihina, dimaki, dan diusir oleh rakyatnya sendiri. Indonesia telah mengalami hal itu sejak 13 tahun yang lalu. Represi politik, eksploitasi ekonomi, dan pelemahan masyarakat hanya melahirkan perlawanan rakyat. Sekokoh apapun kekuatan tentara yang dibangun dan kekayaan yang ditumpuk, ternyata juga tidak mampu menyelamatkan kekuasaan mereka.

- ***Moderatisme***

Keislaman orang Indonesia yang moderat, kendati saat ini juga tengah menghadapi ujian yang berat, adalah hal kedua yang patut menjadi contoh bagi bangsa Arab. Watak moderatisme Islam di Indonesia bukan hanya mampu menerima realitas kemajemukan, namun juga mampu menyerap berbagai unsur kamajemukan itu dan menjadikannya khasanah yang luar biasa. Moderatisme bukan hanya membuat wajah Islam Indonesia tampak lebih indah, namun juga telah mengantar Muslim Indonesia mampu hidup dengan orang yang berbeda agama dalam kebersamaan yang sungguh-sungguh, tulus, dan jujur dalam bingkai bermasyarakat dan berbangsa. Moderatisme juga membuat Islam di Indonesia tidak terjebak pada dikotomi yang merugikan dalam sejarah Islam; Syi'ah versus Sunnah.

Pelajaran ini amat penting disampaikan kepada bangsa Arab yang membanggakan diri sebagai pemilik negeri asal Islam. Muslim Indonesia agaknya pantas mengatakan bahwa praktik keislaman di Indonesia dalam banyak hal lebih dekat dengan semangat dan subtansi Islam daripada praktik keislaman di dunia Arab saat ini. Keislaman di dunia Arab dalam banyak hal semakin jauh dari asal usulnya. Karena itu, Dunia Arab saat ini tidak harus menjadi kiblat keislaman baik dalam pemikiran, sikap, maupun praksis sosial politiknya. Bahkan sebaliknya, Indonesia bisa menjadi guru yang memberikan pelajaran berharga buat mereka.

Ketegangan, konflik, dan perang dengan berbagai dimensi dan level mewarnai kehidupan Dunia Arab kontemporer. Ternyata, tidak sedikit kasus menunjukkan bahwa agama Islam yang membawa kedamaian justru dijadikan sumbu konfliknya. Bahkan pihak-pihak yang berkonflik sama-sama menyatakan memperjuangkan Islam. Ekstremisme telah membuat kehidupan

sebagian bangsa Arab menjadi sempit. Karena itu, belajar kepada Indonesia adalah langkah yang baik untuk mereka.

● *Konsep Diri Bangsa Indonesia*

Yang lebih penting daripada hal di atas adalah apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia. Konsep diri rakyat dan pemerintah Indonesia harus diubah. Rakyat Indonesia tidak boleh menjadi bangsa pemaki diri sendiri, negaranya sendiri, dan pemerintahnya sendiri. Bangsa Indonesia harus sadar bahwa mereka memiliki kekayaan yang luar biasa, di samping tentunya ada kekurangan di sana sini. Hal-hal di atas adalah contoh saja dari segudang kekayaan kita yang layak dibagikan kepada saudara kita di dunia Arab sana.

Bangsa Indonesia harus berani mempromosikan capaiannya dan mendeklarasikan diri bahwa mereka membuka sekolah yang memberikan pelajaran berharga kepada bangsa-bangsa yang lain, termasuk bangsa-bangsa Arab yang sedang berjuang dan mencari model arah perubahan sekarang ini.

Daftar Pustaka

Abdul Malik, Raja, 2005, *Al-Qadhiyyah al-Filistiniyah fi 'Ahdi al-Tis'inât*. Tp, Kairo.

Abdullah, Amin, 2008, Sambutan Rektor pada Rapat Senat Terbuka UIN Sunan Kalijaga dalam Rangka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Dr. Badruddin Hassun, UIN Sunan Kalijaga.

al-Faki, Musthofa, 2002, *al-Arab: Al-Aslu wa al-Shuurah*, Dar al-Syuruq, Mesir.

al-Jabiri, Muhammad Abid, 1994, *Fikr Ibnu Khaldun: Al-Ashabiyyah wa al-Dawlah: Maalim Nadzariyyah Khalduniyyah Fi al-Taarikh al-Islamiy*, Markaz al-Diraasaat al-Wahdah al-Arabiyyah, Beirut.

----------, "al-Fikrah al-Qawmiyyah: wa Mathaalib Sha'bah" dalam Dr. Muhammad Ali, 2003, *Qadhaya Hadhariyyah*.

----------, 1994, *Fikr Ibnu Khaldun: Al-Ashabiyyah wa al-Dawlah: Maalim Nadzariyyah Khalduniyyah Fi al-Taarikh al-Islamiy*, Markaz al-Diraasaat al-Wahdah al-Arabiyyah, Beirut.

-----------, 2004, *Wijhatu Nadzar: Nahwa 'Iaadati Qadhayya al-Fikr al-Arabiy al-Muashir*, *Marzkaz al-Diraasaat al-Wahdah al-Arabiyyah*, Beirut.

al-Matuuliy, Abdul Hamid, 1986, *al-Ghazwu al-Fikry wa al-Tayyaaraat al-Mu'aadiyah li al-Islam*, Maarif, Alexandria.

al-Siba'i, Mustofa, 1997, *Membongkar Kepalsuan Orientalisme* (penerj, Ibnu burdah), Mitra Pustaka,Yogyakarta.

al-Zaydi, Mufid, "Mu'syiraat al-Tahawwul al-Diymuqrathiy fi al-Bahrain: Min al-Imaaraat ila al-Milkiyyah al-Du stuuriyyah", Jurnal *al-Mustaqbal al-Arabiy*, V. 270, Agustus 2001.

Amin, Mohammad Fahim, 1991, *Rahasia Gerakan Freemasonry dan Rotary Club*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, 1993, Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Rajawali Press, Jakarta.

Bandle, Robert F, 1973, *The Origins of Peace: A Study of Peacemaking and the Structure of Peace Sttlemet*, The Free Press, New York.

Black, James A., 1976, *Methods and Issues in Social Research*, Joh Wiley and Sons, Kanada.

Bruinessen, Martin van, "Yahudi sebagai Simbol dalam Wacana Islam Indonesia Masa Kini" *Journal Teologi Gema*, Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta, No.53/1998, hlm. 113-14.

Burdah, Ibnu, "Nalar Pan-Arabisme dan Perilaku Politik Saddam", *Thaqafiyyat*, Vol. 7, No. 2, July-December 2006.

-----------, 2008, *Bahasa Arab Internasional*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

-----------, 2008, *Konflik Timur Tengah: Aktor, Isu, dan Dimensi Konflik*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

-----------, 2011, *Studi Dunia Arab*, naskah buku, dokumen pribadi.

Daja, Burhanuddin dkk (Tim Promotor Penganugerahan Doktor H.C. kepada Badruddin Hassun, 2008, "Satu Tuhan, Satu Peradaban", Panitia Penganugerahan Doktor Honoris Causa UIN Sunan Kalijaga.

Dougherty, James E dan Robert L. Pfaltzgraff, Jr, 1971,*Contending Theories of Internasional Relations*, J.B. Lippincott, Philadelphia, New York and Toronto.

Dr. Salah Salim, 2001, *Hurub al-Manthiqhah al-arabiyyah: al-Mawqif al-Siyasi al -Masry*, Dar al-Syuruq, Kairo.

Eileen Barker, "Kingdoms of Heaven on Earth: New Religious Movement and Political Orders" dalam Anson Shupe dan Jeffrey K. Hadden (ed), 1988, *The Politics of Religion and Social Change* Paragon House, New York.

El Marzdedeq, A.D., 2005, *Jaringan Gelap Freemasonry: Sejarah dan Perkembangannya hingga ke Indonesia*, Syamil Cipta Media, Bandung.

Fattah Nabil Abdul, 1997, *al-Nash wa al-Rashaash: al-Islam al-Siyaasiy wa al -Aqbaath wa Azmaat al-Dawlah al-Hadiitsah fi Mishr*, Dar al-Nahaar li al-Nasyr, Beirut.

Griffith, Martin, 2001, *Lima Puluh Pemikir Studi Hubungan Internasional*, terj. Mahyuddin dan Izamuddin Makmur dari *Fifty Key Thinkers in International Relation*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Hagopian, Mark. N., *Regimes, Movements and Ideologies: A Comparative Introduction to Political Science, 1978*, Longman, New York and London.

Hassun, Badruddin Ahmad, 2008. *Dialog Antar Budaya: Pidato di Depan Parlemen Uni Eropa dalam acara Dialog Peradaban*, terj. Ibnu Burdah, Panitia Penganugerahan Doktor H.C. UIN Sunan Kalijaga.

---------, 2001, *Kayfa Nuhārib al-Thāifiyah*, Pidato di Universitas Damaskus. www.drHassun.com.

---------, Liputan Wawancara, Jawaban atas Pertanyaan dan Komentar terhadap Pidato Mufti di Uni Eropa.www.drHassun.com.

----------,2007, Wawancara Perhimpunan Pelajar Indonesia di Damaskus dengan Mufti Besar tentang Agama, Radikalisme dan Ekstrimisme. Terj. Pelajar Indonesia di Damaskus, http://ppisyria.com/index.php.

----------, Kutipan Wawancara dengan Mufti Besar tentang Pers dan Konflik Agama, http://kleinverzet.blogspot.com/2008.

Huntington, Samuel P., “The Errors of Endism”, *The National Interest Journal*, No. 17, (Fall 1989), Washington, D.C.

------------., *The Clash of Civilization*: dalam foreign Affairs, vol. 72, no.3 Summer 1993, hal. 22-49.

Hoffer, Eric, 1993, *Gerakan Massa* terj. Masri Maris dari *The True Believer*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Esposito, John L., 1998, *Islam and Politics*, Syracuse University, USA.

Long, Theodore E., 1988, “A Theory of Prophetic Religion and Politics” dalam Anson Shupe dan Jeffrey K. Hadden (ed), *The Politics of Religion and Social Change*, Paragon House, New York.

Matuli, Abdul Hamid, , tahun tidak disebutkan, *Azmah al-Fikr al-Siyasiy al-Islaamiy Fii ‘Ashr al-Hadist*, al-Ma’arif, Alexandria.

Matuli, Abdul Hamid, tahun tidak disebutkan, *Azmah al-Fikr al-Siyasiy al-Islaamiy Fii ‘Ashr al-Hadiist*, al-Ma’arif, Alexandria.

Miqwadh, Dr. Jalal Abdullah, “Miyah al-Furat wa al-Ilaqah al-Arabiyyah-Al-Turkiyyah”, Jurnal Syu’un Arabiyyah, April 1991.

Mughni, Syafiq (ed), tahun tidak disebutkan, *An Anthology of Contemporary Middle Eastern History*, Canada: Indonesian-Canada Islamic Higher Education Project.

Muhammad, 2007, *Bank Kaum Miskin*, terj. Irfan Nasution, Marjin Kiri, Jakarta.

Muqallad, Dr. Muhammad Ali, 2003, *Qadhaya Hadhariyyah Arabiyyah Muashirah*, Dar al-Manhil, Beirut.

Qutb, Muhammad, Tahun tidak disebutkan, *Qadhiyyah al-Tanwir fi al-Alam al-Islamiy*, Dar al-Syuruuq, Kairo.

Saidi, Ridwan and Rizki Ridyasmara, 2006, *Fakta dan Data Yahudi di Indonesia: Dulu dan Kini*, Khalifa, Jakarta.

Sophiaan, Ainur Rofiq, 1993, *Tantangan Media Informasi Islam: Antara Profesionalisme dan Dominasi Zionis*, Risalah Gusti, Surabaya.

Syamsuddin, Syirin, "Iran, al-Islam wa al-Dimuqrathiyyah: Siyaasatu Iraadat al-Taghyiir" (timbangan buku), jurnal *al-Mustaqbalal-Arabiy*, V. 270, Agustus 2001.

Yakan, Fatkhi, 1994, *al-Alam al-Islamiy wa al-Makaaid al-Dawliyyah Khilal al-Qarn al-Rabi' Asyar al-Hijry*, Muassasah al-Risaalah, Beirut.

Yunus, Muhammad, 2007, *Bank Kaum Miskin*, terj. Irfan Nasution, Marjin Kiri, Jakarta.

Zahran, Jamal Ali, *Thaqâfah al-Muqâwamah wa al-Tahrîr fi Idârah al-Shirâ' al-Arabiy al-Isârîliy*.

***

Biografi Singkat Penulis

Ibnu Burdah

- Pengampu mata kuliah *Studi Dunia Arab,* mata kuliah *Sejarah Islam,* dan mata kuliah *Terjemah Arab-Indonesia* di Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Pernah menjabat sebagai: Ketua Pusat Studi Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga; Wakil Direktur *Directorate for Admission, Promotion, and International Relation* UIN Sunan Kalijaga; dan Wakil bidang Hubungan Internasional, Asosiasi Dosen Bahasa Arab, Indonesia.
- Di antara buku-buku karyanya: *Konflik Timur Tengah: Aktor, Isu, dan Dimensi Konflik* (2008, Tiara Wacana); *Bahasa Arab (untuk Hubungan) Internasional: Diplomasi, Politik Luar Negeri, Konflik dan Perdamaian, dan Kerjasama Internasional* (2008, Tiara Wacana); *Menjadi Penerjemah, Metode dan Wawasan Menerjemah Teks Arab* (2004, Tiara Wacana); *Tadarus Kehidupan* (Pustaka Marwa 2005).
- Beberapa artikelnya juga dimuat di jurnal dan penerbit internasional di dalam dan luar negeri. Kajiannya meliputi persoalan *Dunia Arab, Dunia Islam, dan Penerjemahan Arab-Indonesia*. Tidak kurang dari 25 artikelnya tentang persoalan Dunia Arab dan Islam telah dimuat di media massa nasional

seperti *Kompas, Republika*, dan *Media Indonesia, Jawa Pos, Suara Merdeka*, dan *Kedaulatan Rakyat*.

- Cukup aktif menjadi pembicara pada berbagai seminar mengenai persoalan *Dunia Arab, Dunia Islam, dan Terjemah* baik di daerah, nasional, maupun internasional.

***

Buku ini membahas fase awal proses perubahan di sejumlah negara Arab yang ditandai dengan kebangkitan rakyat untuk melawan rezim-rezim diktaktor yang berkuasa. Pada fase awal ini, proses gerakan rakyat di sejumlah negara Arab ini membawa harapan perubahan yang cukup menjanjikan, yaitu lahirnya dunia Arab baru yang demokratis, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Harapan-harapan dari proses perubahan fase awal ini tercermin cukup terinci diuraikan buku ini.

Pemahaman atas fase awal dari proses perubahan tersebut, di satu sisi, amat bermanfaat untuk mendalami peristiwa-peristiwa yang melatari proses gerakan rakyat yang kemudian disebut sebagai "musim semi Arab" itu, sebab-sebab gerakan, serta arah dari awal gerakan. Di sisi yang lain, pemahaman atas fase awal tersebut juga diperlukan untuk mencerna proses perubahan pada fase-fase berikutnya yang sangat kompleks, yakni tatkala harapan-harapan dari proses perubahan di sejumlah negara Arab itu kemudian berubah menjadi arena pertarungan antarkelompok domestik, antaraktor kawasan, dan aktor-aktor internasional dengan beragam kepentingan yang saling diperebutkan, serta isu-isu baru yang mengiringinya.

Pemahaman komprehensif tentu sangat berguna ketika mempelajari tren-tren mutakhir di dunia Arab kontemporer dan dunia Islam kontemporer secara umum. Penulis berharap buku ini dapat menjembatani kebutuhan tersebut, sebagai bacaan sekaligus rujukan akademik bagi para pembelajar dunia Arab kontemporer, dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

ISBN 978-979-1262-68-2